

Keuangan Sosial Islam

dan Pembangunan Lembaga
Pendidikan Islam

DUNIA

Keuangan Sosial Islam

**dan Pembangunan Lembaga
Pendidikan Islam**

Dr. Budi Sudrajat, M.A.

Kata Pengantar:
Prof. Amelia Fauzia, M.A., Ph.D.



RAJAWALI PERS
Divisi Buku Perguruan Tinggi
PT RajaGrafindo Persada
D E P O K

Hak cipta 2023, pada penulis

Dilarang mengutip sebagian atau seluruh isi buku ini dengan cara apa pun,
termasuk dengan cara penggunaan mesin fotokopi, tanpa izin sah dari penerbit

01.2023.00xxx.00.001

2023.xxxx RAJ

Dr. Budi Sudrajat, M.A.

KEUANGAN SOSIAL ISLAM DAN PEMBANGUNAN LEMBAGA PENDIDIKAN ISLAM

xii, 88 hlm., 23 cm

ISBN 978-623-08-xxxx-x

Cetakan ke-1, November 2023

Hak penerbitan pada Rajawali Pers, Depok

Editor : Monalisa, M.Si.

Copy Editor : Rara Aisyah Rusdian

Setter : Jaenudin

Desain Cover : Tim Kreatif RGP

Dicetak di Rajawali Printing

RAJAWALI PERS

PT RAJAGRAFINDO PERSADA

Anggota IKAPI

Kantor Pusat:

Jl. Raya Leuwinanggung, No.112, Kel. Leuwinanggung, Kec. Tapos, Kota Depok 16456

Telepon : (021) 84311162

E-mail : rajapers@rajagrafindo.co.id

<http://www.rajagrafindo.co.id>

Perwakilan:

Jakarta-16456 Jl. Raya Leuwinanggung No. 112, Kel. Leuwinanggung, Kec. Tapos, Depok, Telp. (021) 84311162. **Bandung**-40243, Jl. H. Kurdi Timur No. 8 Komplek Kurdi, Telp. 022-5206202. **Yogyakarta**-Perum. Pondok Soragan Indah Blok A1, Jl. Soragan, Ngestiharjo, Kasihan, Bantul, Telp. 0274-625093. **Surabaya**-60118, Jl. Rungkut Harapan Blok A No. 09, Telp. 031-8700819. **Palembang**-30137, Jl. Macan Kumbang III No. 10/4459 RT 78 Kel. Demang Lebar Daun, Telp. 0711-445062. **Pekanbaru**-28294, Perum De' Diandra Land Blok C 1 No. 1, Jl. Kartama Marpoyan Damai, Telp. 0761-65807. **Medan**-20144, Jl. Eka Rasmii Gg. Eka Rossa No. 3A Blok A Komplek Johor Residence Kec. Medan Johor, Telp. 061-7871546. **Makassar**-90221, Jl. Sultan Alauddin Komp. Bumi Permata Hijau Bumi 14 Blok A14 No. 3, Telp. 0411-861618. **Banjarmasin**-70114, Jl. Bali No. 31 Rt 05, Telp. 0511-3352060. **Bali**, Jl. Imam Bonjol Gg 100/V No. 2, Denpasar Telp. (0361) 8607995. **Bandar Lampung**-35115, Perum. Bilabong Jaya Blok B8 No. 3 Susunan Baru, Langkapura, Hp. 081299047094.



KATA PENGANTAR

KEUANGAN SOSIAL ISLAM ATAU FILANTROPI ISLAM BAGI PENGEMBANGAN PENDIDIKAN

Prof. Amelia Fauzia, M.A., Ph.D.
Guru Besar Sejarah Islam Indonesia UIN Syarif Hidayatullah Jakarta

Fenomena praktik Zakat, Infak, Sedekah, dan Wakaf (ZISWAF), sudah dilakukan oleh Muslim sejak abad ke-7 sampai sekarang abad ke-21. Praktik-praktik ini disebut *'amal khayr*, atau di dalam bahasa Indonesia amal kebajikan. Di Indonesia bentuk-bentuk kebajikan itu juga disebut kegiatan derma dan pelakunya disebut dermawan, serta fenomenanya disebut kedermawanan. Istilah kedermawanan ini tidak terlalu familiar di telinga kita tapi lebih sering merujuk ke praktiknya seperti zakat, sedekah, dan wakaf.

Lalu pada abad ke-19/20, muncul istilah filantropi (kedermawanan sosial) yang digunakan untuk menggiatkan lembaga dan praktik derma yang lebih bersifat jangka panjang dan pembangunan. Istilah ini banyak digunakan lagi sejak tahun 1970-an di Amerika dan merambah Indonesia tahun 2000. Ketika ZISWAF disebut sebagai praktik filantropi Islam, ziswaf menjadi terlihat di mata nasional dan internasional.

Ketika istilah filantropi dianggap masih kurang tepat khususnya ketika merujuk praktik zakat, muncul upaya untuk mencari istilah lain. Para peneliti di Islamic Development Bank (IDB) mulai 2014 menginisiasi penggunaan istilah Keuangan Sosial Islam. Di dalamnya ada praktik ZISWAF juga. Keuangan sosial ini lahir dari rahim

perbankan, yang berkuat pada ekonomi dan bisnis syariah, dalam lingkup keuangan.

Penggunaan istilah keuangan sosial Islam dan Filantropi Islam lebih pada mendorong agar sumber-sumber keuangan itu atau tata kelolanya untuk pembangunan. Filantropi merupakan aktivitas kedermawanan, baik dari individu maupun kelompok dan organisasi, yang bertujuan untuk membantu sesama baik secara material dan nonmaterial dan ditujukan bagi kemaslahatan.

Apakah ada distingsi antara keuangan sosial Islam dan Filantropi Islam? Istilah filantropi berasal dari Barat yang sudah digunakan lama yaitu di Benua Amerika. Posisi zakat memang agak problematik ketika masuk dalam filantropi Islam. Sebab filantropi itu lebih banyak membahas tentang *voluntarism*, sedangkan zakat adalah kewajiban beragama. Zakat bisa tetap masuk kategori filantropi karena yang dilihat adalah fenomena *transfer giving*, bukan pada norma teologinya. Istilah keuangan sosial Islam ini lebih tepat digunakan dalam konteks Islam dibanding filantropi. Meski demikian, kedua istilah ini memiliki tujuan yang sama dalam mendorong penggunaan donasi untuk jangka panjang dan lebih *sustainable*. Sementara ini penggunaan kategorisasi ZISWAF itu lebih sering digunakan dalam istilah filantropi Islam atau *charity*.

Dalam sejarahnya, praktik kedermawanan itu sudah berkembang untuk membantu lembaga-lembaga pendidikan. Di dunia Barat sama dengan dunia Islam, sekolah atau lembaga pendidikan itu menjadi yang pertama untuk didukung oleh praktik filantropi Islam. Misalnya pendirian madrasah pada masa Islam juga dilakukan menggunakan skema wakaf dan sedekah. Ini menunjukkan bahwa lembaga pendidikan mendapatkan *support* dari donasi dari kedermawanan (Fauzia, 2016).

Di masa kontemporer, pertanyaannya adalah sejauh mana praktik kedermawanan ini bisa efektif mendukung pendidikan? Pada praktiknya lembaga pendidikan sudah banyak menggunakan bentuk-bentuk filantropi seperti ZISWAF, namun cara penggunaannya masih konvensional, tidak dikelola dengan profesional, dan akhirnya tidak *sustainable* serta tidak bisa mendukung lembaga pendidikan. Keuangan sosial Islam sangat berpotensi mendukung lembaga pendidikan jika dikelola dengan modern, profesional, dan menggunakan teknologi modern.

Keuangan sosial Islam sudah merambah pada perguruan tinggi dan mulai terlembagakan dengan baik. Seharusnya perkembangan keuangan sosial itu bisa berkembang pesat di pesantren karena dalam 10-20 tahun terakhir pendirian lembaga filantropi itu juga berkembang pesat dalam perguruan tinggi. Studi kasus ini telah memberikan gambaran akan kebutuhan pendanaan sosial Islam yang menjadi solusi keterbatasan pendanaan dari pemerintah bagi perguruan tinggi. Praktik filantropi Islam ini mendorong lembaga pendidikan untuk menguatkan sisi pendanaan alternatif. Inovasi program yang dilakukan dalam rangka mendayagunakan dana zakat, infak, sedekah dan wakaf, mayoritas berkontribusi untuk pembiayaan kegiatan pendidikan. Ini membuktikan bahwa dunia pendidikan bukan hanya sebagai penerima manfaat namun juga berpotensi besar untuk turut masuk dalam gerakan filantropi di Indonesia (Fauzia, dkk., 2022).

Pemanfaatan pendanaan keuangan sosial Islam yang diperoleh melalui instrumen zakat, infak, sedekah, dan wakaf semakin dioptimalisasi oleh lembaga pendidikan Islam untuk pembangunan yang berkelanjutan. Inovasi-inovasi banyak dilakukan lembaga pendidikan Islam untuk menggalang dana secara modern mulai dari digitalisasi hingga menjaring *stakeholder* baik dari pemerintah, lembaga swasta bahkan mitra luar negeri. Pendanaan yang diperoleh kemudian didayagunakan untuk kepentingan peningkatan dan perluasan sarana prasarana yang mendukung aktivitas pembelajaran. Lembaga pendidikan Islam ini pun tumbuh menjadi institusi yang mandiri secara ekonomi. Kemandirian itu tidak hanya dalam konsep pendidikan, tetapi juga dalam pengelolaan pendanaan.

Upaya maksimalisasi yang dilakukan lembaga pendidikan ini menjadi jalan untuk memperkuat potensi pendanaan yang masih belum produktif. Tercatat dalam hasil studi dari Pusat Kajian Strategis BAZNAS pada tahun 2021 menunjukkan bahwa potensi zakat di Indonesia mencapai 327 triliun rupiah per tahun. Sedangkan di tahun yang sama, Badan Wakaf Indonesia (BWI) mencatat potensi wakaf uang di Indonesia mencapai 819 miliar rupiah. Potensi besar zakat dan wakaf ini dinilai masih belum produktif dalam pendaayagunaannya.

Buku ini membahas kontribusi keuangan sosial Islam beserta kompleksitasnya dalam pembangunan pendidikan pondok pesantren. Integrasi keuangan sosial Islam melalui zakat, infak, sedekah, dan wakaf

bahkan dana sosial perusahaan, hibah dan pinjaman kebajikan terbukti telah mampu memberi sumbangsih dalam penyediaan sarana prasarana pendidikan yang memadai. Melalui studi kasus Pondok Pesantren Al Rahmah yang dipaparkan, buku ini memperlihatkan pendanaan yang diperoleh melalui keuangan sosial Islam yaitu zakat sedekah dan wakaf. Dari bermodalkan gedung pinjaman, kini pesantren telah memiliki banyak bangunan kokoh beserta sarana dan prasarananya.

Pola penggalangan dana dalam pesantren yang semula masih bersifat tradisional melalui pembagian kupon, kini berubah dengan adanya uang bangunan dan tanah wakaf yang diperoleh dari para santri baru. Di samping itu, manajemen penggalangan dana yang dilakukan berkembang ke arah yang modern mampu mendatangkan *trust* dari banyak pihak terutama dari berbagai *stakeholder* yang berasal dari luar negeri khususnya Timur Tengah.

Buku *Keuangan Sosial Islam dan Pembangunan Lembaga Pendidikan Islam* memperkuat literasi keuangan sosial dan kontribusinya dalam dunia pendidikan. Buku ini penting dibaca siapa pun yang memiliki perhatian dalam kajian keuangan sosial Islam, atau kajian filantropi Islam.



PRAKATA

Alhamdulillah, akhirnya buku ini dapat dituntaskan dengan segala kekurangan dan kelebihanannya.

Keuangan sosial Islam, khususnya Ziswaf, kini telah menjelma menjadi kekuatan baru di samping keuangan publik (negara) dan keuangan komersial (swasta) dalam mendanai berbagai sektor kehidupan masyarakat. Jika semula hanya dianggap mampu membiayai program-program karitatif dan berjangka pendek, maka kini keuangan sosial Islam dianggap relevan menangani program-program strategis dan berkelanjutan seperti kemiskinan, kesehatan, pendidikan, konservasi lingkungan, penanggulangan bencana, dan permasalahan sosial-ekonomi lainnya, termasuk yang dicanangkan dalam program pembangunan berkelanjutan melalui SDGs.

Buku yang merupakan versi ringkas hasil penelitian beberapa tahun lalu ini menjelaskan gambaran peranan keuangan sosial Islam di bidang pendidikan. Tepatnya dalam pembiayaan lembaga pendidikan Islam nonpemerintah yang rata-rata memiliki keterbatasan kemampuan dalam soal keuangan. Melalui proses kepemimpinan, jejaring, kreativitas, transparansi, keterbukaan, dan akuntabilitas para aktor lembaga

pendidikan Islam, keuangan sosial Islam mampu menjadi pilar penting kemajuan dan peningkatan mutu pendidikan.

Kehadiran buku ini diharapkan mampu melengkapi referensi yang tersedia melalui suatu hasil kajian empirik tentang signifikansi dan kontribusi keuangan sosial Islam secara konkret pada sektor penguatan sumber daya manusia.

Sebagai informasi, pada edisi ini telah dilakukan perubahan berupa penambahan data-data terbaru dari lokasi penelitian. Demikian, semoga persembahan sederhana ini bermanfaat bagi semua pihak.

Serang, Juli 2023

Penulis



DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	v
PRAKATA	ix
DAFTAR ISI	xi
BAB 1 PENDAHULUAN	1
BAB 2 EKONOMI DAN PENDIDIKAN	9
A. Pengertian Keuangan Sosial Islam	9
B. Karakteristik Keuangan Sosial Islam	14
C. Bentuk-bentuk Keuangan Sosial Islam	18
D. Pengertian Pembiayaan Pendidikan	23
E. Sumber-sumber Pembiayaan Pendidikan	25
BAB 3 KONTEKS EMPIRIS PRAKSIS KEUANGAN SOSIAL ISLAM	27
A. Sejarah Pesantren	27
B. Program Pendidikan dan Kurikulum	32
C. Santri dan Dewan Guru	33

D. Sarana dan Prasarana	37
E. <i>Positioning</i> Pesantren	40
F. Profil Figur Utama	41
BAB 4 KEUANGAN SOSIAL ISLAM DAN PEMBIAYAAN PENDIDIKAN	43
A. Bentuk-bentuk Keuangan Sosial Islam di Pesantren	43
B. Profil Donatur	58
C. Strategi Penghimpunan Donasi	61
D. Pemanfaatan Donasi	63
E. Manajemen Donasi	66
F. Pertanggungjawaban Donasi	70
G. Dampak Donasi terhadap Pendidikan	72
BAB 5 KESIMPULAN	77
DAFTAR PUSTAKA	79
INDEKS	83
BIODATA PENULIS	87



< BAB 1 PENDAHULUAN

Pembiayaan merupakan ‘nyawa’ dalam penyelenggaraan pendidikan. Tanpa ketersediaan dana yang cukup, maka suatu lembaga pendidikan akan mengalami kesulitan mencapai tujuan pendidikan yang telah direncanakan. Program-program pendidikan yang telah disusun sedemikian rupa akan sulit direalisasikan tanpa dukungan dana yang memadai. Akibatnya, acaman terhadap mutu pendidikan menjadi semakin nyata.

Persoalan pembiayaan pendidikan hingga kini masih menjadi problem utama yang menggelayuti lembaga pendidikan Islam pada hampir semua tingkat satuan pendidikan. Problem tersebut telah berlangsung begitu lama baik pada lembaga pendidikan yang diurus pemerintah (negeri) terlebih lagi pada lembaga pendidikan yang dikelola masyarakat (swasta). Mereka mengalam kesulitan yang sama, yakni minimnya ketersediaan biaya guna menopang penyelenggaraan pendidikan. Jika demikian kondisinya, maka dapat dipastikan akan menghambat proses penyelenggaraan pendidikan yang berdampak pada rendahnya mutu pendidikan yang kemudian berimbas pada rendahnya mutu kualitas manusia yang dihasilkan. Maka impian tentang daya saing manusia Indonesia di masa depan semakin jauh dari harapan.

Kesulitan pembiayaan pendidikan pada lembaga pendidikan Islam semakin bersifat kompleks mengingat jumlah pendidikan Islam yang mayoritas dikelola masyarakat (swasta). Data Kementerian Agama di tahun 2013 menunjukkan bahwa pada tingkat satuan pendidikan dasar hingga menengah (MI, MTS, dan MA) jumlah lembaga swasta mencapai 42.570 dan lembaga negeri mencapai 3.882.¹ Artinya, jumlah lembaga pendidikan Islam negeri level dasar hingga menengah yang mendapat sokongan penuh dana pemerintah hanya 3,45%. Selebihnya yang swasta sekitar 96,55% mengandalkan dukungan dana masyarakat. Kalaupun ada dukungan pembiayaan dari pemerintah kepada mereka, jumlahnya sangat terbatas mengingat kemampuan anggaran negara yang juga terbatas.

Gambaran buram minimnya pembiayaan pendidikan pada lembaga pendidikan Islam dapat dengan mudah ditemukan pada kondisi ruang kelas yang digunakan untuk kegiatan pembelajaran pada satuan pendidikan dasar hingga menengah (MI, MTS, dan MA). Data Kementerian Agama di tahun 2013 mencatat 58.953 ruang kelas MI dalam kondisi rusak ringan dan rusak berat. Pada tingkat MTS tercatat 21.1645 ruang kelas dalam keadaan rusak ringan dan berat. Pada tingkat MA terdapat 6.717 ruang kelas dalam kondisi rusak ringan dan berat.²

Gambaran buram ini dapat diperluas jika melihat variabel-variabel pendidikan lainnya semisal jumlah pendidik yang memenuhi kualifikasi pendidikan, ketersediaan sarana dan prasarana, kecukupan rasio pendidik dengan peserta didik, tingkat kesejahteraan pendidik, pendidikan tinggi, dan nasib lembaga pendidikan nonformal semacam pondok pesantren dan diniah. Secara keseluruhan, yang tersaji masih merupakan potret buram.

Potret suram wajah lembaga pendidikan Islam yang demikian tidak dapat dibiarkan berlarut-larut karena mengganggu proses pendidikan. Jika mengharapkan anggaran dari pemerintah, kemampuannya terbatas. Karena itu, perlu dicarikan alternatif sumber lain di luar negara yang diharapkan mendukung pembiayaan pendidikan pada lembaga pendidikan Islam, khususnya yang swasta. Selain pemerintah, sumber pembiayaan pendidikan yang potensial adalah orang tua peserta didik dan masyarakat. Orang tua peserta didik umumnya bersedia

¹Kementerian Agama dalam Angka 2013, 83–85.

²*Ibid.*

menanggung sebagian biaya pendidikan yang dibutuhkan lembaga pendidikan. Tetapi, kemampuan mereka juga terbatas pada pembiayaan yang tidak memberatkan semisal kebutuhan biaya operasional, perawatan gedung, penambahan peralatan pembelajaran, pembayaran guru non-PNS, dan sebagainya. Sementara untuk biaya pendidikan yang lebih besar, para orang tua akan merasa keberatan.

Oleh karena itu, masyarakat sebagai komponen ketiga yang turut bertanggung jawab terhadap masalah pendidikan di luar pemerintah dan orang tua peserta didik, perlu dilibatkan dalam mengatasi kesulitan pembiayaan pendidikan.³ Masyarakat di sini dapat berupa perorangan, perusahaan swasta maupun BUMN, ormas sosial-keagamaan, lembaga filantropi, dan institusi kemasyarakatan lainnya. Pelibatan elemen masyarakat menjadi suatu yang niscaya karena mereka memiliki berbagai potensi yang memungkinkan menjadi sumber pembiayaan pendidikan.

Dalam konteks pendidikan Islam, potensi dana masyarakat yang belum tergali secara maksimal adalah dana dari zakat, infak, sedekah, wakaf, CSR perusahaan, dan bisnis sosial yang saat ini dikenal sebagai keuangan sosial Islam (*Islamic Sosial Finance*). Padahal, dilihat dari segi potensi, keuangan sosial Islam mempunyai kekuatan yang luar biasa apabila dimanfaatkan bagi pembiayaan pendidikan Islam. Data di tahun 2015, misalnya, menunjukkan bahwa penerimaan zakat secara agregat nasional hanya mencapai angka 3,7 triliun dari potensi 286 triliun yang tersedia. Sejalan dengan itu, BWI juga mencatat bahwa potensi dana wakaf masih belum tergali dengan baik mengingat mayoritas wakaf di Indonesia berupa harta tidak bergerak (tanah dan bangunan). Padahal, jika aset tersebut dibuat produktif maka akan terkumpul dana yang besar untuk membiayai berbagai keperluan umat.⁴ Oleh sebab itu, dapat dibayangkan potensi pada sumber keuangan sosial Islam yang dapat mendukung pembiayaan pendidikan Islam maupun percepatan peningkatan kualitasnya baik yang bersumber dari dana dalam negeri maupun luar negeri.

Pengalam empirik beberapa lembaga pendidikan Islam yang dibangun dan dikembangkan menggunakan dana wakaf semisal Pondok

³Matin, *Manajemen Pembiayaan Pendidikan*. (Jakarta: Rajawali Press, 2011), hlm. 14.

⁴Informasi pada laman Baznas Pusat dan Badan Wakaf Indonesia Pusat (diakses tanggal 22 Februari 2017).

Modern Gontor, Universitas Islam Indonesia Yogyakarta, Universitas Sultan Agung Semarang, dan Sekolah Smart Ekselensia Dompet Dhuafa Parung membuktikan bahwa keuangan sosial Islam mampu menghasilkan lembaga pendidikan yang berkualitas. Pada pentas dunia, Universitas Al Azhar Mesir merupakan contoh utama dari dukungan dana keuangan sosial Islam (dalam hal ini wakaf) dalam memajukan pendidikan Islam. Preseden sejarah Islam juga menyajikan bukti konkret dukungan keuangan sosial Islam terhadap penyelenggaraan pendidikan.⁵

Menurut George Makdisi, para pejabat dan pengusaha pada era kejayaan Islam terbiasa memberikan donasi pribadi dalam bentuk uang tunai maupun sumber daya ekonomi lainnya untuk mendukung operasional suatu lembaga pendidikan. Sebagai contoh, Perdana Menteri Nizam Al Mulk merupakan penyokong utama dana operasional Madrasaah Nizamiyah yang tersebar di berbagai wilayah Kesultanan Seljuk. Nama lain yang terekam dalam sejarah adalah Abdul Latif Al Masyuri yang mewakafkan hartanya untuk asrama dan beasiswa peserta didik tidak mampu.⁶

Namun, seperti telah dikemukakan, potensi keuangan sosial Islam hingga kini masih menjadi *sleeping giant* (raksasa tidur) yang belum tergarap dengan baik. Masih diperlukan kerja keras dari seluruh komponen umat Islam untuk menggali potensi yang tersedia dan memaksimalkan pemanfaatannya bagi kepentingan umat Islam. Jangan sampai potensi tersebut justru dimanfaatkan untuk kepentingan lain yang dapat dicarikan sumbernya dari dana lain.⁷ Alangkah baiknya apabila dana yang dihimpun dari tubuh umat Islam terlebih dahulu digunakan untuk membangun kualitas umat, terutama di ranah pendidikan yang sangat tertinggal dibandingkan dengan umat lain.

⁵Beberapa LAZ Nasional bahkan mulai memperluas pemanfaatan dana keuangan sosial Islam untuk memenuhi kebutuhan dasar publik selain pendidikan seperti kesehatan, perumahan, pertanian produktif, dan sebagainya.

⁶Lihat terutama Bab III mengenai “The Law of Wakf” dalam George Makdisi, *The Rise Of Colleges Institutions of Learning in Islam and The West* (Edinburgh: Edinburgh University Press, 1981). Lihat juga: Dodi S. Truna dan Rudi Ahmad Suryadi, *Paradigma Pendidikan Berkualitas* (Bandung: Pustaka Setia, 2015), khususnya Bab “Pembiayaan Pendidikan”.

⁷Belakangan ini, misalnya pemerintah berusaha menarik dana dari keuangan sosial Islam sumber wakaf untuk membiayai infrastruktur pemerintah. Padahal, akan lebih baik apabila dana wakaf dimanfaatkan terlebih dahulu untuk meningkatkan fasilitas pendidikan Islam yang masih tertinggal.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini akan membahas dua bahasan pokok yakni: *pertama*, keuangan sosial Islam; *kedua*, pemanfaatan keuangan sosial Islam bagi pembiayaan pendidikan pada lembaga pendidikan Islam, yaitu pondok pesantren.

Buku ini membahas dua poin penting, yakni keuangan sosial Islam yang mencakup pengertian, dinamika, bentuk-bentuk, lembaga, dan potensinya; serta peran keuangan sosial Islam dalam pembiayaan pendidikan di lembaga pendidikan Islam, tepatnya pondok pesantren, yang mencakup pembiayaan operasional dan pembiayaan infrastruktur.

Buku ini bertujuan membahas kompleksitas keuangan sosial Islam yang beroperasi di dunia pondok pesantren dan berusaha menggali peran keuangan sosial Islam secara empirik dalam mendukung pembiayaan pendidikan Islam di pondok pesantren.

Buku ini diharapkan dapat berkontribusi dalam mengidentifikasi bentuk-bentuk keuangan sosial Islam yang beroperasi di pondok pesantren dan mengidentifikasi peran keuangan sosial Islam dalam pembiayaan lembaga pendidikan Islam. Sebagaimana diketahui, pembahasan mengenai keuangan sosial Islam lebih berfokus kepada perannya dalam sektor perekonomian. Padahal, selain perannya di sektor ekonomi, keuangan sosial Islam juga turut berkontribusi dalam pembangunan masyarakat secara luas. Di antaranya pada sektor pengembangan sumber daya manusia melalui pendidikan, kesehatan, dan sosial-budaya. Bahkan, keuangan sosial Islam berperan juga dalam masalah konservasi lingkungan, penanganan bencana, dan penanganan konflik.

Secara khusus, keuangan sosial Islam banyak mendukung pembangunan sektor pendidikan, terutama swasta, yang belum mendapat dukungan finansial memadai dari pemerintah. Bahkan, pada kasus lembaga pendidikan Islam semisal pesantren, keuangan sosial Islam sering merupakan donatur utama pendukung kegiatan penyelenggaraan pendidikan di tengah terbatasnya anggaran dari negara. Karena itu, penelitian ini semakin relevan untuk menggali lebih jauh peran dan kontribusi keuangan sosial Islam terhadap pendidikan Islam, khususnya pesantren. Pilihan lokus studi di Banten karena daerah tersebut merupakan sentra lembaga pendidikan Islam (pesantren).

Konseptual Keuangan Sosial Islam

Istilah keuangan sosial Islam berhubungan dengan istilah keuangan Islam. Karena itu, terlebih dahulu akan dijelaskan konsep keuangan Islam untuk selanjutnya dijelaskan mengenai konsep keuangan sosial Islam.

Menurut Ibrahim Warde, tidak ada definisi mengenai keuangan Islam yang memuaskan. Selalu terdapat inkonsistensi pada kriteria utama tentang keuangan Islam sehingga definisinya beragam sekali. Kriteria utama yang biasanya muncul antara lain menyangkut kepemilikan, sasaran pelayanan, pola pengawasan, afiliasi, dan sebagainya. Jika dikaitkan dengan kepemilikan, maka keuangan Islam diartikan sebagai institusi keuangan yang dimiliki umat Islam. Apabila dihubungkan dengan sasaran pelayanan, maka keuangan Islam adalah institusi yang melayani nasabah Muslim. Jika dikaitkan dengan pola pengawasan, maka keuangan Islam dimaknai sebagai institusi yang diawasi oleh Dewan Pengawas Syariah. Apabila ditautkan dengan afiliasi, maka keuangan Islam dipahami sebagai institusi yang dinaungi oleh Asosiasi Pebankan Syariah. Demikian seterusnya kriteria pokok tersebut dapat semakin meluas.⁸

Namun, secara umum ia merumuskan pengertian keuangan Islam sebagai institusi keuangan yang tujuan dan aktivitasnya berdasarkan pada ajaran-ajaran Al-Qur'an. Singkatnya, perbedaan paling distingtif antara keuangan Islam dan keuangan konvensional adalah pada panduan norma-norma agama. Keuangan Islam mengintegrasikan ajaran Islam mengenai keuangan terkait prinsip, prosedur, asumsi, instrumentasi, dan aplikasinya.

Dari segi karakteristik, Warde mengidentifikasi empat watak utama keuangan Islam yakni: sosialistik, etik, *sustainable*, dan *long-term values oriented*.⁹ Watak pertama berhubungan dengan misi utama dari keuangan Islam yang bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat baik materi maupun nonmateri dan mengurangi kesenjangan sosial-ekonomi antarwarga. Jadi, keuangan Islam mengemban misi sosial sekaligus juga membawa misi ekonomi (baca: profit). Bahkan, misi

⁸Ibrahim Warde, *Islamic Finance Keuangan Islam dalam Perekonomian Global* (terj) (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009), hlm. 9.

⁹*Ibid.*, hlm. 8.

sosial harus lebih didahulukan daripada misi ekonomi. Watak kedua merupakan ruh dari keseluruhan pelaku dan kegiatan keuangan Islam yang harus berlandaskan nilai-nilai moralitas universal, terutama yang lahir dari rahim agama. Intervensi moralitas inilah yang memandu perjalanan keuangan Islam sehingga terbebas dari *moral hazard* dalam ekonomi akibat kehampaan panduan etis. Watak ketiga berkaitan dengan kewajiban keuangan Islam yang harus menjaga keberlangsungan kehidupan baik lingkungan manusia maupun lingkungan alam semesta. Keberlangsungan kehidupan manusia dan kehidupan alam secara harmonis dan berimbang memungkinkan pencapaian kondisi kehidupan yang lebih manusiawi dan keadaan lingkungan yang nyaman bagi segenap ciptaan Tuhan. Adapun watak keempat merupakan cita-cita yang diperjuangkan keuangan Islam yakni mewujudkan nilai-nilai luhur jangka panjang seperti kemaslahatan hidup bersama, keadilan sosial, ketersediaan kebutuhan pokok, keharmonisan sosial, keseimbangan, nir-kekerasan, nir-eksploitasi, persaudaraan, dan pengembangan moral serta material.

Secara umum, institusi keuangan Islam terbagi menjadi dua yakni: institusi keuangan perbankan dan institusi keuangan nonperbankan. Adapun institusi keuangan nonperbankan yang beroperasi secara syariah antara lain adalah BMT, Koperasi Syariah, Asuransi Syariah, Reksadana Syariah, Pasar Modal Syariah, Pegadaian Syariah, Penjaminan Syariah, dan Lembaga ZISWAF. Baik institusi keuangan perbankan maupun nonperbankan mempunyai peran yang hampir sama yaitu sebagai perantara antara para pihak yang mempunyai modal dengan para pihak yang membutuhkan modal. Perbedaan antara keduanya hanya terletak pada prinsip dan mekanisme operasional.¹⁰

Penjelasan di atas telah memberikan sedikit gambaran mengenai keuangan Islam secara umum. Adapun yang dimaksud dengan *keuangan sosial Islam dalam kajian ini adalah institusi keuangan dan individu yang berperan mentransfer sumber daya keuangan untuk tujuan sosial yang berkelanjutan*.¹¹ Saya menambahkan individu karena tidak sedikit dari mereka yang memiliki kelebihan sumber daya ekonomi memilih menyalurkan secara

¹⁰*Ibid.*, hlm. 10. Lihat juga: Heri Sudarsono, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah Deskripsi dan Ilustrasi* (Yogyakarta: BFE UII, 2015), hlm. 8.

¹¹Othmar M. Lehner, *Routledge Handbook of Sosial and Sustainable Finance*, (New York: Routledge, 2016), hlm. 5.

langsung sumber keuangannya untuk tujuan sosial tanpa melalui lembaga keuangan dengan berbagai alasan.

Tujuan sosial yang berkelanjutan di sini dapat berupa konservasi lingkungan hidup, kesehatan, pangan, pendidikan, ekonomi, sosial, keagamaan, dan lain-lain yang pada intinya adalah pengembangan kehidupan manusia dan lingkungan secara luas. Oleh karena itu, keuangan sosial Islam bisa dari perbankan Islam dalam rupa dana CSR (*Corporate Sosial Responsibility*), pinjaman kebajikan (*qard al hasan*), pembiayaan untuk konservasi lingkungan, pembiayaan untuk pengembangan pendidikan, dan sebagainya. Keuangan sosial Islam juga mungkin dari lembaga nonperbankan semisal pengembangan ekonomi mikro oleh BMT dan Koperasi Syariah, sumber daya keuangan dari BAZNAS, donasi sukarela individual, Wakaf Tunai, Wakaf Saham, dan sebagainya yang bertujuan meningkatkan kehidupan sosial-berkelanjutan.

Adapun pembiayaan pendidikan (*education financing*) adalah seluruh pengeluaran baik yang berupa uang maupun bukan uang sebagai ekspresi rasa tanggung jawab semua pihak terhadap pembangunan pendidikan agar tujuan pendidikan yang diharapkan tercapai secara efisien dan efektif. Pembiayaan tersebut dapat bersumber dari pemerintah, orang tua peserta didik, maupun masyarakat. Pada konteks kajian ini, keuangan sosial Islam dimaknai sebagai pihak masyarakat yang menjadi sumber pembiayaan pendidikan.

EKONOMI DAN PENDIDIKAN

Bagian ini menjelaskan dua konsep utama yang beroperasi dalam penelitian yakni konsep keuangan sosial Islam dan pembiayaan pendidikan. Bahasan mengenai keuangan sosial Islam akan mencakup pengertian, sejarah, dasar teologis, dan bentuk-bentuk. Adapun bahasan tentang pembiayaan pendidikan akan meliputi pengertian, sumber-sumber, dan manajemen.

A. Pengertian Keuangan Sosial Islam

Islam memiliki dua wajah yakni wajah doktrin dan wajah peradaban. Wajah doktrin memuat berbagai petunjuk Allah bagi manusia untuk mencapai kebahagiaan di dunia maupun akhirat. Secara garis besar, dimensi doktrin terbagi menjadi dua bagian, yaitu: bagian ibadah dan bagian muamalah. Bagian ibadah mengatur hubungan relasional manusia dengan Allah baik yang bersifat khusus, dalam artian ketentuan serta tata caranya telah ditetapkan secara langsung melalui wahyu (ibadah *mahdhah*) maupun yang bersifat umum dalam pengertian ketentuan serta tata caranya diserahkan kepada kreativitas manusia (ibadah *ghair mahdhah*). Bagian ini lebih terbatas cakupannya. Adapun bagian muamalah mengatur hubungan relasional manusia dengan

sesama manusia dan alam semesta. Bagian ini mencakup area yang sangat luas merentang sepanjang kehidupan manusia mulai dari sosial, politik, ekonomi, budaya, pendidikan, lingkungan, hubungan internasional, dan sebagainya.

Dalam konteks tersebut, konsep keuangan sosial Islam berada dalam area ekonomi yang termasuk kategori muamalah maliyah (ajaran sosial Islam yang berhubungan dengan masalah kekayaan). Istilah ini belum banyak dikenal dan belum begitu banyak digunakan. Istilah yang secara makna dekat dengan keuangan sosial Islam adalah ZISWAF. Mungkin karena istilah ZISWAF terkesan eksklusif, maka kemudian diketengahkan sebutan baru yang lebih universal dan inklusif yaitu Keuangan Sosial Islam yang dalam bahasa Inggris diterjemahkan menjadi *Islamic Sosial Finance* (ISF). Oleh karena berkaitan dengan Islam, maka untuk menjelaskan pengertian keuangan sosial Islam terlebih dahulu akan disajikan pandangan Islam mengenai soal keuangan.

Soal keuangan adalah bagian dari pembahasan mengenai soal ekonomi secara luas. Islam dan ekonomi di mana keuangan menjadi bagiannya memiliki konformitas yang kuat. Islam tidak sebatas mengatur masalah ibadah sebagaimana telah dikemukakan sebelumnya. Islam juga mengatur masalah sosial dalam pengertian luas, termasuk bidang ekonomi. Islam begitu bersikap positif dan afirmatif terhadap kegiatan perekonomian. Bahkan beberapa ayat yang berhubungan dengan ibadah dikaitkan langsung dengan kegiatan perekonomian semisal QS Al-Baqarah [2]: 198 mengenai haji dan QS Al-Jumu'ah [62]: 10 tentang salat Jumat. Inilah yang kemudian menjadi argumen etis dan teologis bagi pengembangan ekonomi Islam sekarang.

Sifat komperhensif Islam dan afirmasinya terhadap aktivitas ekonomi ini kemudian melahirkan keyakinan pada Muslim bahwa Islam mempunyai solusi untuk mengatasi problematika ekonomi yang melilit banyak kawasan dan masyarakat dunia. Bahkan kepercayaan itu semakin kuat ketika menengok kejayaan ekonomi masyarakat Muslim di masa yang disebut '*the golden age of Islam*'. Mayoritas kawasan Muslim periode itu menikmati tingkat kemakmuran yang tinggi dan mereka menjadi pemain utama percaturan ekonomi dunia.¹ Modal ideologis,

¹Kalangan Muslim mempercayai bahwa era tersebut berlangsung sejak masa awal Islam hingga kejatuhan kawasan dunia Islam ke tangan penjajahan Eropa pada

etis, dan historis ini lalu menjadi dasar revitalisasi ekonomi Islam yang dimulai dari tahapan wacana hingga kini menjelma sebagai kekuatan baru ekonomi dunia. Dalam hal ini, sektor keuangan Islam dapat dikatakan sebagai pionir eksperimen dan implementasi empiris wacana dan gagasan ekonomi Islam.

Istilah keuangan sosial Islam berhubungan dengan istilah keuangan Islam. Beberapa definisi keuangan Islam dikemukakan oleh Muhammad yang mengutip pendapat para ahli keuangan Islam antara lain pendapat Deringer yang mengartikan keuangan Islam sebagai mekanisme keuangan yang dilakukan berdasarkan hukum dan prinsip-prinsip Islam. Sedangkan DeLorenzo menjelaskan keuangan Islam sebagai penyediaan jasa keuangan yang didasarkan pada ketentuan-ketentuan prinsip dan aturan hukum dagang Islam (fikih muamalah). Sementara Vogel & Hayes memaknai keuangan Islam sebagai mekanisme keuangan yang didasarkan pada Al-Qur'an dan ajaran Nabi Muhammad saw serta interpretasi para pengikutnya terhadap Al-Qur'an dan Hadis.²

Berbagai definisi tersebut sejalan dengan pandangan Ibrahim Warde yang mengemukakan tidak adanya definisi mengenai keuangan Islam yang memuaskan. Selalu terdapat inkonsistensi pada kriteria utama tentang keuangan Islam sehingga definisinya beragam sekali. Kriteria utama yang biasanya muncul antara lain menyangkut kepemilikan, sasaran pelayanan, pola pengawasan, afiliasi, dan sebagainya. Jika dikaitkan dengan kepemilikan, maka keuangan Islam diartikan sebagai institusi keuangan yang dimiliki umat Islam. Apabila dihubungkan dengan sasaran pelayanan, maka keuangan Islam adalah institusi yang melayani

sekitar awal abad ke-17 M yang disebut sebagai permulaan masa modern awal. Pada periode ini kaum Muslim dikatakan sebagai pemain utama yang mendominasi arus lalu-lintas perdagangan dunia. Namun pendapat berbeda disampaikan oleh Gene W. Heck yang mengatakan bahwa pemakaian istilah '*Muslim Trade*' sebagai sesuatu yang sedikit berlebihan karena pelaku niaga pada saat itu bukan hanya kalangan Muslim tapi juga melibatkan kalangan non-Muslim seperti Yahudi, Nasrani Koptik, Persia, Hindu, dan Eropa. Menurutnya, sebutan itu hanya karena kegiatan niaga dilakukan di bawah perlindungan penguasa Muslim. Lihat: KN. Chaudhuri, *Asia Before Europe: Economy and Civilization of the Indian Ocean from the Rise of Islam to 1750*. (Cambridge: Cambridge Univ. Press, 1990); James D. Tracy (Ed), *The Rise of Merchant Empires: Long-Distance Trade in the Early Modern World 1350-1750*. (Cambridge: Cambridge Univ. Press, 1993); Gene W. Heck, *Charlemagne, Muhammad and the Arab Roots of Capitalism* (Berlin: De Gruyter, 2006), hlm. 5.

²Muhamad, *Dasar-Dasar Keuangan Syariah*, (Yogyakarta: Ekonisia, 2014), hlm. 1.

nasabah Muslim. Jika dikaitkan dengan pola pengawasan, maka keuangan Islam dimaknai sebagai institusi yang diawasi oleh Dewan Pengawas Syariah. Apabila ditautkan dengan afiliasi, maka keuangan Islam dipahami sebagai institusi yang dinaungi oleh Asosiasi Pebankan Syariah. Demikian seterusnya kriteria pokok tersebut dapat semakin meluas.³

Namun, secara umum ia sepakat dengan berbagai pengertian yang telah dikemukakan bahwa keuangan Islam ialah institusi keuangan yang tujuan dan aktivitasnya berdasarkan pada ajaran-ajaran Al-Qur'an. Singkatnya, perbedaan paling distingtif antara keuangan Islam dan keuangan konvensional adalah pada panduan norma-norma agama. Keuangan Islam mengintegrasikan ajaran Islam mengenai keuangan terkait prinsip, prosedur, asumsi, instrumentasi, dan aplikasinya.

Dari segi karakteristik, Warde mengidentifikasi empat watak utama keuangan Islam yakni: sosialistik, etik, *sustainable*, dan *long-term values oriented*.⁴ Watak pertama berhubungan dengan misi utama dari keuangan Islam yang bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat baik materi maupun nonmateri dan mengurangi kesenjangan sosial-ekonomi antarwarga. Jadi, keuangan Islam mengemban misi sosial sekaligus juga membawa misi ekonomi (baca: profit). Bahkan, misi sosial harus lebih didahulukan daripada misi ekonomi. Watak kedua merupakan ruh dari keseluruhan pelaku dan kegiatan keuangan Islam yang harus berlandaskan nilai-nilai moralitas universal, terutama yang lahir dari rahim agama. Intervensi moralitas inilah yang memandu perjalanan keuangan Islam sehingga terbebas dari *moral hazard* dalam ekonomi akibat kehampaan panduan etis. Watak ketiga berkaitan dengan kewajiban keuangan Islam yang harus menjaga keberlangsungan kehidupan baik lingkungan manusia maupun lingkungan alam semesta. Keberlangsungan kehidupan manusia dan kehidupan alam secara harmonis dan berima yang memungkinkan pencapaian kondisi kehidupan yang lebih manusiawi dan keadaan lingkungan yang nyaman bagi segenap ciptaan Tuhan. Adapun watak keempat merupakan cita-cita yang diperjuangkan keuangan Islam yakni mewujudkan nilai-nilai luhur jangka panjang seperti kemaslahatan hidup bersama, keadilan sosial, ketersediaan kebutuhan pokok, keharmonisan sosial, keseimbangan,

³Ibrahim Warde, *Islamic Finance Keuangan Islam dalam Perekonomian Global* (terj), (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009), hlm. 9.

⁴*Ibid.*, hlm. 8.

nir-kekerasan, nir-eksploitasi, persaudaraan, dan pengembangan moral serta material.

Secara umum, institusi keuangan Islam terbagi menjadi dua yakni: institusi keuangan perbankan dan institusi keuangan nonperbankan. Adapun institusi keuangan nonperbankan yang beroperasi secara syariah antara lain adalah BMT, Koperasi Syariah, Asuransi Syariah, Reksadana Syariah, Pasar Modal Syariah, Pegadaian Syariah, Penjaminan Syariah, dan Lembaga ZISWAF. Baik institusi keuangan perbankan maupun nonperbankan mempunyai peran yang hampir sama yaitu sebagai perantara antara para pihak yang mempunyai modal dengan para pihak yang membutuhkan modal. Perbedaan antara keduanya hanya terletak pada prinsip dan mekanisme operasional.⁵ Penjelasan di atas telah memberikan sedikit gambaran mengenai keuangan Islam secara umum.

Lalu apa yang dimaksud dengan keuangan sosial Islam? Definisi yang diikuti dalam penelitian ini adalah apa yang dikemukakan oleh Lehner yang mendefinisikan keuangan sosial Islam sebagai *institusi keuangan maupun individu yang berperan mentransfer sumber daya keuangan untuk tujuan sosial yang berkelanjutan*.⁶ Definisi Lehner tidak menyebut individu. Saya menambahkan individu karena tidak sedikit dari mereka yang memiliki kelebihan sumber daya keuangan adalah para individu (donatur, filantropis, dan pegiat sosial) yang juga menyalurkan sumber keuangannya untuk tujuan sosial baik melalui maupun tanpa lembaga keuangan dengan berbagai alasan.

Tujuan sosial yang berkelanjutan di sini dapat berupa konservasi lingkungan hidup, kesehatan, pangan, pendidikan, ekonomi, sosial, keagamaan, dan lain-lain yang pada intinya adalah pengembangan kehidupan manusia dan lingkungan secara luas. Oleh karena itu, keuangan sosial Islam bisa dari perbankan Islam dalam rupa dana CSR (*Corporate Sosial Responsibility*), pinjaman kebajikan (*qard al hasan*), pembiayaan untuk konservasi lingkungan, pembiayaan untuk pengembangan pendidikan, dan sebagainya.⁷

⁵*Ibid.*, hlm. 10. Lihat juga: Heri Sudarsono, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah Deskripsi dan Ilustrasi*, (Yogyakarta: BFE UII, 2015), hlm. 8.

⁶Othmar M. Lehner, *Routledge Handbook of Sosial and Sustainable Finance*, (New York: Routledge, 2016), hlm. 5. Lihat juga: Solikin M. Juhro, dkk., *Keuangan Publik dan Sosial Islam Teori dan Praktik*, (Depok: Rajawali Press, 2018).

⁷Ferry Syarifuddin, *Keuangan Sosial Produktif Islam*, (Depok: Rajawali Press, 2022)

Kuangan sosial Islam juga mungkin dari lembaga nonperbankan semisal pengembangan ekonomi mikro oleh BMT dan Koperasi Syariah, sumber daya keuangan dari BAZNAS, Donasi sukarela individual, Wakaf Tunai, Wakaf Saham, dan sebagainya yang bertujuan meningkatkan kehidupan sosial-berkelanjutan.

B. Karakteristik Keuangan Sosial Islam

Kuangan Sosial Islam adalah perluasan istilah keuangan Islam yang dalam prinsip dan operasionalnya berbasis ajaran Islam. Dengan demikian, maknanya selaras dengan makna keuangan Islam. Hal yang paling membedakan adalah lingkungannya yang tidak sebatas kelembagaan keuangan, namun juga mencakup individu. Hal lain yang membedakan adalah titik tekan keuangan sosial Islam pada tujuan eksistensialnya yang melampaui tujuan ekonomis-komersial; suatu kegiatan keuangan yang berkaitan dengan tujuan kehidupan yang kompleks mencakup keadilan, kesejahteraan, pemerataan, dan pembangunan kehidupan yang berkelanjutan.

Kuangan sosial Islam mengandung empat karakteristik sebagaimana disebutkan Warde⁸ ditambah dua karakteristik yang berasal dari pendapat penulis. Penjelasan enam karakteristik tersebut adalah sebagai berikut:

1. Sosialistik

Maksud karakter sosialistik adalah bahwa keuangan sosial Islam lebih bertujuan mengembangkan pembangunan sosial daripada pembangunan individu. Meskipun demikian, bukan berarti pengembangan individu diabaikan. Namun, pengembangan individu jangan sampai mengalahkan pengembangan kolektif. Karena itu, tujuan kolektif harus diutamakan daripada tujuan individu.

Makna sosialistik lainnya adalah penegasan bahwa tujuan dari keuangan sosial Islam adalah mengembangkan seluruh dimensi kehidupan masyarakat; tidak sebatas dimensi kehidupan ekonomi. Kemajuan material manusia tidak lagi memadai sebagai dasar kebahagiaan hidup jika tidak disertai dengan kemajuan spiritual dan

⁸Ibrahim Warde, *Islamic Finance*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009), hlm. 8.

kemajuan sosial. Kemajuan material akan menjadi bermakna jika didukung oleh kemajuan spiritual yang ditandai oleh kebahagiaan batiniah dan ditopang oleh kemajuan sosial yang ditunjukkan oleh kemampuan berkontribusi dalam kehidupan masyarakat dan berpartisipasi di tengah mereka secara utuh sesuai dengan kapasitas dan kapabilitas setiap individu.

2. Etis

Karakter etis berarti bahwa keuangan sosial Islam bertumpu pada pilar moralitas. Dengan kata lain, moralitas merupakan bagian inheren dari keseluruhan bangun keuangan sosial Islam baik segi idealitas maupun segi empiritas. Moralitas tidak hanya menjadi landasan nilai yang mendasari keuangan sosial Islam. Lebih dari itu, moralitas telah menjadi landasan, panduan operasional, sekaligus tujuan dari eksistensi keuangan sosial Islam. Moralitas menjadi semacam jangkar yang menjadi tonggak utama keuangan sosial Islam yang memandu kinerja, dinamika, dan orientasinya. Tanpa moralitas, maka keuangan sosial Islam akan runtuh bahkan dapat terjerembab menjadi predator ekonomi yang mematikan.

3. Orientasi nilai jangka panjang

Dalam hal ini nilai dipahami sebagai suatu kualitas dan keadaan yang diharapkan muncul dari suatu kegiatan. Misalnya kekhusyukan yang diharapkan muncul dari pelaksanaan ibadah salat. Kepedulian sosial yang diharapkan muncul dari pelaksanaan ibadah zakat. Inilah makna nilai yang dimaksud. Adapun yang dimaksud dengan jangka panjang di sini adalah berkaitan dengan fungsi nilai tersebut yang diharapkan mendukung kesejahteraan manusia baik di dunia maupun di akhirat; mengembangkan kemajuan manusia secara material maupun sosial-spiritual.

Kuangan sosial Islam bertujuan mengembangkan nilai-nilai universal jangka panjang sebagaimana tujuan dari kehadiran Islam itu sendiri. Sebagaimana diketahui, sejak awal Islam secara konsisten dan kontinu mengampanyekan nilai-nilai universal jangka panjang mendasari kebahagiaan hidup manusia di dunia maupun akhirat. Nilai utama yang diperjuangkan antara lain adalah keadilan, pemerataan, kesetaraan, perdamaian, kelestarian alam, kesejahteraan kolektif, dan penghormatan terhadap manusia.

Kuangan sosial Islam mengusung semua nilai tersebut untuk tidak sekadar berada pada tataran idealitas, tetapi mencoba merealisasikannya pada tataran realitas.

Misalnya zakat, tidak sebatas bagian dari ibadah finansial, namun lebih dari itu merupakan instrumen pemerataan ekonomi sekaligus instrumen reduksi kemiskinan. Sasaran yang hendak dicapai dari ibadah tersebut menitik tajam tertuju kepada nilai persamaan hak atas akses ekonomi dan pemenuhan kesejahteraan manusia. Jadi, orientasi keuangan sosial Islam berupaya mewujudkan nilai-nilai jangka panjang penopang masyarakat yang secara permanen menjadi pilar tegaknya kehidupan yang adil, makmur, dan sejahtera baik secara material, sosial, maupun spiritual bagi individu, masyarakat, kelompok, dan golongan.

4. Berkelanjutan

Karakter berkelanjutan berhubungan dengan jangkauan tujuan yang hendak dicapai oleh keuangan sosial Islam. Lingkup tujuan keuangan sosial Islam tidak terbatas pada kehidupan saat ini di dunia. Lebih dari itu, ia menjangkau kehidupan abadi di akhirat. Apabila keuangan sosial Islam bergerak di bidang ekonomi, maka tujuannya tidak berhenti setelah tercapainya kesejahteraan material. Setelah kemakmuran material tercapai, maka ia bergerak meraih tujuan yang lebih tinggi yakni kesejahteraan sosial dalam bentuk aktivisme di tengah kehidupan masyarakat berhadapan dengan problematika mereka. Pada titik kulminasinya, ia melesat kembali untuk meraih kemakmuran spiritual dalam bentuk pengabdian kepada Tuhan sekaligus kemanusiaan.

Jika keuangan sosial Islam bekerja pada upaya pelestarian lingkungan, maka sasaran tidak sebatas konservasi alam. Lebih jauh lagi, ia hendak menjaga keseimbangan kehidupan agar tidak terjadi kerusakan dan bencana sekaligus deposit sumber daya alam bagi generasi mendatang serta sebagai bentuk kesyukuran atas anugra Tuhan dalam bentuk alam yang menghidupi semua makhluk-Nya. Kehidupan manusia dipandang sebagai korporasi kolektif yang diberikan Tuhan kepada siapa pun, dimanfaatkan oleh siapa pun, didayagunakan oleh siapa pun, dan dijaga oleh siapa pun yang menghuninya.

Orientasi keberlanjutan demikian identik dengan tujuan eksistensial manusia sendiri yang hendak meraih “falah” yang dimaknai sebagai kesejahteraan material dan kesejahteraan spiritual; kemakmuran ragawi dan kemakmuran rohani; kesuksesan dunia dan kesuksesan akhirat. Tidak dibenarkan adanya penindasan atas manusia serta alam, eksploitasi manusia dan alam, dan destruksi manusia dan alam dengan dalih apa pun termasuk dalih ekonomi. Demikian inti dari karakter berkelanjutan dari keuangan sosial Islam.

5. Altruistik

Istilah altruistik mengacu kepada sikap penyampingan kepentingan diri demi mendahulukan kepentingan orang lain atau kepentingan bersama. Karakter ini berhubungan dengan motif para aktor keuangan sosial Islam untuk mengesampingkan kepentingan pribadi dan mengalihkannya kepada kepentingan orang lain maupun kolektif. Pada kasus zakat, misalnya, memang merupakan kewajiban setiap Muslim untuk membayarnya. Namun, hal tersebut sulit terlaksana tanpa kerelaan muzaki untuk memberikan sebagian kekayaannya yang bisa saja ia manfaatkan sendiri untuk memenuhi kebutuhan orang lain (mustahik). Sebuah survei yang dilakukan oleh *Islamic Research and Training Institute (IRTI) Islamic Development Bank (IDB)* tentang dimensi perilaku filantropi Islam pada kasus zakat menegaskan bahwa motif kesukarelaan karena menacari rida Allah untuk membantu orang lain menjadi pendorong utama para muzaki membayar zakat. Hal demikian berbeda sama sekali dengan motif mereka membayar pajak yang dominan disebabkan oleh kewajiban yang dibebankan oleh otoritas negara.⁹ Karena itu, watak altruisme melandasi motivasi para pelaku keuangan sosial Islam.

6. Humanistik

Karakter humanistik artinya keuangan sosial Islam berfokus pada manusia dan kemanusiaan. Dua faktor tersebut merupakan isu sentral dari keseluruhan dinamika keuangan sosial Islam. Visi, misi, dan tujuan keuangan sosial Islam berkaitan dengan manusia.

⁹Mohammed Obaidullah dan Turkhan Ali Abdul Manap, *Behavioral Dimensions of Islamic Philanthropy: The Case of Zakat*, IRTI Working Paper Series, No. WP/2017/02 Jeddah: Islamic Research and Training Institute.

Visinya adalah melayani kepentingan hidup manusia. Misinya adalah memajukan berbagai bidang kehidupan manusia mencapai titik optimal sehingga ia tumbuh menjadi individu yang berdaya dan mampu berkontribusi di tengah masyarakat. Tujuannya menciptakan kualitas hidup yang mendukung perkembangan dimensi-dimensi kemanusiaan baik secara sosial, ekonomi, politik, budaya, agama, lingkungan, dan sebagainya sehingga setiap individu, masyarakat, kelompok, dan golongan hidup dalam keselarasan dan harmoni.

C. Bentuk-bentuk Keuangan Sosial Islam

Titik tekan dari keuangan sosial Islam adalah pada proses penggalangan, pengelolaan, dan tujuannya yang berdimensi sosial. Pada proses penggalangan sumber keuangan, ia melibatkan keikutsertaan segenap lapisan masyarakat secara inklusif tanpa memandang perbedaan identitas manusia. Dasar utama keterlibatan semua pihak hanya rasa solidaritas kemanusiaan. Pada tahap pengelolaan sumber keuangan, ia juga sepenuhnya melibatkan keikutsertaan publik yang berperan sebagai pengawas agar sumber yang ada dikelola secara profesional, akuntabel, dan tepat guna serta sasaran. Pada segi tujuan, ia menasar tujuan-tujuan sosial yang bersifat jangka panjang dalam artian menimbulkan perubahan permanen dalam kehidupan individu maupun masyarakat.

Sebagai contoh adalah pengembangan pendidikan yang bertujuan menyiapkan sumber daya manusia yang mampu hidup sekaligus berperan di masa depan sesuai dengan kapasitas dirinya. Contoh lainnya, konservasi lingkungan hidup yang bertujuan menjaga kelestarian alam untuk menjaga kelestarian bumi dan pencadangan sumber daya alam bagi generasi yang akan datang. Pendanaan untuk kegiatan semacam itu dapat menggunakan sumber daya dari keuangan sosial Islam.

Adapun bentuk-bentuk keuangan sosial Islam yang dapat diidentifikasi adalah sebagai berikut:

1. Zakat

Definisi zakat telah sering dikemukakan oleh para ahli. Karena itu, di sini hanya disajikan satu pengertian umum saja yang dipetik dari Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat yang mendefinisikan zakat sebagai harta yang wajib dikeluarkan

oleh seseorang atau badan usaha untuk diberikan kepada yang berhak sesuai dengan syariat Islam.¹⁰

Definisi tersebut menunjukkan bahwa zakat adalah ibadah finansial yang jelas-jelas bertujuan sosial karena harus diberikan kepada yang berhak yang disebut mustahik. Di luar tujuan keagamaan yang telah pasti, zakat memiliki tujuan sosial-ekonomi yakni mewujudkan kesejahteraan masyarakat, dan penanggulangan kemiskinan.¹¹ Kesejahteraan adalah kondisi terpenuhinya kebutuhan material, spiritual, dan sosial manusia agar dapat hidup layak dan mampu mengembangkan diri sehingga mampu melaksanakan fungsi sosialnya. Kondisi tersebut hanya mungkin dicapai jika manusia terbebas dari belenggu kemiskinan. Maka, zakat menjadi salah satu instrumen penting untuk mengatasi kemiskinan.

Kemiskinan saat ini tidak lagi didefinisikan sebagai ketiadaan sandang, pangan, dan papan. Kemiskinan yang hendak dihadapi oleh zakat sekarang begitu kompleks dan bersifat multidimensional,¹² sehingga tidak dapat ditangani secara konvensional. Dibutuhkan pendekatan baru guna menanggulangi problem kemiskinan yang lebih bertumpu pada pemberdayaan dan penguatan kapasitas kelompok miskin.

Zakat merupakan salah satu bentuk keuangan sosial Islam yang potensial mengangkat kesejahteraan masyarakat dan menanggulangi kemiskinan. Beberapa lembaga filantropi Islam di Indonesia telah membuktikan secara empirik peran zakat dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat miskin sekaligus mengangkat mereka dari

¹⁰Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat. Lihat: www.kemenkumham.go.id.

¹¹Muhamad menegaskan bahwa zakat merupakan konsep jaminan sosial yang tidak sederhana. Jaminan sosial menjadi tuntutan kepada setiap Muslim yang mampu demi menjamin tegaknya sistem Islam. Yakni Islam yang tidak membiarkan ketimpangan dan kemiskinan tanpa penyelesaian. Lihat: Muhamad, *Dasar-Dasar Keuangan Syariah*, (Yogyakarta: Ekonosia, 2014), hlm. 233.

¹²Hilman Latif, mengutip rumusan The University of Oxford dan UNDP, mengidentifikasi konsep kemiskinan dalam rumusan Multidimensional Poverty Index (MPI) yang mencakup: kesehatan buruk, pendidikan yang rendah, standar hidup tidak layak, marginalitas dan ketidakberdayaan, pekerjaan yang tidak berkualitas, dan adanya ancaman kekerasan. Lihat: Hilman Latif, "Filantropi Islam dan Kemiskinan", Artikel Opini, *Republika*, 3 Agustus 2016.

jeratan kemiskinan melalui berbagai program pemberdayaan.¹³ Hal tersebut membuktikan bahwa pengelolaan zakat yang profesional memampukannya menjadi kekuatan pemberdayaan sosial.

2. Infak dan Sedekah

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat mendefinisikan infak sebagai harta yang dikeluarkan oleh seseorang atau badan usaha di luar zakat untuk kemaslahatan umum. Adapun sedekah dalam regulasi tersebut diartikan sebagai harta atau nonharta yang dikeluarkan oleh seseorang atau badan usaha di luar zakat untuk kemaslahatan umum.¹⁴ Terdapat perbedaan antara keduanya dengan zakat. Infak dan sedekah bukan merupakan pembayaran yang bersifat kewajiban. Sebaliknya, zakat adalah pembayaran yang berbentuk kewajiban. Selanjutnya, zakat bersama infak berbentuk harta. Sedangkan sedekah dapat berbentuk harta maupun nonharta sehingga mencakup tenaga, pikiran, pengetahuan, dan sebagainya.

Sebagaimana zakat, infak dan sedekah adalah bentuk keuangan sosial Islam karena keduanya bersumber dari individu maupun badan usaha yang mentransfer sumber daya finansial kepada pihak lain untuk kepentingan sosial berkelanjutan. Ungkapan “kemaslahatan umum” pada peruntukan keduanya menandakan kemungkinan pemanfaatan keduanya untuk program-program pemberdayaan sosial dan kemanusiaan seperti penanggulangan kemiskinan, pendidikan masyarakat miskin, bantuan bencana, modal usaha, kesehatan, konservasi lingkungan, dan sebagainya.

3. Wakaf

Bentuk keuangan sosial Islam lainnya adalah wakaf. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Wakaf mendefinisikannya sebagai perbuatan hukum wakif (pemberi wakaf) untuk memisahkan dan atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya

¹³Dalam istilah Erie Sudewo, program berkekuatan pemberdayaan sosial disebut sebagai “program *masterpiece*” dengan ciri sebagai berikut: *pertama*, transformasi paradigma lama, jangkauan maslahatnya melampaui kebiasaan, lokomotif gerakan masyarakat, dan kemandirian. Lihat: Erie Sudewo, *DD Way 3x3=9 Prinsip*, (Jakarta: Republika, 2017), hlm. 286.

¹⁴Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat. Lihat: www.kemenkumham.go.id.

untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah dan atau kesejahteraan umum menurut syariah. Pada Pasal 5 fungsi wakaf ditegaskan untuk mewujudkan potensi ekonomi dan manfaat ekonomis harta benda wakaf untuk kepentingan ibadah dan untuk memajukan kesejahteraan umum.¹⁵

Pemanfaatan wakaf untuk membiayai kepentingan ibadah telah berlangsung lama. Namun, pemanfaatan wakaf untuk keperluan memajukan kesejahteraan umum baru berlangsung sekitar abad ke-10 M pada era Dinasti Mamluk. Pada empat abad pertama Islam, kepentingan publik mendapatkan biaya penuh dari Kantor Perbendaharaan Negara (*Bait Al Mal*). Pada waktu itu pemasukan negara dari berbagai sumber masih mencukupi untuk anggaran fasilitas publik. Namun, ketika sumber pemasukan negara mulai berkurang, maka pembiayaan kepentingan umum tidak lagi mendapatkan dukungan dana yang memadai dari kas negara. Sejak itu, pendanaan kepentingan umum diambil alih oleh individu yang berasal dari pejabat pemerintahan, pengusaha kaya, kalangan bangsawan istana, dan ulama kaya. Mereka memisahkan sebagian kekayaan yang dimilikinya untuk diserahkan kepada publik guna membiayai kepentingan mereka seperti sanitasi, air minum, gedung pendidikan, gaji pendidik, perpustakaan, kesehatan, dan kepentingan publik lainnya. Inisiator pemanfaatan wakaf untuk kemajuan kesejahteraan umum adalah Sultan Nur al Din Mahmud (1146–1174 M), seorang penguasa Dinasti Mamluk. Inisiasi tersebut menandai dimulainya dana wakaf menggantikan dana pajak untuk pendanaan kesejahteraan umum.¹⁶ Pada era sekarang, pemanfaatan wakaf telah berkembang sedemikian rupa untuk mendanai kepentingan publik yang tidak mampu dipenuhi oleh negara secara utuh.

4. Dana Sosial Perusahaan

Dana sosial perusahaan atau lebih dikenal singkatannya, CSR (*Corporate Social Responsibility*), merupakan sumber keuangan sosial

¹⁵Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Wakaf Lihat: www.kemenkumham.go.id.

¹⁶Van Berkel, "Waqf Documents on the Provisions of Water in Mamluk Egypt", dalam Bernard Weiss (Ed), *Studies in Islamic Law and Society* (Leiden: EJ. Brill, 2017), hlm. 235–236.

Islam yang berkembang belakangan ini. Dana tersebut bagian dari bentuk kepedulian perusahaan terhadap masyarakat baik yang berada di sekitar lingkungan perusahaan maupun yang berada di luar lingkungan perusahaan.

Komisi Uni Eropa mendefinisikan CSR sebagai suatu konsep di mana perusahaan mengintegrasikan kepedulian terhadap sosial dan lingkungan dalam operasional bisnis serta interaksinya dengan para pemangku kepentingan berdasarkan asas kesukarelaan.¹⁷ Dana CSR biasanya diambil dari sebagian keuntungan perusahaan yang disisihkan lalu disalurkan kepada masyarakat dalam bentuk dana tunai seperti bantuan sosial, modal usaha, dan beasiswa maupun nontunai berupa infrastruktur sosial, pendidikan, kesehatan, keagamaan, dan lainnya. Pada regulasi mengenai zakat, dana CSR terkadang disebut sebagai dana sosial kemanusiaan lain (DSKL). Dana ini yang dimanfaatkan untuk penyaluran kepada penerima di luar delapan golongan yang berhak menerima zakat (mustahik).

Sebagai contoh, setiap musim lebaran Idul Fitri, berbagai perusahaan swasta maupun BUMN (Badan Usaha Milik Negara) menggelar acara mudik gratis bagi warga ibu kota yang hendak berlebaran di kampung halaman. Beberapa perusahaan swasta dan BUMN juga menggelar acara bakti sosial dalam bentuk pembagian sembako, pengobatan gratis, gerakan kebersihan lingkungan, dan sebagainya pada hari ulang tahun mereka. Bentuk kegiatan lain dari CSR adalah pembangunan sanitasi rakyat, pembangunan gedung pendidikan, penanaman hutan bakau, penghijauan lahan tandus, pembangunan fasilitas kesehatan, beasiswa pendidikan, dan lainnya yang secara umum berkontribusi terhadap pembangunan berkelanjutan dengan memberikan manfaat sosial, ekonomi, dan ekologi bagi semua pemangku kepentingan. Hal ini menegaskan bahwa dunia bisnis harus mengembangkan kepedulian sosial pada kesejahteraan masyarakat dan tidak semata-mata mengejar keuntungan bisnis.

¹⁷David Crowther dan Guler Aras, *Corporate Sosial Responsibility* (USA: Ventus Publishing, 2008), 11.

5. Pinjaman Kebajikan

Pinjaman kebajikan berbeda dengan pinjaman komersial. Pinjaman kebajikan merupakan pinjaman yang semata-mata diberikan kepada pihak yang membutuhkan sebagai bantuan sosial tanpa mengharapkan imbalan maupun keuntungan. Pengembalian pinjaman dari pihak penerima sama dengan jumlah pinjaman yang diperoleh. Sementara pinjaman komersial, baik konsumtif maupun produktif, adalah pinjaman yang bertujuan mendapatkan imbalan maupun keuntungan.

Dalam terminologi fikih, pinjaman kebajikan dikenal dengan istilah *Qard* atau *Qard al Hasan*. Hamad mendefinisikan *Qard* sebagai pemberian harta kepada orang yang membutuhkan untuk dimanfaatkan dengan ketentuan dikembalikan sesuai jumlah yang diterima.¹⁸ Dengan demikian, *qard* menghapus adanya imbalan maupun keuntungan yang akan didapatkan pemberi pinjaman sebagaimana terjadi pada pinjaman komersial.

Klasifikasi *qard* sebagai keuangan sosial Islam didasarkan pada penghapusan ketentuan imbalan maupun keuntungan terhadap pinjaman yang diterima. *Qard* berasaskan kesediaan dan kesukarelaan untuk membantu pihak lain yang memerlukan agar mereka dapat mengatasi kesulitan maupun masalah yang dihadapi. Sesuai dengan definisi keuangan sosial yang menekankan dimensi orientasi sosial, maka *qard* menjadi salah satu bentuknya.

D. Pengertian Pembiayaan Pendidikan

Pembiayaan pendidikan berkaitan dengan proses pendidikan dan kinerja pendidikan. Berikut akan diuraikan penjelasan mengenai konsep tersebut.

Supriadi memaknai biaya pendidikan dengan semua bentuk pengeluaran yang berhubungan dengan proses pendidikan baik berupa uang maupun barang dan tenaga yang dapat dihargakan dengan uang.¹⁹ Lebih lanjut, ia membagi biaya pendidikan menjadi beberapa

¹⁸Nazih Hamad, *Mu'jam Al Mustalahat Al Iqtisadiyah fi Lugah Al Fuqaha*, (Riyadh: International Publishing House, 1995), hlm. 276.

¹⁹Dedi Supriadi, *Satuan Biaya Pendidikan Dasar dan Menengah*, (Bandung: Rosdakarya, Cet-V, 2010), hlm. 3-4.

kategori antara lain: *Pertama*, biaya langsung (*direct cost*) dan biaya tidak langsung (*indirect cost*). Biaya langsung merupakan pengeluaran yang secara langsung menunjang proses pendidikan. Biaya tidak langsung adalah pengeluaran yang tidak secara langsung menunjang proses pendidikan namun memungkinkan proses tersebut terjadi. *Kedua*, biaya pribadi (*private cost*) dan biaya sosial (*sosial cost*). Biaya pribadi adalah pengeluaran keluarga untuk membiayai pendidikan. Biaya sosial adalah pengeluaran yang diberikan oleh masyarakat untuk pendidikan baik melalui sekolah maupun pajak yang dihimpun oleh pemerintah untuk anggaran pendidikan. *Ketiga*, biaya berbentuk uang (*monetary cost*) dan biaya nonuang (*non-monetary cost*). Biaya berbentuk uang merupakan biaya berupa dana. Sedangkan biaya nonuang adalah biaya berbentuk barang maupun tenaga yang dapat diukur dengan uang.

Selain itu, terdapat istilah lain yaitu anggaran belanja pendidikan (*educational budget*) yang komposisinya mencakup komponen pendapatan dan komponen belanja. Sedangkan berdasarkan sifatnya, ada biaya rutin (*recurrent budget*) dan biaya investasi (*development budget*).²⁰ Menurut Supriadi, perbincangan mengenai pembiayaan pendidikan, merentang dari bahasan tentang sumber pembiayaan, sistem, dan mekanisme pengalokasian, efektivitas dan efisiensi penggunaan, akuntabilitas hasil, dan dampaknya.²¹ Berbagai penjelasan tersebut menunjukkan bahwa Supriadi mengidentikkan biaya pendidikan dengan pembiayaan pendidikan.

Sementara itu, Matin menghubungkan pembiayaan pendidikan dengan konsep sumber daya pendidikan yang dikutip dari Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Definisi regulasi tersebut menyebutkan bahwa sumber daya pendidikan adalah penunjang pelaksanaan pendidikan yang berupa tenaga, dana, sarana dan prasarana yang diadakan dan didayagunakan oleh keluarga, masyarakat, peserta didik, dan pemerintah secara mandiri maupun kolektif. Biaya pendidikan merupakan salah satu penunjang pelaksanaan pendidikan yang disiapkan oleh keluarga, masyarakat, dan pemerintah.²² Berbeda dengan Supriadi, Matin mendefinisikan pembiayaan pendidikan

²⁰Dedi Supriadi, *Satuan Biaya Pendidikan*, 3-4.

²¹*Ibid.*, hlm. 7.

²²Matin, *Manajemen Pembiayaan Pendidikan: Konsep dan Aplikasinya*, (Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2014), hlm. 4.

sebagai proses pengalokasian sumber-sumber daya pendidikan pada program-program maupun proses pembelajaran di kelas. Rentang kegiatannya mencakup perencanaan anggaran, penganggaran, pelaksanaan anggaran, akuntansi dan pertanggungjawaban anggaran, dan pemeriksaan serta pengawasan anggaran.²³ Selanjutnya Martin menguraikan pembiayaan pendidikan digunakan untuk mendukung kegiatan yang diklasifikasikan menjadi beberapa kegiatan garis besar yang terdiri dari tiga kluster, yakni: kegiatan pendidikan di sekolah, kegiatan pendidikan di luar sekolah, dan kegiatan penunjang pendidikan di luar sekolah. Setelah itu, ketiga kluster tersebut dijabarkan secara rinci dalam kegiatan yang lebih operasional.²⁴

E. Sumber-sumber Pembiayaan Pendidikan

Pembiayaan pendidikan termasuk kategori belanja kepentingan publik. Karena itu, pada mulanya pembiayaan pendidikan sepenuhnya ditanggung oleh pemerintah terutama untuk lembaga pendidikan negeri. Sedangkan pembiayaan lembaga pendidikan swasta menjadi tanggung jawab masyarakat maupun individu yang menyelenggarakan pendidikan tersebut. Bantuan biaya dari pemerintah kepada lembaga pendidikan swasta lebih bersifat pendampingan atau bantuan sosial.

Namun, kekuatan pemerintah untuk membiayai pendidikan semakin terbatas bahkan menurun. Terlebih lagi ketika pemerintah mengalami tekanan ekonomi yang mengakibatkan turunya pendapatan negara. Turunnya pendapatan negara menyebabkan defisit anggaran yang antara lain untuk mendanai pendidikan. Pada akhirnya pemerintah tidak mampu lagi secara penuh membiayai lembaga pendidikan negeri, apalagi membiayai lembaga pendidikan swasta. Ketika kemampuan pemerintah menyediakan dana pendidikan menurun, maka sumber utama pembiayaan pendidikan adalah keluarga peserta didik.

Menurut Supriadi, sumber-sumber pembiayaan pendidikan pada tataran nasional berasal dari beberapa sumber domestik dan internasional. Sumber domestik disumbangkan oleh pendapatan negara dari sektor pajak, pendapatan dari sektor nonpajak, devisa ekspor barang dan jasa, dan pendapatan BUMN. Adapun sumber internasional berasal

²³*Ibid.*

²⁴*Ibid.*, hlm 27–28.

dari pinjaman lunak (*soft loan*) negara sahabat, hibah (*grant*) lembaga keuangan internasional semisal Bank Dunia, Asian Development Bank (ADB), International Monetary Fund (IMF), Islamic Development Bank (IDB) maupun pemerintah melalui kerja sama bilateral maupun multilateral.²⁵ Dana yang terakumulasi kemudian dimasukkan dalam APBN untuk didistribusikan kepada kementerian/lembaga terkait bidang pendidikan maupun pemerintah daerah melalui mekanisme Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK) pendidikan. Selanjutnya dana tersebut akan disalurkan kepada satuan-satuan kerja teknis hingga sampai kepada tingkat satuan pendidikan (sekolah/madrasah).

Ketentuan sebagaimana dijelaskan di atas berlaku bagi sekolah-sekolah negeri yang berada di bawah naungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan serta Kementerian Agama. Bagaimana dengan sekolah dan madrasah swasta milik masyarakat? Sumber pembiayaan lembaga pendidikan swasta jelas berbeda dengan lembaga pendidikan negeri. Lembaga pendidikan swasta lebih mengandalkan sumber-sumber nonpemerintah untuk mendapatkan dana terutama dari keluarga peserta didik dan masyarakat. Keluarga peserta didik memberikan kontribusi dalam bentuk uang pangkal, uang peningkatan gedung dan sarana prasarana, uang operasional pendidikan, uang ekstrakurikuler, uang penyelenggaraan ujian, dan sebagainya. Masyarakat memberikan kontribusi dalam bentuk dana, sarana prasarana pendidikan, pemikiran, rasa kepedulian, dan keterlibatan dalam pengambilan keputusan. Lembaga pendidikan swasta, khususnya pondok pesantren, juga mendapatkan bantuan donasi individu Muslim dari kalangan domestik dan internasional. Beberapa di antaranya juga memperoleh dukungan keuangan dari lembaga filantropi Islam internasional terutama untuk membangun fasilitas pergedungan yang membutuhkan biaya besar dalam bentuk zakat dan wakaf individu maupun kolektif.

²⁵Dedi Supriadi, *Satuan Biaya Pendidikan*, hlm. 6.



< BAB 3

KONTEKS EMPIRIS PRAKISIS KEUANGAN SOSIAL ISLAM

A. Sejarah Pesantren

Narasi mengenai Pondok Pesantren Al Rahmah, selanjutnya hanya ditulis Al Rahmah,¹ berkelindan dengan perjalanan kehidupan seorang anak manusia bernama Abdul Rasyid Muslim, berikutnya ditulis Rasyid, yang berkehendak untuk melakukan sesuatu yang bermanfaat bagi manusia melalui pengabdian di bidang pendidikan untuk mengompensasikan perjalanan hidupnya di masa lalu.

Narasi itu dimulai ketika Rasyid menyelesaikan pendidikan dari Pondok Modern Gontor Ponorogo Jawa Timur, selanjutnya ditulis Gontor, pada tahun 1992. Ia meneruskan studi di Gontor saat akan duduk di kelas dua SLTA sehingga terbilang santri senior semasa di Gontor jika ditilik dari segi usia. Belum lagi ia harus menempuh masa pendidikan kelas biasa selama enam tahun, sehingga ketika lulus tentu sudah tidak lagi terbilang muda (22 tahun).

¹Informasi mengenai sejarah Pondok Pesantren Al Rahmah dan sketsa kehidupan Kyai Abdul Rasyid Muslim sepenuhnya bersumber dari hasil wawancara dengan Kyai Abdul Rasyid Muslim. (Wawancara dengan Kyai Abdul Rasyid Muslim tanggal 3 Juni 2017).

Selepas dari Gontor, Rasyid muda mengabdikan di Pondok Pesantren Darul Fikri Kota Malang sebagai bagian dari kewajiban setiap alumni Gontor. Selesai pengabdian, ia mencoba mengadu peruntungan ke Jakarta untuk bekerja di sebuah perusahaan swasta. Tidak sampai setahun ia kemudian pindah ke Cilegon Banten dan kembali bekerja di suatu perusahaan swasta.

Namun, naluri dan panggilan jiwanya di dunia pendidikan sepertinya tidak pernah lekang. Ia kembali ke habitatnya pada dunia pendidikan dengan mengajar di Pondok Pesantren Al Hasyimiyah Cilegon. Dari pesantren ini kemudian ia pindah ke Pondok Pesantren Dar El Qolam Gintung Jayanti. Sambil mengabdikan di Gintung Rasyid muda meneruskan studi tingkat sarjana di IAIN Sunan Gunung Djati Cabang Serang yang diselesaikan pada tahun 1998.

Ia terus mengabdikan diri di Gintung hingga kemudian ditugaskan untuk membantu seorang alumni Gintung yang sedang merintis pesantren di daerah Serang pada sekitar pertengahan tahun 2004. Sepertinya penugasan ini merupakan skenario Allah untuk mempertemukannya dengan seorang perempuan bernama Enung Nurhayati yang saat ini menjadi pendamping hidupnya. Setelah menikah ia mengabdikan di Pondok Pesantren Dar Et Taqwa Serang dan sempat pindah lagi ke Gintung selama beberapa waktu sampai akhirnya mulai merintis pendirian Al Rahmah di Desa Lebakwangi Walantaka Serang.

Perintisan pondok ini dimulai dengan pelaksanaan kegiatan pesantren Ramadhan di masjid As Sa'adah Lebakwangi yang diikuti oleh anak-anak masyarakat sekitar. Melihat antusiasme dan respons masyarakat, ia memantapkan niat untuk mendirikan pesantren. Setelah melalui rangkaian persiapan dan konsultasi dengan para seniornya dari Gontor dan Gintung, maka pada tanggal 11 Mei 2005 ia memulai pembangunan lokal untuk asrama dan kelas belajar bersambung dengan "gedung modal" yang sebelumnya merupakan bekas tempat penggilingan padi hasil pinjaman yang berubah menjadi sewa dari paman istrinya yang disulap menjadi asrama santri putri. Pada masa perintisan ini, ia dan istri masih menetap di Pesantren Dar El Qalam hingga kemudian secara penuh menetap di Lebakwangi mulai tanggal 29 Mei 2005 untuk berkonsentrasi mengurus pesantren baru yang

telah dirintisnya.² Setelah legalistas yayasan yang menaungi pesantren didapatkan, maka pengurus kemudian memproses izin operasional pondok pesantren pada Departemen Agama (saat ini berganti nomenklatur menjadi Kementerian Agama) Kabupaten Serang (sebelum terjadi pemekaran Kota Serang) dan mendapatkan izin operasional Nomor: Kd.28.01/PP.00.7/865/2006 tertanggal 15 September 2006 dengan nama Pondok Pesantren Al Rahmah dengan Nomor Statistik Pesantren (NSP) 512322012287.³

Bermodalkan keyakinan akan pertolongan Allah dan kemantapan niat, ia memberanikan diri membuat brosur penerimaan santri baru di Al Rahmah. Dukungan dari mertua serta tersedianya modal gedung asrama dan ruang kelas bekas penggilingan padi pinjaman dari paman istrinya semakin membuncahkan cita-citanya untuk segera memulai pendidikan. Tidak terduga, santri yang mendaftar pada waktu itu sejumlah 36 orang dan yang kemudian menjadi santrinya berjumlah 19 orang terdiri dari 12 santri putra dan 7 santri putri. Adapun jumlah pendidik yang membantunya ketika itu berjumlah 10 orang yang mayoritas adalah alumni Gintung ditambah beberapa orang alumni Gontor. Maka bersamaan dengan penerimaan santri baru ini, babak baru sejarah Al Rahmah telah dimulai.

Pilihan nama Al Rahmah untuk pesantren ini mengandung makna filosofis yang mendalam sekaligus mencerminkan cita-cita pendirinya. *Pertama*, eksistensi pondok ini merupakan rahmat dari Allah kepada pendirinya. Seperti disebutkan sebelumnya, selama perenungan tentang perjalanan kehidupannya ketika mengabdikan diri di Gintung terutama saat tenggelam dalam munajat malam, Rasyid muda selalu memohon agar

²Setelah proses rintisan pesantren berjalan stabil, maka langkah berikutnya adalah membuat payung legalitas lembaga yang diawali dengan pendirian yayasan yang menaungi operasional pesantren. Yayasan tersebut dinamakan *Yayasan Rahmatan lil Alamin* yang didaftarkan di notaris Gerry, S.H. yang berkedudukan di Ciruas Kabupaten Serang pada hari Kamis, 23 Februari 2006 dengan Nomor Akta Pendirian 04. Karena ada perubahan susunan pembina, pengurus, dan pengawas, maka akta ini kemudian diubah dan didaftarkan ulang oleh notaris Achmad Jaelani, S.H., M.Hum. yang berkedudukan di Kota Serang dengan Nomor Akta 35 Tanggal 31 Agustus 2017 dan tercatat pada Direktorat Jenderal Administrasi Umum (AHU) Kemenkumham RI Nomor: AHU-0018254.AH.01.12. Tahun 2017 Tanggal 03 Oktober 2017.

³Lihat dokumen Sertifikat Izin Operasional Pondok Pesantren yang telah dipublikasikan pada laman Google Picture Pondok Pesantren Al Rahmah.

ia diberikan kesempatan untuk mengkompensasikan sisa hidupnya berbuat sesuatu yang berguna bagi manusia. Harapan ini sepertinya terkabul dengan berdirinya Al Rahmah sebagai rahmat Allah kepada dirinya. *Kedua*, eksistensi pondok ini mutlak harus menjadi rahmat bagi masyarakat luas sebagaimana halnya kehadiran Rasulullah Saw. yang juga merupakan rahmat bagi semesta alam. Dengan kata lain, Al Rahmah harus menjadi sumber pencerahan bagi masyarakat lewat pengabdian di jalur pendidikan. *Ketiga*, ekspektasi agar segenap warga pondok mulai dari unsur pimpinan, para guru, para santri, dan para alumni serta setiap yang terlibat di dalamnya turut menjadi duta-duta rahmat Allah dalam berbagai bidang kehidupan.

Secara geografis, Al Rahmah dapat dikategorikan sebagai pesantren urban karena letaknya di Kota Serang, Banten sekalipun pada kawasan pinggiran. Namun aksesibilitasnya mudah dijangkau dari berbagai arah. Berlokasi di Kampung Lebak, Desa Lebakwangi, Kecamatan Walantaka, Kota Serang, Banten. Jarak tempuh dari pusat kota hanya sekitar 15 menit baik dari arah Kecamatan Ciruas, Kabupaten Serang yang terletak pada lintasan jalan Deandles arah Serang-Balaraja Tangerang, maupun dari arah Kecamatan Cipocok Jaya dan Kecamatan Curug Kota Serang maupun dari arah Rangkasbitung melalui Kecamatan Petir Kabupaten Serang.

Meskipun merupakan fenomena pesantren urban, Al Rahmah dirintis dari dan dengan penuh keterbatasan. Perintisannya dapat dikatakan dimulai dari minus. Modal awal pendiriannya telah disebutkan di atas bermula dari gedung sewaan bekas penggilingan padi yang berhenti beroperasi. Para santri yang mondok, terlebih pada periode perintisan, mayoritas adalah anak-anak dari keluarga yatim dan duafa. Kondisi demikian bahkan sempat menjadi bahan identifikasi masyarakat bahwa Al Rahmah adalah “pesantren miskin” akibat keterbatasannya terutama apabila dilihat dari segi fasilitas fisik.

Namun, keterbatasan itu tidak pernah menyurutkan tekad untuk terus berjuang mencerdaskan masyarakat Marginal, khususnya pada bidang pendidikan. Dalam pandangan pimpinan Al Rahmah, masyarakat Marginal wajib dibela dan diperjuangkan agar dapat menempuh pendidikan sebagai modal mengubah kehidupannya menjadi lebih baik. Memang telah ada program sekolah gratis dari pemerintah. Tetapi masyarakat belum semuanya mampu mengakses program tersebut.

Bahkan pada realitasnya, program pendidikan gratis terkadang sebatas wacana belaka. Keteguhan pembelaan terhadap kaum marginal agar memperoleh pendidikan lebih baik tergambar dalam pernyataan Kyai Rasyid yang menegaskan:

“Kalau orang berada atau kaya dia dapat memilih ke mana akan sekolah karena biayanya sudah ada. Dan pasti banyak lembaga (pendidikan-pen) yang siap menampung. Tapi kalau orang miskin tidak punya biaya dia tidak dapat memilih sekolah ke mana. Karena itu, kalau ada yang datang ke sini (Al-Rahmah-pen) orang duafa atau yatim saya akan prioritaskan sekalipun pendaftaran sudah tutup, sebab ia tidak mungkin bisa memilih sekolah. Tapi kalau orang kaya yang datang mendaftar setelah penutupan, saya sarankan ke tempat lain karena ia pasti siap modalnya.”⁴

Pernyataan pimpinan ini juga seturut dengan apa yang disampaikan oleh Ustazah Enung Nurhayati yang juga istri pimpinan pesantren. Dalam pandangannya, kelompok Marginal (duafa) yang mengenyam pendidikan di pesantren merupakan sumber kekuatan dalam melaksanakan amanah mengembangkan pesantren. Mereka menjadi semacam ‘jimat pegangan’ (sumber kekuatan spiritual) yang tanggung jawab pendidikannya jangan hanya dilakukan oleh para donatur, tetapi juga harus menjadi bagian tanggung jawab pesantren bersama dengan warga pesantren lainnya. Ia menegaskan:

“Anak-anak duafa yang mondok di sini (Al-Rahmah-pen) sebagai jimat pegangan yang melahirkan kekuatan. Jika tidak ada (duafa-pen) saya seperti kehilangan sumber kekuatan. Maka, (tanggung jawab-pen) pendidikan dan kehidupan mereka jangan hanya diserahkan kepada orang muhsinin (dermawan-pen) Kuwait (di antara donatur Al-Rahmah berasal dari Kuwait-pen). Kita juga ikut menanggung mereka agar pahalanya juga ke kita. Kita juga pengen (ingin-pen) dapat pahala seperti orang Kuwait.”⁵

Kini setelah berkiprah selama satu dasawarsa, perkembangan Al Rahmah telah mengarah kepada kemajuan. Kemajuan itu terlihat dari semakin meningkatkannya animo masyarakat untuk mendidik anaknya di pesantren. Secara fisik, bangunan juga telah banyak perubahan karena semakin banyak bangunan permanen asrama, masjid, maupun ruang

⁴Wawancara dengan Kyai Abdul Rasyid Muslim (26 Mei 2017).

⁵Wawancara dengan Ustazah Enung Nurhayati, S.Ag., istri Kyai Abdul Rasyid Muslim (7 Juni 2017).

belajar. Al Rahmah juga terus menambah luas lahan yang dimilikinya sebagai persiapan perluasan area pesantren. Adapun potret lainnya akan disajikan pada paparan di bawah ini

B. Program Pendidikan dan Kurikulum

Kiblat utama penyelenggaraan pendidikan di Al Rahmah adalah Pondok Modern Gontor. Hal ini tidak terlepas dari figur pimpinan pondok yang merupakan alumni Gontor. Kiblat kedua adalah Pondok Modern Darul Qalam Gintung Tangerang karena sang kyai juga lama mengabdikan diri di pesantren alumni Gontor ini. Dua model ini kemudian dipadukan secara kreatif pada pendidikan di Al Rahmah.

Mengikuti model Pondok Modern Darul Qalam Gintung, Al Rahmah mengembangkan sekolah formal model Tsanawiyah dan model Aliyah dalam bingkai Pondok Modern Gontor dengan model KMI (Kulliyatul Mu'allimin Al Islamiyah). Masa belajar santri berlangsung selama enam tahun bagi santri lulusan SD/MI dan masa belajar selama empat tahun bagi santri lulusan SMP/MTS mengikuti model KMI Pondok Modern Gontor. Guna memudahkan proses pendidikan dan menerapkan model pendidikan khas pesantren, semua santri tanpa terkecuali diwajibkan menetap di pondok selama 24 jam. Dinamika kehidupan dalam pondok dipandang sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari keseluruhan proses pendidikan.

Adapun kurikulum yang diadopsi merupakan gabungan dari gugus kurikulum Pondok Modern Gontor untuk materi pelajaran khas kepesantrenan dan keislaman, gugus kurikulum Kementerian Agama dan gugus kurikulum Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan untuk materi pelajaran eksakta dan umum, khususnya materi yang diujikan pada Ujian Nasional (UN) dan Ujian Akhir Madrasah Berstandar Nasional (UAMBN). Dengan demikian, Al Rahmah tidak sepenuhnya mengikuti pola dan model pendidikan ala KMI Gontor yang menerapkan kurikulum independen rumusan pondok secara penuh tanpa menimbang muatan kurikulum lain. Konsekuensinya, secara eksternal administrasi pendidikan di Al Rahmah menyesuaikan dengan birokrasi pendidikan pada Kementerian Agama sebagai tempat bernaung madrasah.

Hal ini berbeda dengan KMI Gontor yang independen dan menerapkan pola Pesantren Mu'adalah yang telah disetarakan dengan

sekolah maupun madrasah tingkat menengah dan tingkat atas (SMP/MTS dan MTS/MA), sehingga tidak terikat oleh birokrasi pendidikan pihak lain. Pertimbangan sekaligus kelebihan dan kelemahan model demikian dijelaskan oleh pimpinan Al Rahmah:

“Penerapan model demikian menimbang kebutuhan masyarakat yang harus diakui tetap tertarik dengan ijazah formal pendidikan yang identik dengan sekolah atau madrasah pada umumnya; dalam artian belum biasa mengenal ijazah pondok (mu’adalah-pen) sekalipun sebenarnya sama saja. Ya ... kelemahannya itu. Kita terikat dengan birokrasi pendidikan di luar. Terasa ada yang berkurang semacam kebebasan pondok (mengatur agenda pendidikan-pen). Tapi sistem, filsafat, nilai, dan sunnah pondok Insyaa Allah saya tetap full Gontor seperti dapat dilihat. Intinya kita menganut dua warna pendidikan formal dan kepesantrenan.”⁶

Adaptasi kurikulum semacam ini hampir merata di pesantren alumni Gontor di Banten. Realitas ini tidak lepas dari keniscayaan merespons kebutuhan masyarakat akan ijazah formal dari lembaga pendidikan sekalipun bermerek pesantren. Karena itu, sejak awal perintisannya setiap pesantren akan memulainya dengan menerapkan pola pesantren yang diintegrasikan dengan pola madrasah maupun sekolah agar alumninya mendapatkan pengakuan formal dalam bentuk ijazah untuk melanjutkan ke perguruan tinggi maupun melamar pekerjaan. Saya memandang hal ini tidak mungkin dihindari karena bagaimanapun pesantren harus menyadari bahwa masyarakat masih menuntut hal tersebut. Namun harus ditegaskan, pola pendidikan pondok pesantren selalu sangat tergantung dengan kebijakan pimpinannya. Jika pimpinan menghendaki model integrasi semacam di atas, maka pasti akan demikian. Sebaliknya jika pimpinan menghendaki model pesantren murni, maka akan sulit ditolak.

C. Santri dan Dewan Guru

Penerimaan santri dimulai sejak tahun 2005 setelah pimpinan pondok mantap untuk membangun pesantren. Saat dibuka di tahun tersebut, Al-Rahmah menerima pendaftaran santri sebanyak 36 orang. Dari jumlah itu yang diterima hanya 19 orang setelah melalui tahapan seleksi dengan rincian 12 santri putra dan 7 santri putri. Enam orang di antaranya merupakan tamatan SMP/MTS dan sisanya tamatan SD/MI.

⁶Wawancara dengan Kyai Abdul Rasyid Muslim (22 Juni 2017).

Grafik perkembangan jumlah santri terus merangkak naik seiring dengan perkembangan pesantren. Perkembangan semakin signifikan setelah pesantren meningkatkan infrastrukturnya. Selepas pembangunan masjid dan asrama di tahun 2012, animo masyarakat untuk mendidik anaknya di pesantren semakin meningkat. Menurut pimpinan pesantren, rupanya masyarakat masih menimbang penampilan fisik bangunan bagian dari kehebatan suatu lembaga pendidikan. Atau paling tidak masih dipandang sebagai simbol kemajuan lembaga pendidikan.

Disamping penampilan fisik yang lebih baik, menurut pimpinan pesantren, kepercayaan masyarakat tumbuh dari upaya pesantren untuk terus-menerus melakukan *'trust building'* kepada para pihak semisal individu yang beinteraksi dengan pimpinan, dunia usaha yang peduli sosial-pendidikan, dan lembaga donasi lokal maupun transnasional. Mereka diyakinkan bahwa Al-Rahmah harus dibela, dibantu, dan diperjuangkan karena visi-misinya mulia sekaligus strategis.

Lebih dari itu semua, pencapaian fisik, nonfisik, jumlah santri, kepercayaan masyarakat, dan kemajuan lainnya, dalam keyakinan pimpinan pesantren, adalah karena mujahadah serta doa santri-santri yatim dan duafa yang terdapat di pesantren.

“Ana (saya dalam bahasa Arab-pen) yakin ji (panggilan kepada peneliti singkatan dari sebutan haji) bahwa pondok ini maju berkat pertolongan Allah Swt. Tanpa itu sepertinya mustahil, berat sekali. Ana yakin mereka (santri duafa-pen) yang membawa kemajuan. Makanya pondok ini ana namakan Al-Rahmah karena merupakan rahmat Allah Swt. bagi ana pribadi dan diharapkan juga rahmat bagi masyarakat. Ini sepertinya hanya bisa dipahami lewat matematika Allah Swt. bukan manusia.”⁷

Berdasarkan penuturan pimpinan pesantren dan dibenarkan oleh informan santri, sering pada malam-malam momentum tertentu mereka diajak bersama-sama bermunajat kepada Allah Swt. mendoakan kemajuan pesantren. Dalam kesempatan beberapa kali wawancara, pimpinan pesantren sering sekali mengutip hadis Nabi Saw. yang menegaskan keniscayaan adanya pertolongan dan kemenangan dari Allah Swt. bagi mereka yang peduli terhadap kalangan duafa (Marginal). Termasuk keyakinan mengenai turunnya rahmat langit (simbolisasi-Allah Swt.)

⁷Wawancara dengan Kyai Abdul Rasyid Muslim (22 Juni 2017).

bagi mereka yang menebarkan rahmat kepada sesama manusia di muka bumi. Sinergi kekuatan spiritual dan ikhtiar inilah yang begitu diyakini membawa lompatan kemajuan pesantren.

Berdasarkan data terakhir, jumlah santri Al-Rahmah mencapai 1281 orang dengan rincian sebagai berikut:⁸

Tahun	MTS	MA	Total
2022	858	423	1281

Para santri tersebut berasal dari berbagai daerah. Mayoritas tentu saja dari Provinsi Banten mengingat lokasi pondok yang berada di Serang. Meskipun demikian, terdapat pula para santri yang berasal dari luar Banten yang cakupan telah mencapai 15 provinsi di Indonesia. Santri asal luar daerah mayoritas dari Provinsi Lampung dan Sumatra Selatan yang secara geografis masih dekat dengan Banten. Sebaran santri lainnya berasal dari Jawa Barat, DKI Jakarta, Jawa Tengah, Jawa Timur, Jambi, Bengkulu, Bali, Maluku, Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, dan Sumatra Barat.

Sebaran asal santri dari berbagai propinsi ini tidak lepas dari kebijakan pesantren yang menerima santri dari kalangan masyarakat marginal. Santri dari kalangan marginal berasal dari kalangan yatim dan duafa yang direkrut oleh orang-orang yang menjadi simpul-simpul pesantren di berbagai daerah. Mereka yang menjadi simpul pesantren adalah kenalan pimpinan pesantren baik dari alumni Gontor, sahabat saat kerja dahulu, rekan bisnis, sahabat hasil diperkenalkan orang lain, santri, alumni Al Rahmah, maupun wali santri. Mereka yang mempromosikan pesantren melalui pola *'word of mouth'* sekaligus menjembatani perekrutan santri duafa. Pola ini efektif memperluas jangkauan promosi pesantren ke luar Banten. Setelah pada tahun 2009 meluluskan alumni perdana, para alumni juga banyak yang mengabdikan ke beberapa pesantren luar Jawa semisal Padang dan Medan. Para alumni kemudian turut berperan memperkenalkan pesantren di tempat mereka mengabdikan.

⁸Rekapitulasi Jumlah Santri Pada Bagian Akademik Pondok Pesantren Al Rahmah. Terima kasih kepada Ustaz Aat Syaafaat yang telah memberikan akses terhadap data ini dan data tenaga pengajar.

Pesantren melonggarkan persyaratan penerimaan santri dari kalangan Marginal baik yatim maupun duafa. Bagi calon santri yatim hanya disyaratkan membawa surat keterangan kematian orang tua dari kelurahan atau aparat setempat seperti RT atau RW. Mereka dibebaskan dari biaya pendaftaran dan hanya diminta membayar uang bulanan sesuai kesanggupan dan kemampuan mereka. Bagi calon santri duafa hanya disyaratkan membawa surat keterangan tidak mampu dari kelurahan atau aparat setempat semisal RT atau RW. Mereka juga dibebaskan dari biaya pendaftaran dan diminta membayar uang bulan sesuai kesanggupan dan kemampuan mereka. Bahkan sekiranya calon santri yatim maupun duafa dipandang sama sekali tidak mampu membiayai pendidikannya, maka pesantren akan menggratiskan segala bentuk pembiayaan.

Namun, kebijakan di atas sedikit mengalami perubahan pada penerimaan calon santri tahun pelajaran 2016–2017. Pesantren lebih ketat dan selektif lagi menerima calon santri dari kalangan marginal. Pemicunya karena tidak sedikit dari calon yang telah diterima keluar dari pondok akibat ketidaksiapan mental menetap di asrama selama 24 jam dan mengikuti model pembelajaran khas pesantren. Padahal, pesantren telah maksimal memfasilitasi kebutuhan mereka dan menggratiskan segala pembiayaan. Karena itu, ditambahkan persyaratan lain yakni kemauan kuat dari calon santri dan harus berdasarkan keinginan sendiri menempuh pendidikan di pesantren. Dua syarat ini digali melalui wawancara individual saat seleksi penerimaan yang sebelumnya tidak pernah dilaksanakan.⁹

Adapun jumlah staf pengajar saat ini (2023) mencapai 140 orang yang terdiri dari 65 ustaz dan 75 ustazah. Berdasarkan latar belakang pendidikan, mayoritas berpendidikan sarjana (S-1) dari berbagai perguruan tinggi seperti IAIN SMH Banten, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Untirta Serang, IKIP Bandung, Universitas Al Azhar Kairo, dan International Islamic University Islamabad Pakistan. Guru rekrutmen dari alumni semuanya sedang menempuh pendidikan tingkat sarjana di IAIN SMH Banten dan Untirta Serang.

Staf pengajar yang ada tidak seluruhnya berlatar belakang pendidikan pesantren terutama pengajar untuk mata pelajaran umum. Meskipun

⁹Wawancara dengan Ustaz Aat Syafaat, guru senior di Al Rahmah (10 November 2017).

demikian, mereka memiliki kesepahaman tentang pola pendidikan, arah pendidikan, filosofi pendidikan, dan tradisi khas pesantren. Pada tahap awal rekrutmen, mereka yang bukan berlatar belakang pesantren diberikan orientasi pemahaman oleh pimpinan mengenai dunia kepesantrenan dari berbagai seginya. Dengan demikian, akan tercipta kesamaan persepsi dan langkah dalam menyelenggarakan pendidikan dan meminimalkan gesekan maupun persinggungan lainnya. Secara periodik bulanan juga diadakan pertemuan antara pimpinan pesantren dengan dewan guru untuk membahas berbagai persoalan pesantren, di luar komunikasi informal melalui berbagai forum dan kesempatan.

D. Sarana dan Prasarana¹⁰

Sebagaimana telah dibahas sebelumnya, Al-Rahmah merintis kiprahnya di dunia pendidikan berangkat dari keterbatasan, terutama menyangkut fasilitas fisik. Modal utamanya adalah gedung pinjaman yang kemudian berubah menjadi sewaan bekas tempat penggilingan padi yang berhenti beroperasi. Tempat ini kemudian dimanfaatkan sebagai asrama santriwati yang wajib tinggal di asrama. Tepat di bagian samping gedung itu kemudian dibangun tiga lokal sederhana yang berfungsi sebagai kelas. Saat ini, 'gedung modal' tersebut telah dibongkar karena areanya dimanfaatkan untuk pembangun masjid pesantren, kecuali tambahan tiga lokal kelas yang dipertahankan untuk sarana perkantoran.

Seiring dengan peningkatan kepercayaan masyarakat dan kebutuhan fasilitas yang lebih memadai, Al-Rahmah telah membangun berbagai sarana-prasarana. Melewati gerbang pesantren yang terletak pada jalan poros Ciruas-Petir pada sisi kanan terdapat deretan rumah minimalis '*Anshorul Ma'had*' yang merupakan kediaman para guru yang telah berkeluarga dan mewakafkan diri mereka untuk mengabdikan diri di pesantren sepanjang hayat.

Perumahan ini tidak jauh dari lokasi masjid utama pesantren yang merupakan sentral kegiatan pondok. Masjid ini dibangun bersamaan dengan pembangunan dua lantai asrama santriwati menggunakan bantuan dana dari *muhsinin* (donatur-pen) asal Kuwait melalui jasa baik *Jam'iyah Ar-Rahmah Indonesia* pimpinan Ustaz Abdullah Baharmus,

¹⁰Data mengenai sarana dan prasarana sepenuhnya merupakan hasil visitasi, observasi, dan wawancara dengan Kyai Abdul Rasyid Muslim.

Lc (Pembina Pesantren Al-Rahmah) pada tahun 2010.¹¹ Dua fasilitas ini dapat dikatakan sebagai sarana paling memadai dan mewah yang pertama kali dimiliki pesantren sejak masa berdirinya. Setahun berikutnya pada 2011 dibangun lagi tambahan lokal asrama satu lantai untuk santriwati menyambung pada sisi kiri gedung asrama dua lantai karena bertambahnya jumlah santri.

Selang tiga tahun berikutnya Al-Rahmah kembali menerima komitmen donasi individual dari Sayyidah Dallal Abdul Razzak Abdul Latif Al Obaid dari Kuwait untuk pembangunan gedung dua lantai asrama khusus yatim dan duafa, rumah pembina, dan ruang makan juga melalui jasa baik *Jam'iyah Ar-Rahmah Indonesia*. Gedung ini diresmikan oleh wakifnya langsung pada Juli 2014 dan saat ini telah dimanfaatkan untuk asrama santriwati khusus dari kalangan duafa.¹²

Penyediaan asrama tersendiri bagi santri duafa tidak terlepas dari keprihatinan pimpinan pesantren terhadap mereka. Berdasarkan pengamatannya secara langsung, santri dari kalangan duafa sering merasa minder, sedih, dan terkadang menarik diri dari pergaulan saat dicampur dengan santri nonduafa. Karena itu, muncul gagasan untuk menempatkan mereka di asrama tersendiri sehingga mereka akan merasakan *in group feeling* bersama dengan santri lain yang senasib. Gayung bersambut karena pembina yayasan menyetujui dan segera meminta pesantren untuk mengusulkan anggaran biaya. Setelah beberapa waktu pengajuan itu direspons oleh donatur asal Kuwait yang menanggung biaya pembangunan asrama khusus duafa. Berkat jasa baik pemborong bangunan, dana terbatas yang tersedia bahkan mendapatkan tambahan bangunan berupa kediaman pembina dan dapur makan santri.

¹¹Ustaz Abdullah Baharmus adalah Direktur Jam'iyah Ar Rahmah Indonesia. Organisasi yang beralamat di Jalan Cipinang Muara No. 29 Jatinegara Jakarta Timur ini dikenal sebagai lembaga yang banyak menyalurkan donasi transnasional, khususnya dari kawasan Timur Tengah semisal Arab Saudi, Kuwait, Uni Emirat, dan sebagainya, untuk membantu pengembangan lembaga-lembaga pendidikan Islam di berbagai kawasan di tanah air. Kajian komperhensif mengenai gerakan dan peranan lembaga filantropi nasional maupun transnasional di Indonesia dapat dilacak dalam: Hilman Latif, *Islamic Charities and Social Activism: Welfare, Dakwah and Politics in Indonesia* (Unpublished Thesis in Universiteit Utrecht 2012).

¹²Prasasti Peresmian Gedung Darul Aitam, Rumah Pembina, dan Ruang Makan Titimangsa Ramadhan 1435 H/Julai 2014.

Pesantren juga mempersiapkan sarana santri lainnya berupa renovasi gedung asrama santri putra yang posisinya bersebelahan dengan lapangan basket atau tepatnya di depan gedung masjid lama. Gedung ini terlihat kurang memadai dijadikan asrama karena atapnya yang terbuat dari bambu telah mengalami kerapuhan sehingga saat hujan turun sering kebocoran. Maka, dilakukan renovasi atap gedung menggunakan atap baja ringan yang lebih kokoh dan tahan lama. Biaya renovasi ini bersumber dari dana pesantren secara swadaya.

Sedangkan gedung lokal belajar hingga saat ini pesantren telah menempati gedung permanen yang memadai. Hanya beberapa lokal belajar yang masih menggunakan bangunan dalam bentuk gazebo memanjang tanpa dinding dan hanya disekat sekitar setengah meter antartiap lokal sebagai penanda pemisah antarkelas. Sarana pembelajaran ini belum mencukupi kebutuhan sehingga hingga kini sebagian kelas masih menggunakan selasar asrama dan masjid yang difungsikan sebagai kelas. Hal ini memang sedikit mengurangi kenyamanan belajar santri. Namun demikian, tidak menyurutkan semangat mereka untuk menimba ilmu pengetahuan di tengah keterbatasan sarana kelas. Ini semacam 'kelas terbuka' di alam bebas yang saat ini banyak diadopsi sekolah alam yang tidak terikat secara kaku dalam ruang lokal kelas dalam proses pembelajaran.

Guna mengatasi kekurangan ini, pada tahun 2016 pesantren telah mendapatkan komitmen dari donatur Kuwait untuk pembangunan sarana lokal pembelajaran sebanyak delapan lokal. Proses pembangunannya telah dimulai yang ditandai dengan peletakan batu pertama pada tanggal 4 Agustus 2016 persis di belakang asrama santri putra dan bersebelahan dengan dua unit rumah 'Anshorul Ma'had'. Pada tahun yang sama pondok juga mendapatkan komitmen bantuan dari donatur Arab Saudi untuk pembangunan masjid santri putra sebesar sembilan miliar rupiah. Saat ini pembangunan kedua fasilitas tersebut telah rampung. Asrama putra dimanfaatkan untuk penampungan para santri putra baru dan masjid yang diberi nama Abdurrahman Al Rouhayli, sesuai nama wakif, dimanfaatkan sebagai sarana ibadah harian santri serta difungsikan sebagai kelas saat proses pembelajaran karena keterbatasan ruang kelas.

Selain terus-menerus berupaya menambah sarana-prasarana, pesantren juga berusaha memperluas area dengan membebaskan tanah-tanah di sekitar lingkungan pesantren. Pembebasan lahan ini dibiayai

secara mandiri oleh pesantren maupun berasal dari wakaf atau donasi para dermawan. Pada tahun 2016 pondok telah menambah luas lahan sebanyak 7000 m² berupa wakaf dari seorang kontraktor yang biasa menangani pembangunan proyek-proyek pondok seharga satu setengah miliar. Padahal lahan hasil wakaf tersebut saat ini telah dibangun aula serba guna yang berdiri tepat di tengah area pesantren membelah kompleks santri putri dan santri putra. Pembangunan aula serba guna ini menelan biaya 5,8 miliar yang berasal dari bantuan Kementerian Wakaf dan Urusan Islam Negera Kuwait dan diresmikan pada tahun 2021.

E. Positioning Pesantren

Tanah Banten terkenal dengan slogan “bumi seribu kyai sejuta santri”. Hal ini menandakan banyaknya jumlah pesantren di Banten. Berdasarkan data Kementerian Agama, jumlah pesantren di Banten mencapai angka 4000-an. Varian pesantren di Banten mencakup semua jenis tipologi pesantren yakni salafi, khalafi, dan kombinasi salafi-khalafi.

Pesantren Al Rahmah termasuk pendatang baru dalam percaturan pendidikan pesantren di daerah Banten atau tepatnya lagi Serang. Usianya terbilang sangat muda karena baru dirintis tahun 2005 sehingga saat ini baru berusia sebelas tahun dibandingkan dengan Pesantren Turus, Pesantren Pelamunan, Pesantren Madarijul Ulum, dan berbagai pesantren tua lainnya.

Pesantren Al Rahmah merupakan tipologi khalafi (modern) yang mengintegrasikan pola pendidikan pesantren (*boarding*) dengan pola pendidikan sekolah (*schooling*). Pola pesantren diadopsi dengan mengasramakan semua santri secara penuh di lingkungan pesantren. Sementara pola sekolah diadopsi dengan memformalkan pembelajaran secara klasikal dan berjenjang sebagaimana sekolah. Hal ini tidak terlepas dari kiblat pendidikannya, yakni Pondok Modern Gontor dan Pondok Modern Darul Qalam Gintung.

Dari segi jaringan dan relasi dengan pesantren lain di Banten, Al Rahmah berafiliasi dengan pesantren yang bernaung dalam Forum Silaturahmi Pondok Pesantren (FSPP) Banten yang merupakan organisasi gabungan pesantren salafi dan modern. Jaringan organisasi FSPP terdapat di semua kabupaten dan kota se-Banten dengan pola kepemimpinan model presidium. Di luar FSPP, Al Rahmah juga

bergabung dengan Forum Pesantren Alumni Gintung yang merupakan organisasi pesantren yang didirikan oleh para alumni pesantren Gintung atau mereka yang pernah mengajar di pesantren tersebut.

F. Profil Figur Utama

Agenda penyelenggaraan kesejahteraan sosial melalui inklusi pendidikan bagi kalangan marginal yakni anak yatim dan duafa, tidak terlepas dari peranan para aktor pesantren. Tanpa kepekaan, kepedulian, dan komitmen mereka nampaknya kegiatan tersebut sulit berjalan dengan baik. Karenanya, dipandang penting sedikit menguraikan profil mereka¹³ sebagai berikut:

Pertama, Kyai Abdul Rasyid Muslim, S.Ag. atau Ustaz Muslek (panggilan akrabnya yang merupakan akronim “muslim intelek”), pimpinan Pondok Pesantren Al Rahmah. Ia biasa dipanggil Kyai Rasyid oleh masyarakat dan dipanggil *Abi* (ayah-dalam bahasa Arab) atau *Mudir* (sebutan pimpinan pondok pesantren dalam bahasa Arab-pen) oleh para santri dan ustaz/ustazah. Ia menghabiskan masa kecilnya di Desa Patrol Kecamatan Sukra Indramayu, Jawa Barat. Mengenyam pendidikan dasar dan menengah pertama hingga kelas dua SLTA di Indramayu. Ketika menginjak tahun ketiga bangku SLTA ia memutuskan meneruskan studinya ke Pondok Modern Darussalam Gontor Ponorogo. Selepas studi di Gontor sempat bekerja di beberapa perusahaan swasta di Jakarta dan Cilegon. Namun, ia kembali ke habitatnya di bidang pendidikan Islam dengan mengajar di Pondok Pesantren Dar El Qalam Gintung Jayanti Tangerang sambil melanjutkan kuliah S-1 di Fakultas Syariah IAIN Sunan Gunung Djati Cabang Serang. Kediannya terletak di samping asrama santri putri Pesantren Al Rahmah. Ia memiliki seorang istri dan tiga orang anak. Pada tahun 2019, ia wafat mendadak setelah menyelesaikan proses akreditasi madrasah dan kini digantikan oleh KH. Mahfud, alumni Pondok Modern Gontor tahun 1984, yang menggantikan kepemimpinan Kyai Ahmad Fanani Amir.

Kedua, Ustazah Enung Nurhayati, S.Ag., istri pimpinan Pondok Pesantren Al Rahmah, biasa dipanggil Ustazah Enung oleh masyarakat atau *Umi* (ibu dalam bahasa Arab-pen) oleh para santri dan ustaz/

¹³Uraian profil tiga figur ini merupakan hasil wawancara pada serangkaian visitasi ke Al Rahmah.

ustazah. Ia asli kelahiran Walantaka Serang. Ia alumni MTS Darussalam Pipitan Serang tahun 1993, MAN 2 Serang tahun 1996, dan S-1 Fakultas Syariah IAIN Sunan Gunung Djati Serang. Menurut pengakuannya, ia 'nyantri' di Pesantren Salafi Nurul Abror Lopang Serang selama menyelesaikan kuliah. Ia juga sempat mengajar di SMPN Ciruas sebelum kemudian terlibat penuh di dunia pesantren. Keterlibatannya pada dunia pendidikan pesantren dirintis ketika ikut mengembangkan Pesantren Dar Et Taqwa di daerah Petir Serang. Kiprahnya lalu berlanjut dengan bahu-membahu bersama Kyai Rasyid mendirikan Al Rahmah. Kini ia mendampingi Kyai Rasyid mengelola pesantren, terutama dalam menangani hubungan pesantren dengan birokrasi pendidikan di Kemenag maupun Kemendikbud. Dari Ustazah Enung saya mendapatkan informasi mengenai latar belakang kebijakan inklusi pendidikan bagi kaum marginal di pesantren, manajemen pengelolaan santri dari kalangan khusus tersebut, data santri yatim dan duafa, dan suka duka mendampingi perjuangan suami membangun pesantren.

Ketiga, Ustaz Subiyantoro (59 tahun). Pria kelahiran Yogyakarta yang akrab dipanggil Pak Bin, adalah Wakil Kepala Madrasah yang mengatur administrasi pendidikan pesantren sekaligus orang kepercayaan pimpinan pesantren. Sebelum aktif di dunia pesantren, pria lulusan Fakultas Pertanian UGM Yogyakarta tahun 1979 ini, pernah berkarier sebagai birokrat pada dinas pertanian pada satu kabupaten di Lampung dari tahun 1980 hingga mengajukan pensiun muda tahun 1994. Selepas menjadi ASN, ia bergabung dengan Pesantren Dar Et Taqwa Petir Serang hingga tahun 2008. Setelah keluar dari Dar Et Taqwa ia bergabung dengan PT KAI Daop Yogyakarta sebagai supervisor perjalanan kereta api rute Yogyakarta-Jakarta. Irama kerja di perusahaan yang sering mengharuskannya meninggalkan keluarga dan kewajibannya sebagai Muslim membuat nuraninya gelisah. Maka, atas desakan Kyai Rasyid, ia kembali ke dunia pesantren di Al Rahmah pada tahun 2010. Pengalamannya yang panjang di birokrasi dan keahlian administratif yang dimiliki sangat mendukung kebutuhan pesantren akan figur manajer handal. Administrasi pesantren, khususnya di bidang pendidikan, pembangunan, pengasuhan santri, dan humas berjalan mulus di tangan dingin Pak Bin.



< BAB 4

KEUANGAN SOSIAL ISLAM DAN PEMBIAYAAN PENDIDIKAN

A. Bentuk-bentuk Keuangan Sosial Islam di Pesantren

Abdurrahman Wahid, biasa disapa akrab dengan Gus Dur, pernah mengemukakan suatu gagasan ketika membahas pesantren. Gagasan itu disebutnya sebagai situasi kejiwaan yang tidak menentu (keadaan rawan). Kondisi rawan tersebut disebabkan oleh beberapa faktor, di antaranya: *pertama*, situasi ketidakpastian nasional yang dihadapi oleh Indonesia; *kedua*, kesadaran akan keterbatasan pesantren menghadapi tantangan yang dihadapkan oleh kemampuan teknologi yang berkembang; *ketiga*, kesulitan mempersuasi masyarakat pendukung pesantren kepada sikap hidup yang relevan dengan kebutuhan-kebutuhan nyata pesantren; *keempat*, keterbatasan sarana prasarana material dan nonmaterial yang berdampak pada kelemahan mengatasi permasalahan secara integral dan komperhensif.¹

Akibat keadaan rawan tersebut, pesantren kesulitan untuk secara akseleratif mengembangkan berbagai aspek internal seperti sarana

¹Abdurrahman Wahid, “Dinamisasi dan Modernisasi Pesantren” dalam Abdurrahman Wahid, *Menggerakkan Tradisi: Esai-Esai Pesantren*, (Yogyakarta: LkiS, 2001), 37–47.

prasarana, sumber daya manusia, mutu pendidikan, kesejahteraan warga pesantren, pembiayaan, pengembangan jaringan, dan kebutuhan strategis lainnya. Selama ini, pesantren lebih banyak mengandalkan kemampuan sendiri untuk mengatasi berbagai permasalahan yang dihadapinya sehingga dinamisasi internal dan eksternal menjadi terhambat dan terlamabat. Maka, dibutuhkan suatu terobosan, terutama dari pimpinan dan jajaran pengurus pesantren, sehingga tidak hanya bersandar pada kekuatan internal pesantren, namun mencoba untuk menggali kekuatan eksternal.

Terkait dengan pembiayaan pendidikan, selain memaksimalkan potensi pendanaan internal dari keluarga peserta didik dan penghasilan unti ekonomi pesantren, perlu juga diusahakan pengembangan jejaring dan pendalaman potensi eksternal dari masyarakat seperti para filantropis individual maupun kolektif, lembaga keuangan syariah, dana sosial perusahaan, dan lembaga filantropi nasional maupun transnasional. Selama ini, potensi pendanaan dari berbagai kalangan tersebut belum maksimal diusahakan karena beberapa kendala teknis yang dialami oleh pesantren seperti koneksi dengan pihak donatur, kemampuan penyusunan perencanaan, dan manajemen keuangan.

Pengalaman kondisi kerawanan juga dialami oleh pimpinan Al Rahmah, Kyai Rasyid, ketika memutuskan mengembangkan pengajian rutin Quran menjadi sebuah pondok pesantren. Terlebih lagi pada awal perintisan pesantren di tahun 2005 ia baru saja berhenti dari tempatnya mengajar di Pesantren Dar Et Taqwa Petir Serang dan kembali mengajar di Pesantren Dar El Qalam Gintung Balaraja. Ia juga baru memulai hidup berumah tangga dan akan memiliki anak karena istrinya tengah mengandung. Sementara kehidupan ekonomi masih belum stabil.² Meskipun hati telah mantap, namun kondisi psikologis manusiawi tetap memuat suatu kekhawatiran dan kegamangan.

Sumber kegelisahan juga disebabkan status tanah yang akan ditempati pesantren masih dalam status sengketa dengan anggota keluarga pihak istri. Semula, seorang anggota pihak keluarga istri, H. Nur, memperkenankan mereka berdua menggunakan fasilitas gedung bekas penggilingan padi untuk ditempati para santri sebagai asrama dan sarana kelas. Belakangan, ia meminta diadakan perhitungan yang jelas terkait

²Wawancara Ustazah Enung Nurhayati, S.Ag.

sewa gedung dan lahan setelah melihat kemajuan pesantren dengan cara menjadikan fasilitas tersebut sebagai “saham” yang bersangkutan kepada pesantren dengan pemberian bagi hasil setiap tahunnya. Hal tersebut jelas menyulitkan manajemen pesantren yang akan dibangun dengan status wakaf. Maka, diadakan musyawarah segenap anggota keluarga ahli waris atas bangunan dan lahan di atasnya baik yang berasal dari Lampung, Serang, dan Jakarta. Hasilnya diputuskan bahwa baik lahan maupun gedung akan dijual secara bertahap kepada pesantren sesuai dengan kemampuan keuangan yang dimiliki.³ Kegamangan juga disebabkan mereka belum berpengalaman merintis pesantren sekalipun pernah terlibat sebagai pengajar di beberapa pesantren seperti Darul Fikri Malang selepas studi di Gontor, Al Hasyimiyah Cilegon setelah keluar dari perusahaan tempatnya bekerja di Jakarta, dan terakhir Dar El Qalam Gintung Balaraja, serta Dar Et Taqwa Petir Serang.

Karena itu, terlebih dahulu ia berdiskusi intens dengan pihak keluarga sendiri, orang tua, dan mertua. Istrinya, Nyai Enung Nurhayati, sebelumnya pernah mendampingi almarhum suami pertamanya, merintis pesantren Dar Et Taqwa di daerah Petir Kabupaten Serang. Tetapi sang istri adalah pihak pertama yang diajak berdiskusi mengenai rencana merintis pesantren. Setelah berdua mantap, maka mereka mendiskusikan rencana tersebut bersama mertua, Abah Sutara dan Ibu Hj. Roudhoh yang ternyata sangat mendukung rencana mantu dan anaknya. Mereka berdua juga mendukung rencana perintisan pesantren. Dukungan juga diperoleh dari keluarga pihak Kyai Rasyid yang ada di Patrol Indramayu Jawa Barat yang diwakili sang kakak, Ibu Mimah dan Ibu Fatonah. Mereka juga mendukung rencana pengembangan pesantren yang digagas Ustaz Rasyid.

Pihak lain yang juga diajak berdiskusi adalah para alumni senior Pondok Modern Gontor di Banten yang telah lebih dahulu

³Menurut Ustazah Enung Nurhayati, ia kemudian menyarankan kepada suaminya, Ustaz Rasyid, untuk menjual mobil Kijang Rover tahun 1997 yang diperoleh dari almarhum suami pertamanya untuk membayar gedung dan lahan yang ditempati pesantren. Mobil tersebut terjual dengan harga 55 juta yang dibagi dua antara dirinya dengan pihak keluarga almarhum suami. Ia mendapatkan bagian 35 juta dan sisanya dikembalikan kepada pihak keluarga almarhum suaminya. Sementara itu harga jual gedung dan lahan sebesar 110 juta. Sesuai sesuai kesepakatan sisa pembayaran dicicil sesuai kemampuan keuangan pesantren. Wawancara Ustazah Enung Nurhayati, S.Ag.

mengembangkan pesantren baik di Serang, Cilegon, Lebak, dan Tangerang, maupun senior alumni Gontor yang berkecimpung di tengah masyarakat dalam berbagai profesi. Beberapa nama yang disebutkan diajak berdiskusi adalah KH. Ikhwan Hadiyyin, KH. Sulaiman Efendi, KH. Anang Azhari, KH. Khoirul Ihsan, KH. Syahiduddin, dan KH. Sulaiaman Ma'ruf.⁴ Nama lain yang juga disebutkan adalah Ustaz Mahfud (alumni Gontor 1981) yang lama berkecimpung di bidang dakwah Islam di Serang, Ustaz Sungkawa (alumni Gontor 1979) yang lama bergerak di bidang dakwah dan pendidikan Islam di Serang khususnya Kecamatan Walantaka, dan Ustaz Laode Asroruddin Taufik (alumni Gontor 1984), seorang aktivis sosial-politik di Banten yang pernah menjadi pengurus parpol dan anggota legislatif pada DPRD Provinsi Banten.⁵ Tema diskusi adalah menimba pengalaman dan praktik mereka merintis pesantren sekaligus mencari dukungan, serta doa.

Secara khusus, Kyai Rasyid, berdiskusi dengan KH. Syahiduddin, pimpinan Dar El Qalam saat itu yang menggantikan almarhum KH. Rifai Arif, pendiri pesantren kenamaan di Balaraja tersebut. Sang kyai mendukung penuh rencana perintisan pesantren karena sebelumnya beberapa alumni Gontor yang pernah mengabdikan di Dar El Qalam juga sukses membina pesantren di Banten.⁶ Hasil diskusi dengan berbagai

⁴KH. Ikhwan Hadiyyin adalah pimpinan Pesantren Dar El Azhar Rangkasbitung Lebak dan dosen pada Fakultas Ushuluddin dan Adab UIN SMH Banten. KH. Sulaiman Efendi adalah pimpinan Pesantren Manahijussadat Cibadak Lebak. Pesantren Al Rahmah pernah menginduk ke pesantren ini dalam pelaksanaan ujian akhir madrasah. KH. Anang Azhari adalah pimpinan Pesantren Al Mizan Narimbang Lebak dan Cikole Pandeglang. Ia adalah adik KH. Maimun Ali, pimpinan Pesantren Subulussalam Kresek Tangerang dan aktivis Islam Banten. KH. Syahiduddin adalah pimpinan Pesantren Dar El Qalam setelah wafatnya KH. Rifai Arif, pendiri Dar El Qalam. KH. Sulaiman Ma'ruf adalah pimpinan Pesantren Dar El Istiqamah Sukawana Serang dan aktivis Islam Banten. KH. Khoitul Ihsan adalah pimpinan Pesantren Ulul Albab Pabuaran Serang, kyai muda sekaligus pengusaha kreatif dan tercatat sebagai pembina pertama Pesantren Al Rahmah sebagaimana tercatat dalam Akta Pendirian Yayasan Rahmatan Lil 'Alamin Nomor 04 Notaris Gerry, SH.

⁵Ketiga tokoh tersebut hingga kini tercatat sebagai pengajar tetap di Pesantren Al Rahmah. Ustaz Laode Asroruddin Taufik bahkan telah merintis pesantren yang dinamai Pondok Pesantren Al Urwatul Wutsqa di Cigoong Serang.

⁶Pondok Pesantren yang dikembangkan para alumni Gontor yang pernah mengajar di Pesantren Dar El Qalam Gintung Balaraja Tangerang telah membentuk suatu organisasi tersendiri yang disebut Forum Silaturahmi Pesantren Alumni (FSPA). Organisasi tersebut di luar organisasi yang menghimpun seluruh pesantren yang ada di Banten yang dinamakan Forum Silaturahmi Pondok Pesantren (FSPP).

pihak semakin menguatkan dan memantapkan tekadnya untuk memulai babak baru pengembangan pengajian rutin di Masjid As Sa'adah Lebakwangi Walantaka Serang menjadi lembaga pendidikan Islam berbentuk pesantren.

Kembali kepada tema pokok penelitian mengenai keuangan sosial Islam dan pembiayaan lembaga pendidikan Islam. Adakah bentuk-bentuk keuangan sosial Islam yang menjadi sumber pembiayaan Pesantren Al Rahmah sejak masa perintisan hingga kini? Apakah bentuk-bentuk keuangan sosial Islam yang terlibat dalam pembiayaan pesantren? Jawaban terhadap pertanyaan pertama adalah afirmatif dalam artian terdapat bentuk-bentuk keuangan sosial Islam yang terlibat dalam pembiayaan pesantren sejak masa perintisan hingga kini. Paparan berikut menjelaskan bentuk-bentuk keuangan sosial Islam yang terlibat dalam pembiayaan pesantren.

1. Infak dan Sedekah

Pada masa perintisannya, Al Rahmah hanya menempati sebuah bangunan tua bekas tempat penggilingan padi yang dipinjamkan paman istri Kyai Rasyid untuk dimanfaatkan karena telah lama tidak beroperasi dan dibiarkan terbengkalai. Maka, dapat dikatakan bahwa bentuk keuangan sosial Islam yang pertama kali mendukung pesantren adalah sedekah manfaat gedung. Sedekah manfaat itu menjadi modal awal pengembangan pengajian rutin menjadi sebuah lembaga pendidikan Islam yang kini telah berkembang menjadi pesantren besar dengan jumlah santri dan santriwati mencapai angka 1260 pada awal tahun pelajaran 2017–2018 serta luas areanya mencapai 6 hektare.

Pemanfaatan bangunan bekas penggilingan padi dimulai dari diskusi dengan pihak keluarga istri kyai mengenai rencana tempat pendirian pesantren. Masukan dari pihak keluarga mengarah kepada gedung tersebut karena dari segi luas dan konstruksi masih memungkinkan untuk digunakan sebagai tempat tinggal santri sekaligus sarana pembelajaran. Tanah di sekitar gedung juga masih sangat luas sehingga memungkinkan bagi perluasan area pesantren di masa mendatang. Di sekitar gedung tua tersebut terdapat area persawahan produktif dan

FSPP dipimpin oleh presidum para kyai selama empat tahun dan kini tersebar di semua kabupaten/kota se-Banten.

area tegalan yang ditanami pohon keras seperti rambutan, durian, kelapa, dan sebagainya. Ditambah lagi, letaknya tidak terlalu jauh dari akses jalan raya yang menghubungkan Kecamatan Ciruas dan Kecamatan Petir via Kecamatan Walantaka Serang Banten. Lokasi strategis akan memudahkan akses masyarakat menuju pesantren yang akan dikembangkan.

Adanya gedung sangat memudahkan dan membantu perintisan pesantren karena dengan sedikit renovasi di beberapa bagiannya, memungkinkan santri yang diterima langsung menempati '*asrama darurat*' sekaligus '*ruang kelas darurat*' dan '*masjid darurat*' tanpa harus membangun terlebih dahulu yang pastinya membutuhkan biaya besar dan waktu lama. Kegiatan pendidikan dan kepesantrenan dapat segera dijalankan karena fasilitas pendukung minimal operasional sebuah pesantren telah tersedia seperti asrama, ruang kelas, dan sarana ibadah.⁷ Asrama menjadi tempat bermukim para santri selama 24 jam sebagai penciri utama sistem pendidikan pesantren, ruang kelas merupakan lokasi pembelajaran formal para santri, dan tempat ibadah sebagai tempat pembinaan mental-spiritual para santri. Figur kyai adalah pemimpin keseharian para santri dan kitab kuning merujuk kepada materi serta bahan ajar yang disampaikan para ustaz dan dipelajari para santri.

Pada pembukaan perdana pesantren di tahun 2006, jumlah calon santri yang mendaftar mencapai 36 orang. Namun, calon santri yang benar-benar merealisasikan diri menjadi santri perdana berjumlah 19 orang yang terdiri dari 12 santri putra dan 7 santri putri. Mereka menempati asrama yang berasal dari sedekah manfaat gedung bekas penggilingan padi. Kegiatan ibadah dan kepesantrenan juga dilaksanakan di tempat tersebut. Sedangkan kegiatan pembelajaran berlangsung di bawah pohon asam tua yang terletak di samping gedung beralaskan karpet plastik dengan meja belajar kecil seperti yang sering digunakan untuk lomba menggambar anak taman kanak-kanak.

Mayoritas santri perdana berasal dari kalangan yatim dan duafa dari daerah sekitar pesantren. Mereka umumnya tidak dapat melanjutkan pendidikan setelah menyelesaikan pendidikan tingkat dasar (SD/MI

⁷Dalam karya klasik Zamakhsyari Dhofier mengenai pesantren disebutkan syarat minimal suatu pesantren yang terdiri dari asrama, masjid, kyai, kitab kuning, dan santri. Lihat: Zamakhsyari Dhofier, *Tradisi Pesantren*, Edisi Revisi, (Jakarta: LP3ES, 1999).

dan SMP/MTS) karena kesulitan biaya. Mengetahui ada pesantren baru yang memberikan kesempatan untuk melanjutkan studi tanpa biaya yang memberatkan mendorong mereka untuk mendaftar. Bahkan bagi santri yang benar-benar tidak mampu membiayai studinya dibebaskan samasekali dari kewajiban membayar. Biaya bulanan yang hingga tahun kedua operasional pesantren sebesar 100 ribu hanya dikenakan bagi santri yang mampu membayar.⁸

Lalu dari mana pesantren mendapatkan dana tambahan penopang operasionalnya? Pesantren memperoleh sedikit tambahan biaya operasional dari kantong pribadi kyai, keluarga pesantren, dan sedekah masyarakat serta para alumni Gontor yang peduli terhadap dunia pesantren. Dana dari kantong pribadi kyai dihasilkan dari keahliannya berceramah pada kegiatan-kegiatan peringatan hari besar Islam (PHBI) seperti Maulid Nabi, Tahun Baru Hijriah, Isra dan Mi'raj, Khutbah 'Idain, dan siraman rohani pada momen-momen acara keluarga seperti walimah nikah, khitanan, walimah safar, milad perusahaan, dan sebagainya. Kyai Rasyid menceritakan bahwa keahlian retorikanya didapatkan dari latihan pidato ketika mondok di Gontor melalui kegiatan *Muhadarah* (Latihan Tablig) mingguan dalam bahasa Arab, Inggris, dan Indonesia. Kemampuan tersebut dia kembangkan setelah selesai studi di Gontor dan semakin berkembang setelah berkuliah di Fakultas Syariah IAIN Sunan Gunung Djati di Serang yang diselesaikan tahun 1997.

Sebagaimana tradisi masyarakat, setelah penceramah turun dari panggung maupun mimbar, maka dia akan menerima '*salam tempel*' dalam bentuk amplop yang berisi honor ceramahnya ditambah aneka hidangan, makanan, dan buah-buahan yang ditempatkan pada bagasi mobilnya. Sesampainya di pesantren, '*salam tempel*' tersebut diserahkan kepada istri yang sebagian besar digunakan untuk menopang biaya keseharian pesantren. Sementara makanan yang dibawa akan menjadi '*tambahan gizi*' bagi para santri.⁹ Dukungan dana juga datang dari keluarganya baik dari pihak istri di Serang maupun pihaknya di Indramayu. Sokongan tersebut ikut meringankan beban biaya pesantren. Kyai Rasyid menuturkan bahwa ia pernah menjual mobil Kijang Rover produk tahun 1997 pemberian dari keluarga istrinya seharga 50 juta untuk membebaskan lahan di sekitar

⁸Budi Sudrajat, *Dimensi Ekonomi Pesantren, Kontribusi Pesantren terhadap Kesejahteraan Sosial Masyarakat Marginal*, (Serang: LP2M, 20016), hlm. 112–113.

⁹Wawancara dengan Kyai Abdul Rasyid Muslim.

pesantren yang dijual pemiliknya. Padahal, mobil tersebut merupakan andalan satu-satunya untuk transportasi menuju lokasi undangan ceramah maupun kegiatan pesantren lainnya. Tetapi mobil kesayangannya dia sedekahkan guna perluasan area tanah pesantren. Alhasil, ia beralih menggunakan sepeda motor sebagai alat transportasi utama. Terkadang ia meminjam kepada alumni Gontor yang mempunyai mobil jika harus menghadiri acara di tempat penting bersama pejabat pemerintah atau pengusaha.¹⁰ Dukungan lain berasal dari sedekah insidental masyarakat dan alumni Gontor maupun Gintung yang peduli dengan pesantren. Praktik ini biasanya mereka lakukan ketika berkunjung ke pesantren untuk sekadar silaturahmi maupun atas undangan pesantren pada kegiatan tertentu. Mereka memberikan bantuan dalam bentuk uang maupun barang seperti beras untuk konsumsi makan para santri.

Dana dalam bentuk infak dan sedekah juga berasal dari para wali santri yang mampu. Sejak tahun pelajaran 2010–2011 pesantren mengenakan biaya uang bangunan dan perluasan tanah bagi calon santri baru yang mampu sebesar 300 ribu rupiah.¹¹ Pada tahun pelajaran 2023–2024 besaran uang bangunan dan wakaf perluasan tanah sejumlah 3,5 juta rupiah. Besaran ini tidak mengalami kenaikan dari tahun pelajaran sebelumnya.¹² Jika dilihat jumlah calon santri baru yang diterima pada tahun pelajaran 2022–2023 berjumlah 470 santri baru, maka jika disimulasikan setengah calon santri baru membayar 3,5 juta, berarti pesantren menerima infak sebesar 700 juta rupiah. Sedangkan pada tahun pelajaran 2023–2024 calon santri baru yang diterima sebanyak 446 orang. Apabila disimulasikan 300 santri baru membayar 3,5 juta, maka pesantren menerima infak sejumlah 1 miliar rupiah lebih.¹³

¹⁰Wawancara dengan Kyai Abdul Rasyid Muslim. Cerita ini diperkuat oleh testimoni Ustaz Subiyantoro yang sering diajak menghadiri acara-acara yang mengundang Kyai Rasyid untuk berceramah baik di daerah Serang maupun Cilegon.

¹¹Informasi Ustaz Aat Syafaat, alumni Al Rahmah tahun 2011 sekaligus staf administrasi pesantren.

¹²Tabel biaya administrasi Pendaftaran Calon Santri Baru Tahun Pelajaran 2023–2024, Observasi pada 22 Mei 2023.

¹³Simulasi tersebut dilakukan untuk memperoleh gambaran besaran dana infak yang diperoleh pesantren guna keperluan pengembangan bangunan dan perluasan tanah. Sedangkan jumlah total berapa yang diterima belum terdapat data yang tersedia. Simulasi ini menggunakan data rekapitulasi santri selama tiga tahun terakhir. Informasi rekapitulasi diperoleh dari Ustaz Aat Syafaat, staf administrasi dan pengajar di Al Rahmah, Wawancara 13 Mei 2023.

Dana yang terhimpun digunakan untuk biaya pembangunan gedung, perawatan, dan pemeliharaan gedung, dan pembelian tanah perluasan area pesantren. Berdasarkan informasi Ustaz Subiyantoro,¹⁴ gedung-gedung yang dibangun secara mandiri dengan dana infak gedung antara lain asrama santri putra dan santri putri, yakni: Asrama Cairo, Asrama Saudi, Asrama Kuwait, Asrama Mesir, dan Asrama Abu Dhabi.

Sumber dana dari infak dan sedekah juga diperoleh dari distribusi *Kupon Wakaf Tanah, Infak dan Sedekah Pondok Pesantren Al Rahmah* yang dibagi kepada seluruh santri ketika mereka berlibur panjang setelah akhir tahun pelajaran. Berdasarkan informasi Ustaz Subiyantoro, program ini telah berjalan selama tiga tahun terakhir di mana setiap santri akan dititipi sebanyak 10 kupon infak dengan besaran nominal 25 ribu rupiah.¹⁵ Jika semua kupon yang dititipkan kepada santri 'terjual', maka bisa diasumsikan setiap santri akan mengumpulkan dana sebesar 250 ribu rupiah.

Saat ini pola penggalangan dana melalui penyebaran kupon telah berhenti dan digantikan dengan Uang Bangunan dan Wakaf Perluasan Tanah yang dikenakan terhadap calon santri baru. Pada tahun pelajaran 2023–2024, besarnya sejumlah 3.500.000,00/calon santri baru. Namun, ketentuan ini hanya berlaku bagi calon santri nonyatim. Sedangkan calon santri yatim atau duafa dibebaskan dari pembayaran.

Menilik kepada karakteristik pendidikan berbasis masyarakat, sebagaimana disampaikan Fuad, pola akumulasi pembiayaan melalui sumbangan bangunan dan wakaf perluasan tanah merupakan bentuk pendayagunaan potensi sumber daya masyarakat, baik sumber daya manusia maupun nonmanusia dalam penyelenggaraan pendidikan.¹⁶ Dana ini termasuk kategori sumber daya nonmanusia yang diorganisir untuk keperluan pendidikan. Strategi fundraising semacam ini juga merupakan bentuk revitalisasi semangat donasi keagamaan dari seluruh masyarakat agar mereka peduli dengan pendidikan.¹⁷ Menurut Fuad,

¹⁴Wawancara dengan Ustaz Subiyantoro, 11 Oktober 2017.

¹⁵Wawancara dengan Ustaz Subiyantoro, 11 Oktober 2017.

¹⁶Nurhattati Fuad, *Manajemen Pendidikan Berbasis Masyarakat: Konsep dan Implementasinya*, (Jakarta: Rajagrafindo, 2014), hlm. 139.

¹⁷Bersadarkan data indeks kedermawanan yang dirilis oleh lembaga Charities

pendayagunaan sumber daya masyarakat dalam pendidikan bukan semata komplementer, namun merupakan hal strategis karena dua alasan: *pertama*, pendidikan membutuhkan sumber daya bantuan dari potensi sumber daya masyarakat karena keterbatasan alokasi anggaran pendidikan, terlebih lagi bagi lembaga pendidikan swasta semacam pesantren yang dominan dikembangkan oleh masyarakat; *kedua*, optimalisasi sumber daya pada lingkungan masyarakat guna mendukung penyelenggaraan pendidikan.¹⁸

2. Qard Al Hasan

Bentuk keuangan sosial Islam yang pernah didapatkan pesantren adalah qard al hasan. Berdasarkan informasi Ustaz Rasyid, dana ini diperoleh dari Ustaz Abdullah Said Baharmus¹⁹ pada tahun 2009 ketika pesantren akan membebaskan tanah tegalan yang terletak di bagian belakang area pesantren. Tanah tersebut seluas 2.800 meter persegi dengan harga per meter persegi 25 ribu rupiah sehingga dibutuhkan dana Rp70.000.000,00. Karena saat itu pesantren sedang tidak memiliki kas sejumlah yang diperlukan, maka keperluan tersebut dicoba disampaikan kepada Ustaz Abdullah Said Baharmus. Ternyata dia merespons dengan baik permintaan pesantren dan bersedia memberikan pinjaman kebajikan sesuai kebutuhan untuk pembebasan tanah. Pinjaman

Aid Foundation, selama lima tahun berturut-turut (2018–2022), Indonesia menempati posisi sebagai negara paling dermawan di mana dimensi donasi menempati persentase tertinggi yakni 84%.

¹⁸Nurhattati Fuad, *Manajemen Pendidikan Berbasis Masyarakat*, hlm. 142.

¹⁹Nama lengkapnya adalah KH. Abdullah Said Baharmus, Lc. Beliau adalah sekretaris II Pengurus Badan Wakaf Pondok Modern Darussalam Gontor. Namanya begitu dikenal di lingkungan para alumni Gontor karena beliau memiliki relasi yang luas dengan negara-negara Timur Tengah. Beliau kerap dipercaya oleh pemerintah maupun lembaga-lembaga dan individu filantropi Islam negara Timur Tengah untuk menjadi perantara dalam menyalurkan donasi kepada lembaga-lembaga pendidikan Islam di Indonesia. Beliau adalah alumni Gontor tahun 1974 dan alumni Madinah Islamic University sehingga kerap menjadi koordinator calon mahasiswa asal Indonesia yang ingin meneruskan studi pada perguruan tinggi tersebut. Beliau saat ini menjabat sebagai Direktur Yayasan Jam'iyah Al Rahmah Indonesia di Jakarta yang beralamat di Jl. Cipinang Muara Raya Nomor. 29 Rt.01/Rw.03 Cipinang Muara Jatinegara, Jakarta Timur. Beliau juga duduk di berbagai susunan pengurus beberapa pondok pesantren, termasuk Al Rahmah, sebagai pembina Yayasan Rahmatan Lil 'Alamin yang menaungi Pesantren Al Rahmah Serang sebagaimana tercantum dalam Akta Yayasan Rahmatan Lil 'Alamin Nomor AHU-0018254.AH.01.12.Tahun 20017 Tanggal 03 Oktober 2017.

tersebut telah dikembalikan setelah pesantren mempunyai kas yang mencukupi.

Selain pinjaman ini, pesantren juga mengajukan pinjaman komersil dengan jaminan beberapa aset pesantren kepada perbankan syariah seperti Bank Syariah Mandiri dan Bank BTN Syariah untuk keperluan perluasan tanah pesantren karena animo masyarakat untuk mendidik anaknya di Al Rahmah semakin meningkat setiap tahunnya sementara fasilitas yang tersedia masih terbatas.

3. Wakaf

Kondisi pergedungan Al Rahmah saat ini terbilang telah memadai. Fasilitas asrama para santri, masjid, ruang belajar, arena olahraga, dapur makan, sarana sanitasi, gedung pertemuan, asrama guru, perumahan guru, kediaman pimpinan, kantin pondok, dan fasilitasnya lainnya telah dibangun secara permanen dan terbilang megah.²⁰

Adapun sarana ibadah dan asrama santri semuanya telah berdiri kokoh bahkan dapat dikatakan mengarah megah karena terdiri dari gedung-gedung permanen. Sarana ibadah santri yang semula pada awal perintisan menggunakan terpal plastik di lapangan terbuka, saat ini telah menjelma menjadi masjid megah dan luas. Masjid untuk santriwati dibangun permanen seluas 20×20 meter persegi. Posisi masjid santriwati tepat disamping gedung perumahan guru yang tidak jauh dari gerbang utama pesantren yang berada di jalan raya ruas Ciruas-Petir via Walantaka. Masjid ini dibangun pada tahun 2010. Sedangkan masjid santri putra saat ini telah berdiri di bagian tengah belakang area pesantren yang dulunya adalah tanah tegalan yang ditanami pepohonan keras. Ukuran masjid santri putra seluas 21×28 meter persegi sebanyak dua lantai.²¹

Gedung asrama santri baik putra maupun putri juga telah dibangun permanen. Jika pada masa perintisan menggunakan gedung bekas penggilingan padi yang tidak terpakai, saat ini asrama santri putra dan putri sudah berupa gedung-gedung permanen yang representatif. Asrama santriwati yang pertama kali dibangun pada tahun 2010 adalah Gedung Latifah sebanyak dua lantai dengan jumlah ruangan 10 lokal.

²⁰Observasi terakhir penulis pada tanggal 13 Mei 2023.

²¹*Ibid.*

Gedung ini menyusul gedung asrama yang telah dibangun sendiri oleh pesantren sebanyak 5 lokal.

Pada tahun 2014, dibangun asrama yatim dan duafa santriwati dua lantai dengan jumlah ruangan 8 lokal ditambah dengan dua rumah pembimbing yang saat ini berfungsi sebagai *guest house*. Pada tahun 2017 pesantren juga membangun gedung asrama bagi santri yatim dan duafa putra dan putri masing-masing 8 lokal sehingga jumlah totalnya adalah 16 lokal. Kedua gedung asrama ini dibangun permanen dua lantai. Pada tahun 2017 ini pesantren juga membangun 8 ruang belajar bersebelahan dengan perumahan ustaz senior dan telah digunakan untuk kegiatan pembelajaran santri kelas IX Madrasah Tsanawiyah Al Rahmah.

Fasilitas baru lainnya yang dibangun adalah Perumahan Guru yang diperuntukkan bagi ustaz maupun ustazah senior yang telah berumah tangga yang dalam bahasa mereka disebut *Perumahan Anshar Al Ma'had* (Perumahan Penolong Pesantren). Jumlah perumahan guru sebanyak 10 rumah yang terletak di samping gerbang utama sebanyak 8 rumah dan 2 rumah lainnya terletak di belakang asrama putra Gedung Abu Dhabi. Sepuluh rumah tersebut saat ini telah ditempati oleh para ustaz atau ustazah yang telah berkeluarga namun belum memiliki rumah sendiri sehingga pesantren memfasilitasi mereka agar konsentrasi membantu pesantren tanpa memikirkan hal-hal lain.²² Fasilitas baru yang lain berupa sumur artesis yang dibangun di samping Kantor Pengasuhan Santri. Sumur ini menyuplai air kebutuhan sanitasi para santri putra. Namun, air sumur artesis ini terasa payau karena dibangun di area bekas persawahan.²³

Pembiayaan pembangunan sejumlah sarana dan prasarana yang dikemukakan di atas berasal dari sumber keuangan sosial Islam yaitu wakaf. Data bahwa sumber pendanaan berasal dari wakaf akan dengan mudah diketahui karena pada setiap sarana dan prasarana yang dibangun dengan dana wakaf ditandai dengan prasasti dari batu marmer hitam. Pada prasasti akan dicantumkan informasi mengenai negara pemberi wakaf, identitas diri, peruntukan wakaf, doa bagi pemberi wakaf, dan titimangsa peresmian fasilitas tersebut.²⁴

²²Observasi dan Wawancara dengan Ustaz Rasyid, 13 Agustus 2017.

²³Observasi 11 Oktober 2017.

²⁴*Ibid.*

Wakaf-wakaf tersebut berasal dari para *wakifin* (pemberi wakaf) asal negara-negara Timur Tengah terutama Kuwait, Arab Saudi, dan Uni Emirat Arab (profil wakifin akan dijelaskan pada bahasan berikutnya). Selain wakaf tunai yang diperuntukkan bagi pembangunan pergedungan pesantren, terdapat pula wakaf tunai yang diperuntukkan bagi perluasan tanah pesantren. Seorang wakif bernama Sayyidah Lala Sulaiman Ibrahim Al Musalam asal Kuwait, misalnya, memberikan wakaf sebesar Rp400.000.000,00 untuk pembebasan tanah seluas 10.000 meter persegi yang sebagiannya telah digunakan untuk pembangunan masjid santri putra.²⁵ Demikian juga Sayyid Sa'ad Al Awad dari Riyadh Arab Saudi memberikan wakaf untuk pembangunan sumur arteri untuk keperluan sanitasi para santri putra.

Wakaf tunai untuk pembelian tanah dalam rangka perluasan area pesantren juga diberikan oleh wakif asal Serang bernama Bapak Slamet Subagyo sebesar Rp1.050.000.000,00 guna pembelian tanah persawahan yang letaknya persis disamping kompleks pesantren.²⁶ Rencananya pada kawasan ini akan dibangun ruang belajar, dapur guru, dapur santri, kantin, kantor pengasuhan, dan kantor madrasah. Area persawahan tersebut saat ini sebagian telah diurug tanah merah

²⁵Menurut Ustaz Rasyid, biasanya donatur Timur Tengah tidak berminat dengan wakaf untuk pembelian tanah karena secara tradisional mereka meyakini wakaf tanah 'pahalanya' kurang berlimpah dibandingkan dengan wakaf gedung yang digunakan untuk kegiatan belajar maupun ibadah santri. Namun, pada kasus di Al Rahmah nampaknya terdapat pengecualian yang dia sendiri tidak mengetahui sebabnya. *Wawancara Ustaz Rasyid*, 13 Agustus 2017.

²⁶Slamet Subagyo adalah Direktur PT. Gapura Rahayu yang bergerak di bidang properti, jasa, dan perdagangan besar. Perusahaan yang dipimpinnya berdiri pada 25 Januari 2011 dengan alamat kantor Jalan KH. Sulaiman Kelapa Dua Kota Serang Banten. Di antara proyek di Kota Serang yang pernah ditangani adalah pembangunan Perumahan Rahayu Residence dan Perumahan Kiara Rahayu (Sumber: *Laman PT. Gapura Rahayu*). Berdasarkan informasi Ustaz Subiyantoro, dia berasal dari Wonosobo Jawa Tengah. Hingga saat ini dia dipercaya oleh Al Rahmah untuk membangun pergedungan terutama asrama dan ruang belajar. Interaksi awalnya dengan pesantren diperkenalkan oleh seorang wali santri asal Cilegon, H. Munan, yang juga seorang pengusaha karena pesantren membutuhkan ahli proyek bangunan. Ternyata, KH. Abdullah Said Baharmus, pembina Al Rahmah dan Laison Wakaf dari Timur Tengah, merasa puas dengan hasil pekerjaannya menggarap proyek-proyek di pesantren sehingga terus mendapatkan kepercayaan. Ketergerakan hatinya untuk berwakaf karena melihat kesungguhan pengurus pesantren memperjuangkan kepentingan Allah dan masyarakat melalui dunia pendidikan Islam, *Wawancara Ustaz Rasyid*, 13 Agustus 2017.

untuk perataan dan penguatan. Biaya pengurangan bersumber dari kas pesantren. Berikut disajikan sarana dan prasarana yang pembiayaannya berasal dari wakaf:

Tabel 3.1 Sarana dan Prasarana Berbasis Wakaf

No	Sarana-Prasarana	Dana Wakaf	Tahun
1	Asrama Santriwati “Latifah” dan Masjid Santriwati	Rp1.600.000.000,00	2011
2	Asrama Yatama Putri	Rp1.500.000.000,00	2014
3	Perumahan Guru	Rp480.000.000,00	2015
4	Tanah 10.000 m ²	Rp400.000.000,00	2015
5	Sumur Artesis	Rp30.000.000,00	2015
6	Tanah 7.000 m ²	Rp1.050.000.000,00	2016
7	Asrama Yatama Putri	Rp1.160.000.000,00	2017
8	Masjid Putra	Rp4.400.000.000,00	2017
9	Ruang Kelas	Rp2.000.000.000,00	2017
10	Asrama Yatama Putra	Rp1.600.000.000,00	2017
11	Asrama Yatama Putra	Rp1.200.000.000,00	2021
12	Aula Serbaguna	Rp5.800.000.000,00	2021

Sumber: Wawancara

Dapat dikatakan bahwa wakaf menjadi sumber pembiayaan utama pembangunan fisik pesantren. Berkat wakaf wajah pesantren telah berubah total dari sebelumnya dikenal sebagai “pesantren miskin” karena kekurangan sarana dan prasarananya yang serba darurat dan temporer, menjadi pesantren yang berpenampilan fisik representatif setidaknya untuk sarana asrama santri dan tempat ibadah. Ke depan pesantren akan fokus pada pembangunan ruang belajar yang representatif karena saat ini baru tersedia beberapa lokal saja.

4. Hibah

Keuangan sosial Islam berikutnya yang menjadi sumber pembiayaan pesantren, khususnya untuk pengembangan infrastruktur, adalah hibah. Hibah merupakan pemberian sukarela dari satu pihak kepada pihak lain. Objeknya bisa berupa benda maupun nonbenda yang dalam Islam harus sesuai kadiyah syariah. Dalam konteks ini, saya memaknai bantuan sosial dari individu, lembaga, maupun pemerintah sebagai bentuk hibah. Karena itu, bantuan bantuan pembangunan lokal baru

maupun rehab gedung dan bantuan operasional sekolah (BOS) juga dikategorikan sebagai hibah.

Menurut informasi Ustaz Subiyantoro, Al Rahmah pernah memperoleh dana hibah dari Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Banten pada tahun 2009 sebesar Rp150.000.000,00 yang digunakan untuk pembangunan Laboratorium Ilmu Pengetahuan Alam (IPA). Hibah ini tidak dalam bentuk tunai, namun dalam bentuk voucher yang dapat digunakan untuk berbelanja keperluan pembangunan. Seterusnya hingga kini belum ada lagi bantuan dari Kementerian Agama untuk pengembangan fisik.²⁷ Tetapi, Kementerian Agama selalu mendukung apabila pesantren membutuhkan dukungan seperti surat rekomendasi atau apa saja yang dibutuhkan untuk pengajuan bantuan kepada pihak luar negeri. Kegiatan pesantren selalu mendapatkan perhatian pihak Kementerian Agama baik tingkat kota maupun tingkat propinsi.

Ustaz Subiyantoro juga menginformasikan bahwa Al Rahmah mendapatkan bantuan pemerintah melalui Kementerian Agama dalam bentuk dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS). Ketika ditanyakan sejak kapan Al Rahmah menerima dana BOS dia menjelaskan bahwa bantuan tersebut diterima sejak tahun pelajaran 2015 sehingga sampai kini telah berjalan selama tiga tahun.²⁸

Perlu diketahui bahwa dana BOS diberikan mengikuti tahun anggaran pemerintah dari bulan Januari hingga Desember. Dengan demikian, ia tidak diberikan berdasarkan kalender akademik madrasah. Karena itu, dalam satu tahun anggaran mekanisme pencairannya dibagi menjadi dua semester yang berbeda kalender akademik. Misalnya pencairan dana BOS termin pertama diberikan pada semester gasal Juli–Desember (sesuai dimulainya tahun akademik baru di bulan Juli), maka pencairan termin kedua dicairkan pada semester genap tahun akademik berjalan.

Perhitungan alokasi dana BOS untuk setiap satuan pendidikan didasarkan pada jumlah peserta didik aktif pada tahun anggaran berjalan dikalikan dengan besaran dana per peserta didik. Setiap tahun, besaran dana BOS/per siswa senantiasa mengalami perubahan. Pada tahun 2015 dana BOS Madrasah Tsanawiyah/siswa/tahun mencapai

²⁷Wawancara Ustaz Subiyantoro, 11 Oktober 2017.

²⁸*Ibid.*

Rp710.000,00 dan siswa Madrasah Aliyah sebesar Rp1.000.000,00. Terdapat kenaikan pada tahun 2016 yang mencapai Rp1.000.000,00/siswa/tahun untuk Madrasah Tsanawiyah dan Rp1.200.000,00/siswa/tahun untuk Madrasah Aliyah. Besaran dana BOS tahun 2017 juga mengalami kenaikan untuk Madrasah Aliyah yang mencapai Rp1.400.000,00/siswa/tahun, sedangkan untuk Madrasah Tsanawiyah tidak mengalami kenaikan.

Adapun dana BOS yang diterima oleh Al Rahmah dari tahun 2020 hingga 2022 berdasarkan jumlah santri MTS dan MA adalah sebagai berikut:

No	Tahun	Dana BOS
1	2020	Rp696.000.000,00
2	2021	Rp670.500.000,00
3	2022	Rp687.500.000,00

Sumber: Data Penerimaan Dana BOS

Sedangkan rekapitulasi jumlah peserta didik adalah sebagai berikut:

No	Tahun	MTS	MA	Jumlah
	2022-2023	858	432	1290

Sumber: Bagian Pengajaran Al Rahmah

Peruntukan, penggunaan, pelaporan, dan pengawasan dana BOS ditetapkan setiap tahun dalam bentuk Petunjuk Teknis (Juknis) yang mutlak harus dipatuhi oleh pihak penerima. Juknis dana BOS pada madrasah dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Pendidikan Islam (Dirjen Pendis) Kementerian Agama Republik Indonesia.

B. Profil Donatur

Profil donatur, terutama para wakifin dari Kuwait, Saudi Arabia, dan Uni Emirat, tidak tersedia lengkap. Informasi yang diperoleh mengenai mereka hanya sekitar nama dan asal negara yang memang terpatri pada prasasti peresmian gedung yang dibangun dari dana yang mereka wakafkan. Sedikit informasi tambahan diperoleh dari wawancara dengan Ustaz Rasyid yang sering membuat rekaman video mengenai aktivitas santri Al Rahmah yang memanfaatkan fasilitas bangunan dari para

wakifin dan mengirimkannya kepada mereka sebagai bahan tambahan laporan penggunaan dana. Informasi tersebut mengenai profesi para wakifin dan hanya beberapa nama saja yang diketahui.

Kesulitan pengungkapan profil para donatur juga disebabkan faktor lain. Para donatur adalah individu-individu yang dikenalkan dengan Al Rahmah lalu diyakinkan untuk membantunya oleh donatur lain (sebutlah perantara) yang sebelumnya pernah berwakaf. Hal ini diketahui dari tulisan yang terpahat pada prasasti peresmian gedung di mana nama wakif dan nama perantara yang mempersuasinya sama-sama tertulis. Misalnya pada prasasti wakaf sumur artesis tertulis ungkapan sebagai berikut menggunakan bahasa Indonesia dan bahasa Arab:

“PROYEK SUMUR ARTESIS WAKAF LILLAHI TA’ALA DARI TUAN SA’AD AL AWAD (wakif-pen) via TUAN ABDURRAHMAN SA’AD AL ‘IED (perantara-pen) DARI RIYADH KERAJAAN ARAB SAUDI”.²⁹

Pola serupa juga ditemukan pada prasasti wakaf tanah seluas 10.000 meter persegi yang berisi ungkapan sebagai berikut:

“TANAH WAKAF 10.000 M² WAKAF LILLAHI TA’ALA DARI NYONYA. LAILA SULAIMAN IBRAHIM AL MUSALAM (wakif-pen) via TUAN UMAR AL QADHI (perantara-pen) DARI NEGARA KUWAIT”.³⁰

Kesulitan pendataan wakif juga disebabkan karena wakaf diberikan secara kolektif melalui lembaga filantropi Islam. Lembaga yang mengoordinasikan wakaf pada Al Rahmah adalah *Al Hai’ah Al Khairiyah Al Islamiyah Al Dauliyah* yang bermarkas di Kuwait.³¹ Lembaga ini mengakumulasi dana-dana sumbangan dari para donatur baik di Kuwait maupun negara teluk lainnya yang kemudian disalurkan ke berbagai negara Muslim melalui lembaga filantropi Islam lokal maupun

²⁹Observasi dan Dokumentasi, 13 Agustus 2017.

³⁰*Ibid.*

³¹Profil singkat organisasi ini dapat diakses pada laman: www.globalhand.org. International Islamic Charity Organization (IICO/Jam’iyah Al Khairiyah Al Islamiyah Al ‘Alamiyah) berpusat di Kuwait dan didirikan pada tahun 1986. Organisasi merupakan organisasi nirlaba nonpolitik yang memberikan bantuan kemanusiaan lintas dunia kepada mereka yang membutuhkan tanpa memandang etnis dan identitas negara. IICO membantu bidang sosial, ekonomi, pendidikan, kesehatan, dan budaya serta bantuan darurat akibat perang, bencana alam, penyakit endemik dan keadaan darurat lainnya. Lihat: www.globalhand.org (diakses tanggal 2 Oktober 2017).

individu tertentu yang mereka kenal dengan baik dan dipercayai sepenuhnya untuk menyalurkan donasi yang terkumpul. Pada konteks Al Rahmah, lembaga lokal yang terpilih adalah Jam'iyah Ar-Rahmah Jakarta Indonesia yang dipimpin oleh KH. Abdullah Said Baharmus, Lc.

Pada tiga tahun terakhir, dana wakaf bagi Al Rahmah khususnya dari Kuwait, disalurkan juga oleh para wakifin melalui organisasi resmi pemerintah Kuwait yakni *Bait Al Zakat* dan *Kementerian Wakaf dan Urusan Islam*. Pada prasasti Gedung asrama, yatim Daar Zamzam Lilyatimat tertulis: “WAKAF ALMARHUMAH ZAMZAM ALI ABU TALIB ISYRAF (*Supervisi-pen*) BAIT AL ZAKAT DAULAH AL KUWAIT”. Demikian juga pada prasasti gedung auditorium Kuwait Al Khair tertulis: “... IHDA MIN WIZARAT AL AWQAF WA AL SYU'UN AL ISLAMIAH (*persembahan dari Kementerian Wakaf dan Urusan Islam-pen*) SAYYID ISA AHMAD MUHAMMA AL KANDARI ...”

Menurut penuturan Ustaz Rasyid, mayoritas wakaf di Al Rahmah memang berasal dari warga negara Kuwait maupun warga negara Teluk lainnya yang disalurkan melalui lembaga yang beroperasi di Kuwait. Menurutnya, Al Rahmah secara resmi telah disahkan sebagai destinasi wakaf mereka pada tanggal 29 April 2017 dengan menyandang nama “*Kuwait Charity Village*” (*Qaryah Al Kuwait Al Khairiyah*-Perkampungan Donasi Kuwait). Status ini diberikan kepada Al Rahmah setelah sebelumnya diberikan kepada Pesantren Darussalam Garut Jawa Barat.³²

Berikut profil ringkas para donatur pada Al Rahmah berdasarkan hasil observasi dan wawancara:

NO	Nama	Profesi	Negara
1	Muhammad Az Zamil	Pengusaha	Uni Emirat Arab
2	Syekh Waleed Al Marshud	Pengusaha	Kuwait
3	Dr. Athoullah	Tenaga Medis	Arab Saudi
4	Naseer Al Khalidi	Diplomat	Kuwait
5	Alm. Shabah Al Fadgham	Tidak ada informasi	Kuwait
6	Alm. Sulaiman Naseer Al Marshud	Ayah Syekh Waleed Al Marshud	Kuwait
7	Sa'ad Al Awad	Tidak ada informasi	Arab Saudi
8	Sayyidah Laila Sulaiman Al Musalam	Tidak ada informasi	Kuwait

³²Identitas ini telah terpampang pada gapura utama Pesantren Al Rahmah yang menghadap jalan raya penghubung Ciruas-Petir via Walantaka. Observasi dan Dokumentasi, 13 Agustus 2017.

NO	Nama	Profesi	Negara
9	Slamet Subagyo	Pengusaha	Indonesia
10	Wakaf Kolektif Warga Kuwait	Ragam Profesi	Kuwait
11	Syaikhah Aisyah Mubarak Al Shabah	Tidak ada informasi	Kuwait
12	Ny. Farah Al Musallam	Tidak ada informasi	Kuwait
13	Alm. Zamzam Ali Abu Talib melalui Baituzzakat Kuwait	Tidak ada informasi	Kuwait
14	Kementerian Wakaf dan Urusan Islam	Lembaga Negara	Kuwait
15	Almh. Futuh Abdul Majid Abdul Hamid Alsane	Tidak ada informasi	Kuwait
16	Alm. Ali Jasim Al Kandary	Tidak ada informasi	Kuwait
17	Alm. Shaleh Al Saeed, Assad Shaleh Al Saeed, dan Ny. Huda Al Mutairi	Tidak ada informasi	Kuwait

Sumber: Wawancara

C. Strategi Penghimpunan Donasi

Fuad mengklasifikasikan pesantren sebagai model pendidikan berbasis masyarakat yang berbasis keagamaan. Model demikian merupakan model pendidikan berbasis masyarakat yang menekankan pengembangan nilai-nilai keagamaan tertentu. Pada kasus pesantren, maka nilai-nilai yang dikembangkan adalah nilai-nilai keislaman.

Sebagai pendidikan berbasis masyarakat, maka pesantren harus menjadikan masyarakat sebagai habitat yang mendukung segala dinamika, kebutuhan, dan perkembangannya. Karena itu, ia memerlukan suatu strategi untuk merangkul, meyakinkan, dan mempersuasi masyarakat agar peduli terhadap pesantren. Terlebih lagi dalam masalah pemenuhan pembiayaan penyelenggaraan pendidikan yang tidak mungkin sepenuhnya ditanggung oleh pesantren. Di sinilah letak penting strategi penghimpunan dana yang akan digunakan untuk pembiayaan pesantren.

Pada awal perintisan, Al Rahmah mengandalkan pembiayaan yang bersumber dari pendirinya. Seperti pernah disinggung sebelumnya, pembiayaan diperoleh dari hasil honor ceramah kyainya serta penjualan properti pendiri ditambah dengan donasi sporadis para pihak yang peduli. Sementara pembiayaan dari keluarga santri juga masih sangat

minim mengingat latar belakang ekonomi mereka yang mayoritas dari kalangan yatim dan duafa.

Menurut Ustaz Rasyid, jalan terang penghimpunan dana mulai menemui titik terang pada tahun 2008 setelah kegiatan pesantren berjalan tiga tahun. Titik terang muncul ketika diadakan pelatihan bekam (pengobatan islami dengan cara membuang darah kotor pada tubuh) oleh seorang alumni Gontor tahun 1981, Ustaz Sa'du Su'ud. Ia mengingap di pesantren dan tertarik untuk ikut membantu setelah mengetahui status wakafnya. Ia berjanji mengomunikasikan keadaan dan kebutuhan pesantren kepada KH. Abdullah Said Baharmus, Lc yang dikenal memiliki relasi kuat dengan para donatur Timur Tengah agar memperhatikan Al Rahmah.³³

Setelah menanti selama dua tahun, diperoleh informasi bahwa KH. Abdullah Said Baharmus, Lc. akan berkunjung ke Al Rahmah guna mengetahui secara langsung kondisi yang dihadapi. Masih melekat dalam ingatan Ustaz Rasyid ketika tamu yang lama dinantikan itu mengunjungi pesantren pada tanggal 22 April 2010 saat bumi Al Rahmah dibasahi hujan rintik.³⁴ Meskipun telah mendapat pasokan informasi tentang pesantren dari Ustaz Sa'du Su'ud, ia tetap menanyakan beberapa hal menyangkut pesantren antara lain status kepemilikan apakah pribadi atau wakaf, legalitas kelembagaan, komitmen keumatan dan kemasyarakatan, serta informasi lain yang dibutuhkan. Dalam ungkapan Ustaz Rasyid, nampaknya ia ingin memastikan bahwa Al Rahmah memang layak untuk “dibantu dan diperjuangkan”. Setelah melihat kondisi pesantren yang masih serba darurat terutama terkait sarana dan prasarana, maka ia langsung memberikan komitmen bantuan perdana untuk pembangunan masjid dan asrama santri sebesar Rp1.600.000.000,00 yang kini menjelma menjadi masjid santri putri dan asrama putri “Latifah”. Proyek pertama ini dilaksanakan sendiri oleh pesantren karena saat itu belum mengenal kontraktor yang biasa menggarap proyek pembangunan sekaligus sebagai bentuk kehati-hatian pesantren menggunakan dana bantuan.

Meminjam istilah Sudewo, strategi penggalan dana yang dilakukan Al Rahmah dapat disebut sebagai “komunikasi kemanusiaan”.³⁵

³³Wawancara Ustaz Rasyid, 13 Agustus 2017.

³⁴*Ibid.*

³⁵Erie Sudewo, *DD Way 3x3=9 Prinsip*, (Jakarta: Republika Penerbit, 2017), 332–335.

Komunikasi kemanusiaan merupakan komunikasi yang mengeksplorasi seluruh dimensi kemanusiaan yang dimiliki mustahik (dalam hal ini pesantren) untuk menggedor relung hati donatur melalui empatinya lewat bantuan. Realitas dan faktualitas kehidupan pesantren, para santri yatim duafa, pengurus pesantren, dan fasilitas pesantren yang dilihat secara langsung baik oleh Ustaz Sa'du Su'ud ketika pertama kali menginjak maupun oleh KH. Abdullah Said Baharmus menyuguhkan gambaran konkret tentang betapa lembaga membutuhkan bantuan. Eksistensi pesantren yang berkomitmen mendidik santri yatim dan duafa menjadi penggerak para donatur untuk menyalurkan bantuan sebagai solusi untuk menghentikan rantai ketidakberdayaan dan kemiskinan yang diakibatkan oleh rendahnya pendidikan mereka kaum marginal. Pesantren telah menyampaikan pesan kemanusiaan mengenai manfaat santri yatim dan duafa yang tengah dididik di untuk menjadi manusia yang cerdas, percaya diri, bermental, berakhlak, mandiri, kader keluarga, calon pemimpin, kader agama dan bangsa apabila mereka mendapatkan pendidikan yang layak.

Menurut Sudewo, komunikasi mengenai realitas dan faktualitas rantai kemiskinan akibat ketidakberdayaan menyampaikan tiga pesan utama yakni: realitas lapangan, pengungkapan fakta, gambaran langsung hal yang sulit direkonstruksi.³⁶ Proyeksi donasi yang akan dimanfaatkan pada lapangan pendidikan untuk mendidik kaum marginal memantulkan pesan yang kuat bahwa pesantren harus didukung dan diusahakan mendapatkan bantuan. Status wakaf dan legalitas pesantren menambah keyakinan pihak luar untuk ikut bergerak mendukung pesantren melalui potensi yang dimiliki masing-masing. Pada konteks Ustaz Abdullah Baharmus, ia bisa memanfaatkan jejaring, relasi, koneksi, dan kemampuannya untuk meyakinkan para donatur Timur Tengah dalam membantu pesantren.

D. Pemanfaatan Donasi

Penjelasan mengenai pemanfaatan donasi hanya membahas dana sosial keuangan Islam dari sedekah, infak, wakaf, dan hibah. Pada bagian terdahulu hal ini sebenarnya telah sedikit disampaikan sehingga uraian berikut merupakan suatu penambahan keterangan.

³⁶*Ibid.*, hlm. 331.

Dana infak yang diperoleh dari distribusi kupon infak kepada para santri pada tiap liburan selama tiga tahun terakhir (2015–2016 hingga 2017–2018) mencapai Rp78.475.000,00. Menurut penuturan Ustaz Subiyantoro, dana infak dari distribusi kupon digunakan untuk tambahan pembelian tanah pesantren.³⁷ Dana ini menambah uang bangunan dan wakaf perluasan tanah yang dibayarkan para santri baru ketika pendaftaran masuk pesantren.

Adapun dana wakaf, terutama yang berasal dari Timur Tengah, mayoritas dipergunakan untuk membangun pergedungan seperti asrama santri putra dan putri, sarana ibadah, ruang belajar, pembelian tanah, dan tempat wudhu (*midho'ah*). Pergedungan yang dibangun dengan dana wakaf, antara lain: asrama santri putri “Latifah”, masjid santri putri, asrama santri yatim putri, asrama santri yatim putra, masjid santri putra, ruang belajar, dan rumah pengasuh. Sedangkan tanah pesantren yang dibeli dengan dana wakaf adalah tanah tegalan seluas 10.000 m² dan tanah persawahan seluas 7.000 m². Perlu juga disampaikan bahwa peruntukan dana wakaf lebih berdasarkan prioritas kebutuhan pesantren yang penting untuk segera dipenuhi. Kebutuhan yang paling mendesak dipenuhi adalah asrama santri yang masih terbatas. Padahal, minat masyarakat untuk menyekolahkan putra-putrinya ke Al Rahmah dari tahun ke tahun selalu mengalami peningkatan animo. Namun, akibat keterbatasan asrama, maka terkadang dengan berat hati tidak bisa diterima. Fasilitas lain yang juga mendesak dipenuhi adalah ruang belajar. Saat ini baru terbangun delapan lokal ruang belajar sedangkan ruang belajar selebihnya masih menggunakan ruang belajar darurat di saung-saung.

Terkait dana hibah, pesantren pernah menerima dana dari Kantor wilayah sejumlah 150 juta yang dimanfaatkan untuk pembangunan sarana laboratorium IPA untuk tempat praktikum mata pelajaran eksakta. Sementara itu, dana BOS yang saya klasifikasikan sebagai hibah, telah memiliki peruntukan pasti berdasarkan Petunjuk Teknis (Juknis) yang setiap tahun dirilis oleh pihak Kementerian Agama melalui Direktorat Jenderal Pendidikan Islam.³⁸ Berdasarkan petunjuk teknis

³⁷Ustaz Subiyantoro, Wawancara 11 Oktober 2017.

³⁸Mengenai Juknis BOS pada Kementerian Agama tahun 2017 dapat dilihat Surat Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 7381 Tahun 2017 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Bantuan Operasional Sekolah pada Madrasah Tahun Anggaran 2017.

tersebut diketahui bahwa dana BOS dapat digunakan untuk pembiayaan komponen, sebagai berikut:

1. Pengembangan perpustakaan
2. Kegiatan penerimaan peserta didik baru
3. Kegiatan pembelajaran dan ekstrakurikuler peserta didik
4. Kegiatan ulangan dan ujian
5. Pembelian bahan habis pakai
6. Langganan daya dan jasa
7. Rehab ruang kelas dan perawatan madrasah
8. Pembayaran honor guru non-PNS
9. Kegiatan pengembangan profesi guru dan tenaga kependidikan
10. Bantuan siswa miskin
11. Biaya pengelolaan dan BOS
12. Pengadaan perangkat komputer desktop atau laptop
13. Biaya lain jika poin 1–12 telah terpenuhi³⁹

Menurut informasi Ustazah Enung Nurhayati, penggunaan dan BOS di Al Rahmah mengacu sepenuhnya kepada petunjuk teknis pengelolaan dana yang ditetapkan pemerintah yang dalam hal ini adalah Kementerian Agama. Komponen pembiayaan yang bersumber dari dana BOS banyak digunakan untuk membantu santri yatim dan duafa dalam bentuk pembelian peralatan belajar dan buku-buku teks pelajaran kepesantrenan, pembayaran honor guru non-PNS yang mayoritas belum tersertifikasi, pengembangan perpustakaan, dan kegiatan pembelajaran serta kegiatan penerimaan peserta didik baru.⁴⁰

Apabila pemanfaatan seluruh jenis dana donasi yang diterima dianalisis menggunakan kerangka pengelompokan kegiatan dalam pembiayaan pendidikan, maka akan nampak bahwa dana-dana tersebut dipergunakan untuk membiayai kegiatan kardinal yang terdiri dari tiga gugus, yakni: kegiatan pendidikan di sekolah (baca: pesantren), kegiatan pendidikan di luar sekolah, dan kegiatan penunjang pendidikan luar

³⁹Dirjen Pendidikan Agama Islam Kementerian Agama RI, *Petunjuk Teknis Penggunaan Dana BOS pada Madrasah Kementerian Agama Tahun Anggaran 2017* (Jakarta, 2016), hlm. 13.

⁴⁰Wawancara, 26 Oktober 2017.

sekolah.⁴¹ Kegiatan pendidikan di sekolah meliputi pembangunan unit gedung baru, pembangunan ruang kelas baru, rehab, dan pemeliharaan pergedungan, pembangunan laboratorium, pengadaan buku pelajaran, pembangunan perumahan guru. Kegiatan pendidikan luar sekolah mencakup kegiatan ekstrakurikuler, pengadaan fasilitas olahraga, dan kegiatan monitoring evaluasi (monev). Kegiatan penunjang pendidikan luar sekolah mencakup pengadaan gedung kantor, pengadaan rumah dinas guru, dan evaluasi pelaporan.

E. Manajemen Donasi

Manajemen secara luas dan modern dapat dimaknai sebagai suatu proses sosial yang didesain untuk menjamin terjadinya kerja sama, partisipasi, dan keterlibatan para pihak dalam rangka mencapai tujuan yang diharapkan secara efektif. Manajemen juga dikonsepsikan sebagai proses mendesain dan mengelola lingkungan di mana orang-orang bekerja sama dengan kelompok secara efisien untuk mencapai tujuan.⁴²

Secara operasional, manajemen suatu lembaga pendidikan mencakup komponen manajemen ketenagaan, manajemen peserta didik, manajemen sarana dan prasarana, manajemen keuangan, manajemen kurikulum, dan manajemen lingkungan. Seluruh unsur tersebut sangat strategis dalam rangka memastikan kelancaran penyelenggaraan pendidikan dan pilar keberhasilan pencapaian tujuan pendidikan.⁴³

Secara spesifik, pengelolaan donasi dari berbagai sumber keuangan pada suatu lembaga pendidikan berhubungan dengan masalah manajemen keuangan. Secara ringkas, manajemen donasi (baca: keuangan) mencakup tiga aspek utama, yakni: penerimaan atau sumber dana, pengeluaran atau alokasi, dan pertanggungjawaban. Pelaksanaan pengelolaan keuangan berhubungan dengan pihak yang berfungsi sebagai otorisator, ordonator, dan bendahara. Fungsi

⁴¹Kerangka lengkap pengelompokan kegiatan dalam pembiayaan pendidikan dapat dilihat dalam: Matin dan Nurhattati Fuad, *Manajemen Pembiayaan Pendidikan: Konsep dan Aplikasinya*, (Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2014), hlm. 27–28.

⁴²Nurhattati Fuad, *Manajemen Pendidikan Berbasis Masyarakat Konsep dan Strategi Implementasi*, (Jakarta: Rajawali Press, 2014), hlm. 15–17.

⁴³Nurhattati Fuad, *Manajemen Pendidikan Berbasis Masyarakat*, 35.

otorisator melaksanakan penerimaan dan pengeluaran anggaran, pihak ordonator melakukan pemeriksaan atas permintaan dan penggunaan dana serta memberikan perintah pembayaran. Bendahara melaksanakan penerimaan, penyimpanan, dan pengeluaran dana serta melakukan pertanggungjawaban.⁴⁴

Berdasarkan pada kerangka pengelolaan keuangan tersebut, maka pola manajemen donasi pada Al Rahmah dapat dijelaskan sebagai berikut. Pada dana yang bersumber dari infak sedekah santri melalui skema uang pembangunan gedung dan perluasan wakaf tanah santri baru serta skema distribusi kupon infak sedekah melalui santri pada musim liburan dana dana pinjaman kebajikan (*qard al hasan*), pelaksanaan pengelolaan keuangan sepenuhnya berada di tangan pesantren. Dalam hal ini, pesantren bertindak sebagai otorisator, ordonator, dan bendahara. Terdapat semacam otonomi penuh pada pesantren untuk mengakumulasikan, mendayagunakan, dan mempertanggungjawabkan dana perolehan. Ketiga fungsi keuangan tersebut dijalankan oleh Lembaga Administrasi Pondok yang bertindak berdasarkan arahan dan bimbingan pimpinan pesantren. Dengan kata lain, pimpinan pesantren merupakan figur sentral pengelolaan keuangan namun pelaksanaannya didelegasikan dan dijalankan oleh aparat pesantren dalam Lembaga Administrasi Pondok.

Adapun pola pengelolaan dana yang bersumber dari hibah (bantuan pemerintah) seperti dana bantuan gedung laboratorium serta dana BOS dan dana yang berbasis wakaf sedikit berbeda dengan pelaksanaan pengelolaan dana yang bersumber dari infak sedekah dan *qard hasan*. Dana hibah pemerintah dikelola berdasarkan regulasi yang ditetapkan pihak pemberi hibah (pemerintah). Mulai dari proses penerimaan hingga pertanggungjawaban mengikuti ketentuan baku pemerintah. Pesantren tinggal melaksanakan ketentuan tersebut sehingga terdapat kesan tidak otonom meskipun dari tahap perencanaan anggaran, pelaksanaan anggaran, dan pelaporan anggaran lembaga diberikan kewenangan untuk mengajukan dokumen yang disebut Rencana Kegiatan dan Anggaran Madrasah (RKAM).

Pelaksanaan pengelolaan dana wakaf mengikuti mekanisme sebagai berikut.

⁴⁴Ibid., hlm. 46–47.

1. Para wakifin yang mayoritas berasal dari Timur Tengah mempercayakan wakaf yang mereka salurkan kepada lembaga lokal (baca: Indonesia) yang telah mereka kenal dan percayai. Pada konteks Al Rahmah, lembaga yang mewakili para wakifin adalah Jam'iyah Ar Rahmah pimpinan Ustaz Abdullah Said Baharmus yang berkedudukan di Jakarta. Lembaga ini tidak mengajukan permohonan donasi berdasarkan proposal dari pesantren. Lembaga lebih bersifat menunggu jika ada wakifin yang hendak mewakafkan kekayaannya. Jika terdapat wakifin yang berkomitmen berwakaf untuk peruntukan tertentu, maka lembaga menghubungi pesantren yang akan menerima wakaf tersebut.
2. Pesantren yang menerima informasi adanya komitmen wakaf kemudian menyusun rencana anggaran dan belanja (RAB) sesuai dengan peruntukan wakaf yang dikehendaki wakif dan besaran jumlah wakaf yang akan diberikan. RAB kemudian disampaikan kepada lembaga perwakilan di Jakarta yang selanjutnya mengomunikasikannya dengan pihak wakif. Apabila pengajuan pesantren disetujui wakif, maka komitmen akan diteruskan kepada tahap realisasi.
3. Menjelang tahap realisasi, pesantren mengajukan calon pelaksana proyek pembangunan (*muqowil*-dalam istilah setempat) kepada lembaga yang mewakili para wakifin untuk disetujui sebagai pelaksana proyek.⁴⁵
4. Setelah terbit Surat Perintah Kerja (SPK) dari lembaga perwakilan wakifin, maka pelaksana proyek akan melaksanakan tahapan awal pembangunan gedung seperti fondasi. Setelah 35% pekerjaan selesai, maka pelaksana proyek bersama pihak pesantren mengajukan pencairan dana untuk termin pertama dengan cara membuat laporan keuangan berdasarkan kemajuan pembangunan

⁴⁵Dari delapan proyek pembangunan pergedungan di Al Rahmah, yang sepenuhnya dilaksanakan secara mandiri oleh pesantren hanya satu proyek yakni pembangunan asrama Latifah dan masjid santri putri. Proyek lainnya dikerjakan oleh PT. Gapura Rahayu milik Slamet Subagyo yang juga tercatat sebagai seorang wakif. Menurut Ustaz Rasyid, hal ini tidak terlepas dari kepercayaan Usatad Abdullah Said Baharmus kepada kontraktor proyek yang “berani” menangani proyek-proyek pembangunan tanpa banyak berpikir mengenai keuntungan dengan kualitas yang baik. Bahkan, hubungan baik dengan pihak kontraktor telah menggerakkan pemiliknya ikut ikut berwakaf tanah seluas 7.000 m².

yang dilaksanakan. Laporan kemajuan pembangunan dan dana yang digunakan kemudian diajukan oleh lembaga perwakilan kepada para wakifin.

5. Para wakifin kemudian mentransfer dana mereka kepada lembaga perwakilan wakifin yang selanjutnya mentransfer langsung dana dari wakifin ke rekening kontraktor pelaksana proyek. Demikian seterusnya mekanisme untuk pencairan dana termin kedua hingga termin ketiga ketika pembangunan rampung.⁴⁶
6. Pada akhir pembangunan, pesantren akan menerima laporan total penggunaan dana dari pelaksana proyek dalam bentuk laporan akhir dan serah terima gedung yang dibangun. Dengan demikian, pesantren tidak terlibat langsung dalam pengelolaan dana wakaf yang sepenuhnya diatur oleh lembaga perwakilan wakifin. Meski demikian, pesantren mendapatkan informasi utuh mengenai besaran wakaf dan penggunaannya dari pelaksana proyek.⁴⁷

Berdasarkan analisis di atas, maka terlihat bahwa pengelolaan donasi menyesuaikan dengan ketentuan yang ditetapkan para pihak seperti pemberi infak sedekah, pemerintah, pesantren, lembaga perantara wakaf, para wakifin, dan pelaksana proyek.

Menurut Ustaz Rasyid, mekanisme pengelolaan donasi telah memastikan penggunaan dana sesuai peruntukan dan efisien, pencegahan moral *hazard*, keberlanjutan kemitraan pesantren dengan para pihak, kepercayaan dan kepuasan para donatur, kemanfaatan, serta transparansi. Sambil berkelakar dia mengatakan:

“Kalo tidak jelas (mekanismenya-pen) maka tidak mungkin saya bersedia menyampaikan informasi, data, dokumen, surat atau apa pun tentang semua

⁴⁶Mekanisme ini tertuang dalam dokumen surat yang diajukan pesantren kepada Direktur Yayasan Jam’iyah Ar Rahmah di Jakarta perihal Laporan Perkembangan Pekerjaan Proyek Pembangunan Asrama Yatim Putri tertanggal 21 Juli 2014 yang berisi laporan rincian perkembangan dan pengeluaran anggaran yang divalidasi oleh Ketua Panitia, Sekretaris, dan Pimpinan Pondok/Pengawas.

⁴⁷Menurut Ustaz Rasyid, ia sangat mengapresiasi kinerja pelaksana proyek yang ditangani oleh Slamet Subagyo yang selalu menyanggupi pelaksanaan pembangunan pergedungan di Al Rahmah meskipun dengan dana yang terbatas. Bahkan sering kali pembangunan melebihi pagu anggaran yang disediakan. Misalnya, suatu RAB hanya untuk pembangunan gedung belajar sebanyak 6 (enam) lokal. Namun, pelaksana proyek mampu membangun sebanyak 8 (lokal) dengan tanpa mengurangi kualitas dan spesifikasi bangunan. Wawancara, 13 Agustus 2017.

ini (pengelolaan dana-pen) kepada pihak luar. Tapi karena tidak ada apa-apa yang ditutupi saya persilahkan siapa saja untuk menanyakan langsung ke saya atau ke Pak Bin (Ustaz Subiyantoro-pen) atau kepada Umi (panggilan kepada istrinya-pen). Pondok ini milik umat bukan saya. Jadi kenapa harus khawatir dengan umat yang ingin tahu. Justru bagus supaya mereka ikut bantu pondok nanti”⁴⁸

Ketika ditanyakan apakah ada permintaan-permintaan tertentu dari wakifin terkait sistem pendidikan pesantren, kurikulum pesantren, dan pengelolaan wakaf, ternyata wakifin tidak mempersyaratkan apa pun yang sifatnya tidak kondusif diimplementasikan. Mereka hanya meminta kesediaan pesantren untuk menjadi destinasi baru wakaf mereka dengan menggunakan *benchmark* “Kuwait Charity Village” yang dicantumkan di pintu gerbang utama pesantren. Suatu kali mereka pernah menanyakan kegiatan ekstrakurikuler santri yang dijawab bahwa semua kegiatan dalam koridor pendidikan Islam. Pada beberapa kesempatan visitasi para wakifin ke pesantren untuk melihat langsung penggunaan wakaf yang mereka donasikan, para santri mendemonstrasikan kegiatan-kegiatan ekstrakurikuler yang digeluti seperti pencak silat, marawis, paduan suara, drum band, tarian islami, keolahragaan, dan sebagainya.

F. Pertanggungjawaban Donasi

Kepercayaan masyarakat kepada pesantren merupakan sesuatu yang sangat berharga. Kepercayaan tersebut menarik mereka untuk mendukung sekaligus membantu program yang dikembangkan pesantren. Sekalipun usianya masih terbilang muda, namun Al Rahmah telah berhasil meraih kepercayaan masyarakat. Animo masyarakat untuk mendidik anaknya di pesantren ini terus meningkat. Kepercayaan para donatur dalam dan luar negeri juga terus mengalir sehingga perkembangan pesantren, setidaknya secara fisik, terbilang pesat.

Menurut Sudewo, keberhasilan suatu organisasi nirlaba tidak terlepas dari kemampuannya menjelaskan diri kepada khalayak. Masyarakat akan tergerak mendukung sekaligus membantu organisasi nirlaba apabila mereka mendapatkan informasi yang cukup tentang identitas lembaga tersebut. Jika ingin meraih kepercayaan dan dukungan masyarakat, maka organisasi nirlaba harus mengomunikasikan diri

⁴⁸Ustaz Rasyid, Wawancara 13 Agustus 2017.

kepada mereka. Beberapa poin yang mesti diketahui masyarakat adalah: *pertama*, identitas kenirlabaannya; *kedua*, penghayatan identitas kenirlabaan oleh segenap elemen lembaga; *ketiga*, pengetahuan masyarakat luas terhadap identitas kenirlabaan lembaga; *keempat*, para mitra, selain donatur, juga mengetahui identitas kenirlabaan lembaga.

Berdasarkan pemikiran tersebut, keberhasilan Al Rahmah mendapatkan kepercayaan tinggi masyarakat tidak terpisahkan dari kemampuannya menyampaikan identitas dirinya sebagai organisasi nirlaba dalam bentuk pesantren. Pilihan nama yayasan “Rahmatan Lil’Alamin” yang kemudian menaungi nama pesantren “Al Rahmah” mencerminkan visi dan misinya sebagai pesantren yang bercita-cita menjadi rahmat bagi alam semesta melalui karya pendidikan. Selanjutnya, pilihan untuk membidik segmen masyarakat kalangan bawah, terutama kalangan yatim dan duafa, sebagai target pendidikan juga menegaskan keberpihakannya kepada kemanusiaan. Terlebih lagi, identitasnya sebagai pesantren wakaf semakin menguatkan pencitraan sebagai organisasi nirlaba. Oleh karena itu, menjadi suatu keniscayaan untuk menjaga kepercayaan yang telah terbangun. Di antaranya adalah dengan mempertanggungjawabkan bantuan yang telah diterima secara transparan dan akuntabel.

Mekanisme pertanggungjawaban dana infak dan sedekah yang bersumber dari wali santri antara lain melalui forum-forum kegiatan santri di mana pimpinan pesantren menyampaikan perolehan dana dan penggunaannya secara terbuka kepada semua warga pesantren. Dengan cara demikian, setiap warga pesantren mengetahui dan ikut mengawasi lalu lintas dana. Tidak ketinggalan, pembukuan beserta bukti-bukti penggunaan juga diarsipkan sekiranya ada pihak yang ingin mendapatkan informasinya. Mekanisme pertanggungjawaban dana hibah pemerintah, baik dana hibah laboratorium maupun dan BOS, disampaikan dalam bentuk Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) sesuai format laporan yang ditetapkan pihak pemberi hibah. Laporan tersebut disertai data dan bukti akurat guna menjamin transparansi dan akuntabilitas. Mekanisme pertanggungjawaban dana wakaf juga disampaikan dalam bentuk Laporan Perkembangan Pekerjaan Proyek per termin pencairan anggaran atau penggunaan dana yang rinci sekaligus dilengkapi bukti-bukti pembayaran yang sah. Dokumen-

dokumen kontrak antara pesantren dengan wakil wakif maupun pesantren dengan pelaksana proyek juga dibuat dan diarsipkan sebagai barang bukti.

Secara khusus, pesantren juga memberikan apresiasi kepada para wakifin. Menurut Ustaz Rasyid, apresiasi yang diberikan antara lain berupa: pemberian kesempatan visitasi wakifin ke pesantren sesuai dengan jadwal yang mereka tentukan, pemberian cenderamata khas pesantren, pengiriman foto-foto kegiatan santri dalam gedung yang dibangun dari wakaf mereka, pengiriman video aktivitas santri kepada mereka, penamaan gedung dengan nama wakif, pembuatan prasasti, dan pemberian ucapan selamat (*tahni'ah*) kepada mereka melalui saluran telepon maupun rekaman video pada momen-momen tertentu seperti hari raya, tahun baru hijrah, ulang tahun negara wakif, dan sebagainya.⁴⁹ Apresiasi tersebut untuk semakin merekatkan jalinan emosional para wakifin dengan pesantren sehingga mereka akan mengomunikasikan citra pesantren kepada pihak lain.

G. Dampak Donasi terhadap Pendidikan

Saatnya melihat dampak donasi terhadap pendidikan. Pertanyaannya: apakah kemanfaatan donasi bagi suatu lembaga pendidikan? Bagaimana kemanfaatan tersebut berimbas kepada bidang lain?

Seperti telah disampaikan pada bab tentang deskripsi lokus penelitian, pada mulanya nama Al Rahmah identik dengan pesantren miskin yang diakibatkan oleh dua sebab yakni mayoritas santrinya dari kalangan yatim dan duafa serta sarana dan prasarannya yang masih sederhana. Kiprahnya belum dilirik dan diperhitungkan oleh masyarakat kecuali oleh mereka yang marginal.

Namun, potret tersebut adalah gambaran lima hingga enam tahun dari masa perintisan. Saat ini, wajah pesantren telah banyak mengalami perubahan. Asrama santri terlihat gagah berkelas karena dibangun

⁴⁹Peneliti pernah diundang pada kegiatan visitasi wakifin dari Kuwait ke pesantren untuk meninjau gedung yang dibangun dari dana wakaf mereka. Karena visitasi tersebut melalui jalur diplomatik, maka kunjungan mereka bersifat resmi kenegaraan. Hadir dalam kesempatan tersebut Kapolda Banten Brigjen. Pol. Ahmad Dhofiri, Kapolres Kota Serang AKBP Komaruddin, Kakanwil Kemenag Provinsi Banten Dr. A. Bazari Syam, M.Pd. dan aparat pemerintah lainnya.

secara permanen dengan menelan biaya miliaran. Masjid tempat santri beribadah dan mengolah spiritualitas juga nampak mewah serta kokoh karena dibangun dengan angka miliaran juga. Masjid santri putri terpisah dengan masjid santri putra. Demikian pula dengan ruang kelas. Sekalipun baru terdapat 8 (delapan) unit, tetapi terlihat mewah dan representatif. Area tanah wakaf pesantren juga semakin bertambah luas. Secara perlahan, tanah tegalan yang berada di sisi belakang pesantren telah dibebaskan dengan dana yang tidak sedikit. Tanah persawahan yang terletak di sisi kiri pesantren juga telah berpindah tangan menjadi milik pesantren. Demikian juga area persawahan yang berada di bagian kanan depan sebelah gerbang utama telah menjadi milik pesantren dan saat ini sedang dibangun gedung asrama yatim putri sebanyak 8 (delapan) lokal terdiri dari dua lantai.

Ujian akhir santri kelas VI yang semula menginduk ke pesantren lain juga telah diselenggarakan secara mandiri. Bahkan, pada tahun 2017 ini pesantren telah bersiap diri mengadakan ujian nasional berbasis komputer dengan membeli 40 unit komputer. Para alumni yang lulus setiap tahun diminati oleh banyak pesantren lain untuk dijadikan sebagai tenaga pengajar. Kaderisasi terus berlanjut karena semua pengajar yang belum menempuh pendidikan S-1 diwajibkan meneruskan studinya setelah setahun pengabdian dengan biaya kuliah ditanggung sepenuhnya oleh pesantren. Instalasi air minum pun tersedia secara terpisah bagi santri putra dan putri. Gerbang pesantren berdiri gagah menghadap jalan utama. Karena itu, dapat disimpulkan pesantren telah mengalami lompatan kemajuan yang sangat cepat pada usianya yang masih muda.

Semua perubahan tersebut berlangsung, antara lain, karena adanya bantuan dana yang bersumber dari sumber keuangan sosial Islam terutama infak sedekah dan wakaf. Hal ini diakui secara langsung oleh pimpinan pesantren yang mengatakan:

“Jika mengandalkan uang pesantren rasanya sulit kami memiliki gedung-gedung yang seperti disaksikan ini. Berapa sih pemasukan pondok? Lebih banyak untuk keperluan sehari-hari. Ini berkah dari Allah yang luar biasa. Mudah-mudahan kami sanggup menerima ujian ini. Tidak terhingga kesyukuran kami melihat semua ini”.

Adanya donasi dari keuangan sosial Islam berdampak nyata terhadap kondisi fisik dan kehidupan pesantren secara luas. Menurut

Ustaz Rasyid, donasi yang diterima pesantren berdampak langsung sebagai berikut:⁵⁰

1. Sangat membantu mempercepat pengembangan fisik pesantren. Adanya bantuan memungkinkan pesantren terus membangun fasilitas keperluan santri baik berupa asrama, ruang kelas, sarana ibadah, sarana sanitasi, fasilitas air minum, perlengkapan belajar, dan sebagainya. Dana yang berasal dari pesantren sendiri dapat dialihkan untuk pembelian tanah bagi perluasan area pesantren dan perawatan rutin fasilitas.
2. Menambah semangat para santri. Harus diakui bahwa ketersediaan fasilitas fisik yang memadai telah memotivasi santri untuk bertahan di pesantren. Adanya asrama yang nyaman membuat mereka betah di pesantren. Fasilitas gedung yang memadai juga membanggakan mereka.
3. Menumbuhkan semangat wali santri. Fasilitas yang representatif ikut menumbuhkan semangat wali santri untuk mendidik anak mereka di pesantren. Sebagian masyarakat masih menimbang kondisi fasilitas pesantren untuk menitipkan anaknya. Kualitas lembaga pendidikan memang tidak dapat dipandang dari segi fasilitas yang disediakan, namun adanya fasilitas yang baik turut menunjang kelancaran penyelenggaraan pendidikan. Paling tidak, suatu lembaga pendidikan harus menyediakan sarana prasarana minimal guna mendukung kualitas penyelenggaraan pendidikan.
4. Meringankan beban pembiayaan yang ditanggung wali santri. Sebagai lembaga pendidikan swasta, pesantren banyak mengandalkan pemasukan dari wali santri untuk membiayai operasional pendidikan. Terlebih lagi bagi pesantren yang belum memiliki unit usaha yang menghasilkan pemasukan kas pesantren. Pembiayaan pendidikan tidak mungkin selamanya ditanggung oleh pendiri maupun pengurus. Sumber dana operasional antara lain didapatkan dari wali santri. Meskipun demikian, wali santri juga mempunyai keterbatasan dalam memberikan dukungan finansial kepada pesantren. Apalagi jika latar belakang ekonomi mereka juga tidak mendukung. Karena itu, dukungan dana keuangan sosial Islam ikut mengurangi beban pembiayaan yang seharusnya ditanggung wali santri karena ada kontribusi dari masyarakat di luar mereka.⁵¹

⁵⁰Wawancara, 13 Agustus 2017.

⁵¹Al Rahmah telah mengembangkan unit usaha yakni kantin santri dan

5. Menambah wibawa lembaga yang menaungi dan masyarakat pendukung pesantren. Mayoritas pesantren, sebagai lembaga pendidikan Islam, meskipun berdiri secara independen, tetap berada di bawah naungan Kementerian Agama. Selama ini, pemerintah yang diwakili oleh Kementerian Agama belum memberikan perhatian maksimal, terutama terkait finansial, terhadap pesantren. Akibatnya, pesantren lebih mengandalkan kemampuan pribadi dan masyarakat dalam pembiayaan penyelenggaraan pendidikan. Keterbatasan tersebut menghambat akselerasi pengembangan pesantren, apalagi yang berhubungan dengan pemenuhan sarana dan prasarana, akibat minimnya anggaran dari pemerintah. Masuknya donasi besar dari infak sedekah dan wakaf yang dimanfaatkan untuk pengembangan fisik pesantren sehingga menjadi kondusif dan representatif, ikut mengangkat nama baik lembaga pemerintah yang menaunginya.
6. Mengembangkan kehidupan lingkungan sekitar pesantren. Pembangunan yang berlangsung di dalam pesantren pasti membutuhkan material dan tenaga kerja. Pemenuhan kedua hal tersebut diambil dari lingkungan sekitar pesantren. Masyarakat yang memiliki material bangunan akan menjadi pemasok bahan kebutuhan pembangunan pesantren. Masyarakat yang mempunyai keahlian pertukangan serta bangunan juga terlibat sebagai tenaga kerja. Dengan demikian, dana donasi yang mayoritas diperuntukkan bagi penambahan pergedungan pesantren turut mendukung pertumbuhan ekonomi masyarakat sekitar.
7. Menumbuhkan jaringan antara pihak donatur dengan pesantren dan masyarakat sekitar. Donasi menjadi jembatan yang menghubungkan para donatur, terutama dari Timur Tengah, dengan pesantren yang menjadi destinasi donasi mereka. Beberapa kali para donatur melakukan visitasi ke pesantren untuk melihat secara langsung kondisi lembaga yang mereka bantu. Proses ini menumbuhkan jalinan silaturahmi antara mereka dengan warga pesantren. Dalam

toko buku. Pemasukan dari kedua unit usaha tersebut sedikit banyak telah ikut membantu pembiayaan operasional pesantren. Dalam hal ini, masih diperlukan dorongan agar pesantren lebih agresif mengembangkan unit usaha untuk membangun kemandirian pembiayaan sehingga sumber dari pihak luar hanya sebagai stimulan.

rangka visitasi tersebut, pesantren juga melibatkan masyarakat sekitar sehingga ikut menjalin silaturahmi dengan pesantren dan para donatur. Pelibatan masyarakat sekitar diharapkan menumbuhkan dukungan terhadap pesantren yang berada di tengah lingkungan mereka. Terlebih lagi, pesantren adalah lembaga pendidikan berbasis masyarakat yang fokus di bidang keagamaan. Disamping untuk pembangunan pesantren, terkadang ada juga donasi yang diperuntukkan bagi masyarakat di sekitar pesantren seperti hewan kurban, sembako, beasiswa, alat peribadahan, santunan, dan sebagainya.

8. Memberdayakan pesantren untuk lebih percaya diri menerima santri kader dari luar daerah Banten. Kepercayaan diri tersebut tumbuh karena pesantren telah mempunyai fasilitas yang mencukupi dan memadai untuk menerima santri dari luar Banten. Awalnya, pesantren tidak bisa leluasa menerima santri kader karena keterbatasan daya tampung dan fasilitas yang tersedia. Dukungan donasi memungkinkan pesantren menyediakan fasilitas sehingga meningkatkan daya tampung.⁵²

⁵²Saat ini Al Rahmah telah menampung 20 santri kader dari luar Banten seperti Kalimantan, Maluku, NTT, dan Lampung. Santri kader adalah sebutan bagi santri yang berasal dari daerah minoritas Muslim yang diharapkan akan kembali ke daerahnya untuk menjadi kader dakwah Islam setelah menyelesaikan studinya.



< BAB 5 KESIMPULAN

Pembahasan mengenai peran keuangan sosial Islam terhadap pembiayaan pendidikan lembaga pendidikan Islam dapat kita simpulkan dan juga saran yang mebnagun untuk ke depannya. Beberapa poin tersebut, yakni:

1. Bentuk-bentuk keuangan sosial Islam yang terdapat di dunia pesantren didominasi oleh wakaf, infak, dan sedekah. Sedangkan bentuk keuangan sosial Islam lainnya adalah hibah dan pinjaman kebajikan (*qard hasan*). Hal ini menunjukkan bahwa sumber keuangan sosial Islam lainnya seperti dana CSR korporasi dan zakat masih terbatas. Pesantren perlu lebih memobilisasi kedua sumber keuangan sosial Islam terakhir agar hadir di tengah pesantren.
2. Keuangan sosial Islam, terutama wakaf, infak, dan sedekah telah berperan penting dan strategis dalam mendukung pembiayaan lembaga pendidikan Islam, terutama pesantren, khususnya pada pengembangan infrastruktur pergedungan yang membutuhkan biaya besar. Hanya saja, pada konteks dana wakaf, masih didominasi oleh wakaf dari negara Timur Tengah daripada wakaf dalam negeri.
4. Diperlukan mobilisasi keuangan sosial Islam yang selama ini belum tergali secara maksimal dengan upaya-upaya yang lebih inovatif.

Misalnya penghimpunan dana abadi pendidikan Islam pada lembaga Islamic Social Trust Fund (ISTF). Korporasi juga perlu didorong untuk menyalurkan CSR-nya kepada lembaga pendidikan Islam, terutama pesantren, baik dalam bentuk tunai maupun program pendampingan.

5. Diperlukan sosialisasi dan edukasi lebih massif mengenai posisi strategis keuangan sosial Islam dalam mengakselerasi pengembangan infrastruktur lembaga pendidikan Islam, khususnya pesantren, yang belum banyak mendapatkan dukungan finansial dari pemerintah.
6. Diperlukan pengembangan unit-unit usaha pesantren sebagai sumber keuangan mandiri sehingga mengurangi ketergantungan terhadap sumber keuangan dari luar dan menumbuhkan semangat berkarya yang menjadi keunggulan dunia pesantren.



DAFTAR PUSTAKA

- A'la, Abd. *Pembaruan Pesantren*. Yogyakarta: Pustaka Pesantren. 2006.
- Abdullah, Irwan., dkk. (Ed). *Agama, Pendidikan Islam, dan Tanggung Jawab Sosial Pesantren*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008.
- Afrizal. *Metode Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Rajawali Press. 2016.
- Berkel, Van. "Waqf Documents on the Provisions of Water in Mamluk Egypt" dalam Bernard Weiss (Ed), *Studies in Islamic Law and Society* Leiden: EJ. Brill. 2017.
- Bray, Mark (Ed). *Community Financing of Education: Issues and Policy Implications in Less Developed Countries*. New York: Pergamon Press. 2016.
- Chaudhry, Muhammad Syarif. *Sistem Ekonomi Islam: Prinsip Dasar*. Jakarta: Prenada Media. 2012.
- Colclough, Chirstopher (Ed). *Education Outcomes and Poverty: A Reassessment*. Oxon: Routledge. 2012.
- Crowther, David dan Guler Aras. *Corporate Social Responsibility*. USA: Ventus Publishing. 2008.
- Dhofier, Zamakhsyari. *Tradisi Pesantren Suatu Pandangan Hidup Kyai dan Visinya mengenai Masa Depan Indonesia*, Edisi Revisi. Jakarta: LP3ES. 2011.

- Dirjen Pendidikan Agama Islam Kementerian Agama RI. *Petunjuk Teknis Penggunaan Dana BOS pada Madrasah Kementerian Agama Tahun Anggaran 2017*. Jakarta. 2016.
- Fauzia, A. (2008). "Faith and the State A History of Islamic Philanthropy in Indonesia", Ph.D Thesis, Faculty of Arts, Asia Institute The University of Melbourne.
- Fuad, Nurhattati. *Manajemen Pendidikan Berbasis Masyarakat Konsep dan Strategi Implementasi*. Jakarta: Rajawali Press. 2014.
- Halim, A. dkk. (Eds). *Manajemen Pesantren*, Cet. II. Yogyakarta: Pustaka Pesantren. 2009.
- Hamad, Nazih. *Mu'jam Al Mustalahat Al Iqtisadiyah fi Lugah Al Fuqaha*. Riyadh: International Publishing House. 1995.
- Latif, Hilman. "Filantropi Islam dan Kemiskinan". Artikel Opini Harian *Republika*, 3 Agustus 2016.
- _____. "Islamic Charities and Social Activism: Welfare, Dakwah and Politics in Indonesia". *Unpublished Thesis in Universiteit Utrecht*. 2012.
- Lehner, Othmar M. *Routledge Handbook of Social and Sustainable Finance* New York: Routledge, 2016.
- M. Juhro, Solikin., dkk. *Keuangan Publik dan Sosial Islam Teori dan Praktik*, Depok: Rajawali Press. 2018.
- Malik, M Luthfi. *Etos Kerja, Pasar, dan Masjid Transformasi Sosial-Keagamaan dalam Mobilitas Ekonomi Kemasyarakatan*. Jakarta: LP3ES, 2013.
- Mardiyah. *Kepemimpinan Kiai dalam Memelihara Budaya Organisasi*. Yogyakarta: Aditya Media Publishing, 2013.
- Matin & Nurhattati Fuad. *Manajemen Pembiayaan Pendidikan: Konsep dan Aplikasinya*. Jakarta: Rajagrafindo Persada. 2014.
- Matin, *Manajemen Pembiayaan Pendidikan*. Jakarta: Rajawali Press, 2011
- Muhamad. *Dasar-Dasar Keuangan Syariah*. Yogyakarta: Ekonosia. 2014.
- Nurhayati, Aniek. *Membangun Dari Keterpencilan: Soft Constructivism, Kesadaran Aktor dan Modernitas Dunia Pesantren di Pedesaan*. Jakarta: Daulat Press. 2016.
- Obaidullah, Mohammed & Turkhan Ali Abdul Manap. *Behavioral Dimensions of Islamic Philanthropy: The Case of Zakat*. IRTI Working

- Paper Series, No. WP/2017/02. Jeddah: Islamic Research and Training Institute.
- P3EI UII Yogyakarta. *Ekonomi Islam*. Jakarta: Raja Grafindo Persada. 2008.
- Permani, Risti. *The Economics of Islamic Education: Evidence from Indonesia*. Adelaide: The Adelaide University. 2010 (Unpublished Thesis).
- Qamar, Mujamil. *Menggagas Pendidikan Islam*. Bandung: Rosdakarya. 2014.
- Reimers, Fernando M. "Educating the Children of the Poor: A Paradoxical Global Movement" dalam: William G. Tierney (Ed), *Rethinking Education and Poverty*. Maryland: John Hopkins University Press. 2015.
- Subhan, Arief. *Lembaga Pendidikan Islam Abad 20: Pergumulan Antara Modernisasi dan Identitas*. Jakarta: Prenada Media. 2012.
- Sudarsono, Heri. *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah Deskripsi dan Ilustrasi*. Yogyakarta: BFE UII. 2015.
- Sudewo, Erie. *DD Way $3 \times 3 = 9$ Prinsip*. Jakarta: Republika Penerbit. 2017.
- Sudrajat, Budi. *Dimensi Ekonomi Pesantren, Kontribusi Pesantren terhadap Kesejahteraan Sosial Masyarakat Marginal*. Serang: LP2M. 2016.
- _____. *Mainstreaming Ekonomi Syariah: Kajian Perekonomian Dunia Pesantren di Banten*. LP2M IAIN SMH Banten. 2014
- Suharto, Edi. *Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat: Kajian Strategis Pembangunan Kesejahteraan Sosial dan Pekerjaan Sosial*. Bandung: Refika Aditama. 2014.
- Supriadi, Dedi. *Satuan Biaya Pendidikan Dasar dan Menengah*. Bandung: Rosdakarya, Cet-V. 2010.
- Syarifuddin, Ferry. *Keuangan Sosial Produktif Islam*. Depok: Rajawali Press, 2022.
- Truna, Dodi S & Rudi Ahmad Suryadi. *Paradigma Pendidikan Berkualitas*. Bandung: Pustaka Setia. 2011.
- Wahid, Abdurrahman. *Menggerakkan Tradisi: Esai-Esai Pesantren*. Yogyakarta: LKiS. 2001.
- Warde, Ibrahim. *Islamic Finance Keuangan Islam dalam Perekonomian Global* (terj). Yogyakarta: Pustaka Pelajar. 2009.

Zubaidi. *Kementerian Agama dalam Angka 2013*. Jakarta: KEMENTERIAN AGAMA RI.

Koran, Majalah, dan Sumber Elektronik

Harian *Republika* (19 Juli 2016).

www.kemenkumham.go.id

Wawancara

Bapak Slamet Subagyo

Ustaz Aat Syafaat

Ustaz Abdul Rasyid Muslim

Ustaz Subiyantoro

Ustaz Wahono

Ustaz Wahyu

Ustazah Enung Nurhayati



INDEKS

A

Abdul Rasyid Muslim, 27, 31, 33,
34, 37, 41, 49-50, 82
Abi, 41
ADB, 26
alokasi, 26, 52, 57, 66
Al Rahmah, viii, 27-33, 35, 36,
40-42, 44, 46, 47, 50-55,
57-62, 64-65, 67-72, 74, 76
altruistik, 17
anggaran, 2, 5, 21, 24, 25, 38, 52,
57, 64, 67-69, 71, 75
APBN, 26
Arab, 11, 38-39, 41, 49, 55, 59
Arab Saudi, 38, 39, 55, 59
asrama, 4, 28-29, 31, 34, 36-39,
41, 44, 48, 51, 53-56, 60, 62,
64, 68-69, 72-74

B

BAIT AL ZAKAT, 60
Banten, 5, 28, 30, 33, 35, 36, 40,
45, 46, 48, 55, 57, 72, 76,
81, 87, 88
BAZNAS, vii, 3, 8, 14
berkelanjutan, vii, ix, 7, 8, 13, 14,
16, 17, 20, 22
biaya, 1, 3, 21, 23-26, 31, 36, 38-
40, 48-51, 56, 65, 73, 77, 81
BUMN, 3, 22, 25
BWI, vii, 3

C

CSR, 3, 8, 13, 21, 22, 77

D

- DAK, 26
Dampak, xii, 72
dana, vii, viii, 1-4, 8, 13, 21-22, 24-26, 37-39, 44, 49-52, 54, 57-69, 71-75, 77, 78, 80
dana BOS, 57, 58, 64, 65, 67, 80
dana wakaf, 3, 4, 21, 54, 60, 64, 67, 69, 71, 72, 77
Dar El Qalam, 28, 41, 44-46
DAU, 26
Dewan Guru, xii, 33, 37
Dinasti Mamluk, 21
donasi, vi, xii, 4, 8, 14, 26, 34, 38, 40, 51, 52, 60, 61, 63, 65-70, 72-76
donatur, xii, 5, 13, 31, 38, 39, 44, 55, 58-60, 62-63, 69-71, 75-76

E

- ekonomi, vi, vii, xi, 4-18, 21, 22, 25, 44, 49, 59, 62, 74, 75, 79-81, 87-88
Ekonomi Islam, 10, 11, 79, 81
Enung Nurhayati, 28, 31, 41, 44, 45, 65, 82
Eropa, 10, 11, 22

F

- filantropi Islam, v, vi, vii, viii, 17, 19, 26, 52, 59, 80

G

- Gene W. Heck, 11
Gontor, 4, 27-29, 32, 33, 35, 40, 41, 45-46, 49-50, 52, 62, 87

H

- humanistik, 17

I

- IDB, v, 17, 26
IMF, 26
Indeks, xii, 51, 83
Indonesia, v, vii, 1, 3, 4, 19, 35, 37, 38, 43, 49, 52, 58-60, 68, 79-81, 88
infak, v, vii, 3, 20, 47, 50, 51, 63-64, 67, 69, 71, 73, 75, 77
IRTI, 17, 80
Islam, iv, v, vi, vii, viii, ix, x, xi, xii, 1-23, 26, 27, 38, 40, 41, 43, 46, 47, 49, 52, 54-56, 58-60, 63-65, 70, 73-81, 87, 88

J

- James D. Tracy, 11

K

- Kementerian Agama, 2, 26, 29, 32, 40, 57, 58, 64, 65, 75, 80, 82, 87
kesejahteraan, 2, 6, 12, 14-17, 19, 21, 22, 41, 44, 49, 81, 88
keuangan Islam, 6, 7, 11-14, 63, 81

keuangan sosial Islam, iv, v, vi,
vii, viii, ix, x, xi, xii, 3-11,
13-21, 23, 27, 43, 47, 52, 54,
56, 73-74, 77-78, 88

KMI, 32

KN. Chaudhuri, 11

Kuwait, 31, 37-40, 51, 55, 58-60,
70, 72

Kyai, 27, 31-34, 37, 40-42, 44-
50, 79

L

LAZ, 4

lembaga pendidikan Islam, iv, vii,
viii, ix, 1-3, 5, 47, 75, 77-78,
81, 88

LPJ, 71

M

Ma, 2, 33, 37, 39, 46, 54, 58

madrasah, vi, 26, 32, 33, 41, 42,
46, 54, 55, 57, 58, 64, 65,
67, 80, 88

Manajemen, viii, 3, 9, 24, 42, 45,
51, 52, 66, 67, 80

masjid, 28, 31, 34, 37, 39, 47,
48, 53, 55, 62, 64, 68, 73, 80

masyarakat, ix, 1-3, 5, 6, 8, 10,
12, 14-16, 18-20, 22, 24-26,
28, 30, 31, 33-35, 37, 41, 43,
44, 46, 48-53, 55, 61, 64, 66,
70-72, 74-76, 80, 81, 88

moralitas, 7, 12, 15

MTS, 2, 32, 33, 42, 49, 58

Mudir, 41

Muslim, v, 6, 10-12, 17, 19, 26,
27, 31, 33, 34, 37, 41, 42, 49,
50, 59, 76, 82

N

Nasrani, 11

negara, ix, 2, 5, 17, 21, 22, 25, 26,
52, 54, 58-60, 72, 77

O

orientasi, 15-17, 23, 37

P

pembiayaan pendidikan, xi, 1-5,
8, 9, 23-25, 43, 44, 65, 66,
74, 77, 80

pemerintah, vii, 1-5, 8, 24-26, 30,
50, 52, 56, 57, 60, 65, 67, 69,
71-72, 75, 78

Pendidikan Berbasis Masyarakat,
51, 52, 61, 66, 76, 80

pendidikan Islam, iv, vii, viii, ix,
x, 1-5, 38, 41, 46, 47, 52, 55,
58, 64, 70, 75, 77-79, 81, 88

Persia, 11

pertanggungjawaban, xii, 25, 66,
67, 70, 71

pesantren, vii, viii, xi, xii, 2, 5,
26-57, 60-65, 67-81, 87, 88

pinjaman kebajikan, viii, 8, 13,
23, 52, 67, 77

pondok pesantren, vii, viii, 2, 5,
26-29, 33, 35, 40, 41, 44, 46,
51, 52, 87

Q

qard, 8, 13, 23, 52, 67, 77

R

RAB, 68-69

S

santri, viii, xii, 27-30, 32-36,
38-42, 44, 47-51, 53-56, 58,
61-65, 67, 68, 70-74, 76

sedekah, v, vi, vii, viii, 3, 20, 47-
51, 63, 67, 69, 71, 73, 75, 77

SLTA 27, 41

sosialistik, 6, 12, 14

SPK, 68

Subiyantoro, 42, 50, 51, 55, 57,
64, 82

T

Timur Tengah, viii, 38, 52, 55,
62-64, 68, 75, 77

U

Undang-Undang, 18-21, 24

Uni Emirat Arab, 55

Uni Eropa, 22

W

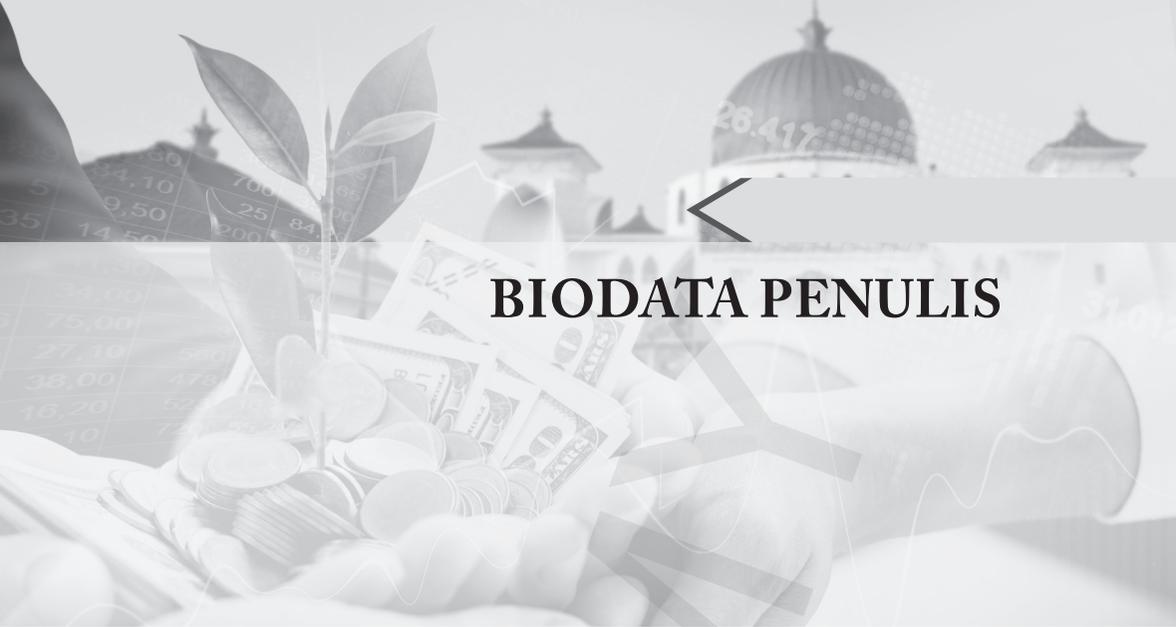
wakaf, v, vi, vii, viii, 3, 4, 8, 14, 20,
21, 26, 40, 45, 50-56, 59, 60,
62-64, 67-73, 75, 77

Y

Yahudi, 11

Z

zakat, v, vi, vii, viii, 3, 15-20, 22,
26, 60, 77, 80



BIODATA PENULIS

Dr. Budi Sudrajat, M.A. lahir di Indramayu Jawa Barat pada 7 Maret 1974. Setelah menamatkan sekolah dasar di SDN Sinar Mulya Terisi (1986) melanjutkan pendidikan ke Pondok Pesantren “Wali Songo” Ngabar Ponorogo (1986–1987) lalu Pondok Modern “Darussalam” Gontor Ponorogo (1987–1992). Mengabdikan setahun di almamaternya dan kuliah di Fakultas Tarbiyah Institut Pendidikan Darussalam (IPD) Gontor tahun 1992–1993. Pada tahun 1994 melanjutkan studi ke IAIN Jakarta dan menyelesaikan program Sarjana Fakultas Ushuluddin tahun 1999. Meneruskan ke program pascasarjana di perguruan tinggi yang sama dengan beasiswa dari Kementerian Agama RI dan meraih magister tahun 2002.

Sejak Desember 2002 diangkat sebagai Dosen Tetap IAIN “Sultan Maulana Hasanuddin” Banten. Pada 2007 mendapatkan beasiswa dari Kementerian Agama RI untuk program doktor di UIN Jakarta dan tamat pada 2013. Sejak menjadi dosen aktif dalam penelitian keagamaan, sejarah Islam, manuskrip Islam, budaya lokal, dan relasi agama dengan ekonomi. Terjemahan, buku, dan penelitian yang pernah dihasilkan: *Sisi-Sisi Agung Perempuan: Episode Penting dalam Lintasan Sejarah* (Terjemahan: Senayan Abadi Publishing, 2003); *Historiografi Islam: Dari*

Klasik Hingga Modern (Terjemahan: Rajawali Press, 2004); *Kekerasan atas Nama Agama: Persepsi Masyarakat Pesantren* (2005); *Buku Teks Sejarah Kebudayaan Islam Madrasah Ibtidaiyah 3–6* (Penerbit Yudistira, 2006); *Buku Teks Pendidikan Agama Islam SMP 1–3* (Penerbit Quadra, 2007); “Sufisme dalam Lagu: Kajian Syair Lagu Grup Debu” (*Jurnal Tela’ah Lemlit IAIN Banten*, 2007); “Pemikiran Sufistik Syaikh Abdullah bin ‘Abd al Qahhar al-Bantani” (*Jurnal Lektur Puslitbang Lektur*, 2008); “Islam di Tengah Masyarakat Adat Asli Baduy Banten” (*Jurnal Dedikasi LP2M IAIN Banten*, 2009); “Inventarisasi dan Digitalisasi Naskah Keagamaan Banten” (*Puslitbang Lektur*, 2009); dan “Hegemoni Budaya Patriarkhi dalam Naskah Keagamaan: Kajian Naskah Adab al-Mar’ah Ila Ahliha” (*Jurnal Skriptoria*, 2012).

Sejak menyelesaikan S-3 mulai menekuni kajian relasi agama dan ekonomi, khususnya di dunia pesantren, dengan beberapa hasil penelitian antara lain: “Mainstreaming Ekonomi Syariah di Dunia Pesantren” (LP2M IAIN Banten, 2014); “Pesantren dan Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat Marjinal” (LP2M IAIN Banten, 2016); “Keuangan Sosial Islam dan Pembangunan Lembaga Pendidikan Islam” (LP2M UIN Banten, 2017); dan “Problem Scaling Up Lembaga Bisnis Pesantren” (LP2M UIN Banten, 2020). Pada tahun 2020 dipercaya oleh BI Institute untuk menjadi narasumber dan Line Editor buku *Praktik Ekonomi dan Keuangan Syariah oleh Kerajaan Islam di Indonesia* (Depok: Rajawali Pers, 2020). Penulis menetap di Permata Banjar Asri C3/67 Banjarsari Cipocok Jaya, Serang, Banten.